

Analisis Framing Pemberitaan Dinasti Politik Jokowi di Tempo.co

Habib Hidayat¹, Slamet Parsono²

¹ Hubungan Masyarakat, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom, Indonesia,
habibhidayat@student.telkomuniversity.ac.id

² Hubungan Masyarakat, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom, Indonesia,
Slametparsono@telkomuniversity.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the framing of news coverage regarding the political dynasty of Indonesia's 7th President, Joko Widodo (Jokowi), as reported by Tempo.co. The main focus of this research is to examine how the media frames the issue of political dynasties and its impact on public perceptions of Indonesia's democracy. This study employs a qualitative method using Robert N. Entman's framing analysis approach, which includes four key elements: problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. The findings show that Tempo.co consistently highlights the practice of political dynasties involving Jokowi's family, linking it to potential abuse of power and the weakening of democratic institutions. Tempo.co frames this issue not merely as a personal or family matter, but as a systemic problem that reflects the fragility of Indonesia's checks and balances mechanism. In addition, this research also finds that Tempo.co frequently employs cultural and political symbols to reinforce the narrative surrounding the consolidation of the President's family power. Thus, this study underlines the crucial role of mass media as a strategic actor in safeguarding democracy and fostering public critical awareness of controversial political issues.

Keywords: Democracy, Framing Analysis, Mass Media, Political Dynasty, Tempo.co.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan mengenai dinasti politik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dimuat di Tempo.co. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media membingkai isu dinasti politik serta dampaknya terhadap persepsi publik terhadap demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis framing Robert N. Entman, yang mencakup empat elemen utama yaitu: pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tempo.co secara konsisten menyoroti praktik politik dinasti yang melibatkan keluarga Jokowi, serta mengaitkannya dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelemahan institusi demokrasi. Tempo.co membingkai isu ini bukan hanya sebagai persoalan personal atau keluarga, tetapi sebagai masalah sistemik yang mencerminkan lemahnya mekanisme checks and balances di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pemberitaan Tempo.co kerap mengangkat simbol-simbol budaya dan politik untuk memperkuat narasi tentang konsolidasi kekuasaan keluarga Presiden. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya media massa sebagai aktor strategis dalam mengawal demokrasi serta membangun kesadaran kritis publik terhadap isu politik yang kontroversial.

Kata Kunci: Analisis Framing, Demokrasi, Dinasti Politik, Tempo.co, Media Massa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena politik dinasti di Indonesia telah menjadi topik yang memicu banyak perdebatan dalam dinamika politik nasional, khususnya terkait dengan keterlibatan Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya dalam politik. Isu ini semakin berkembang seiring dengan laporan-laporan yang diterbitkan oleh berbagai media massa, termasuk Tempo.co, yang secara konsisten mengangkat peran serta anggota keluarga Presiden dalam kontestasi politik, baik di tingkat lokal maupun

nasional. Dalam pemberitaan yang diterbitkan oleh Tempo.co, mengungkapkan dugaan bahwa praktik politik dinasti semakin berkembang melalui jalur kekeluargaan Jokowi.

Artikel utama berjudul *"Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi"* menggambarkan bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden dinilai sebagai bentuk penyimpangan hukum yang menguntungkan kelompok tertentu, khususnya keluarga Presiden Jokowi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tentang intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga yudikatif, serta membuka ruang dominasi politik oleh satu keluarga. Tempo membingkai keputusan tersebut sebagai preseden buruk bagi demokrasi Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan integritas konstitusional dalam setiap proses politik.

Gambar di bawah ini menampilkan unggahan berita dari Tempo yang berjudul *"Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi"*. Berita ini menyoroti bagaimana proses hukum yang seharusnya netral justru dipertanyakan integritasnya karena dianggap memberikan karpet merah bagi kandidat tertentu dari lingkaran kekuasaan. Tempo menampilkan judul yang lugas dan kritis untuk menggugah kesadaran publik terhadap ancaman sistemik terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi.



Gambar 1 Unggahan Berita "Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi"

Sumber : website www.tempo.co

Gambar di bawah juga merupakan unggahan berita Tempo berjudul "Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga". Tempo menampilkan visual yang menggambarkan strategi politik Presiden untuk mempertahankan pengaruh keluarga di lingkaran kekuasaan, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Visual ini menekankan adanya perencanaan kekuasaan yang bersifat sistematis.

Sementara itu, artikel "Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga" mengupas lebih jauh strategi politik yang digunakan oleh Jokowi untuk memastikan pengaruh keluarganya tetap ada, bahkan setelah masa kepemimpinannya berakhir. Ketiga artikel ini mencerminkan bagaimana media, dalam hal ini Tempo.co, menggunakan framing untuk menyajikan isu politik dinasti dan mempengaruhi persepsi publik terhadap fenomena ini.



Gambar 2 Unggahan Berita “Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga”

Sumber : website www.tempo.co

Praktik politik dinasti di Indonesia membawa implikasi serius terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Salah satu konsekuensi paling nyata adalah terhambatnya akses politik bagi individu yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan elit kekuasaan. Hal ini menciptakan eksklusivitas dalam sistem politik yang seharusnya terbuka, memperparah ketimpangan distribusi kekuasaan, serta mempersempit ruang partisipasi politik warga negara yang berada di luar jaringan patronase. Seperti diungkapkan oleh (Gunanto, 2020), politik dinasti memperkuat “oligarki elektoral” yang menempatkan keluarga elite sebagai aktor dominan dalam kontestasi politik, sehingga melemahkan prinsip meritokrasi dan keadilan representatif. Dalam konteks ini, peran media menjadi krusial dalam membentuk persepsi publik terhadap praktik tersebut. Melalui mekanisme framing, media tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial-politik dengan menonjolkan isu-isu tertentu dan mengabaikan yang lain (R. Entman, 2010) dalam jurnal (Rahayu & Setiawan, 2024). Media seperti Tempo.co, melalui pemilihan diksi, fokus narasi, dan pemilihan sumber, turut membentuk opini publik tentang politik dinasti sebagai permasalahan sistemik yang berpotensi mengancam demokrasi substantif.

Teori framing, sebagaimana dijelaskan oleh Robert Entman (R. Entman, 2010) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024), merujuk pada cara media menyajikan informasi dengan tujuan untuk membentuk persepsi publik terhadap suatu isu. Framing tidak hanya melibatkan penyajian fakta, tetapi juga menentukan bagaimana informasi tersebut diterima oleh audiens dengan cara menonjolkan beberapa aspek dan mengabaikan yang lainnya. Dalam hal ini, Tempo.co menggunakan teknik framing untuk menyoroti berbagai dimensi politik dinasti yang terjadi di pemerintahan Jokowi, dengan mengaitkan keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik sebagai bagian dari praktik yang lebih besar, yang berpotensi mengancam kualitas demokrasi di Indonesia.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang ditulis oleh, Ade Kurniawan Siregar dan Eka Fitri Qurniawati yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo.co” (Siregar & Qurniawati, 2022). Fenomena framing dalam pemberitaan media massa menjadi sebuah sorotan penting dalam kajian komunikasi politik, khususnya ketika media membahas isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan kekuasaan. Salah satu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Kurniawan Siregar dan Eka Fitri Qurniawati (2022) menunjukkan bagaimana *Tempo.co* membingkai isu buzzer politik, yang erat kaitannya dengan kekuasaan negara. Menggunakan analisis framing Robert N. Entman, penelitian tersebut menemukan bahwa *Tempo.co* cenderung menampilkan buzzer dalam citra negatif, sebagai aktor yang menyebarkan disinformasi, memecah belah masyarakat, dan mengancam nilai-nilai demokrasi. Dalam konstruksinya, *Tempo.co* menekankan pentingnya penertiban buzzer oleh pemerintah serta menyerukan agar aktivitas buzzer diarahkan pada hal-hal yang positif, alih-alih sekadar alat propaganda politik.

Penelitian tersebut menggambarkan bagaimana media berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu politik, dengan cara *define problem*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*.

Penelitian terdahulu lainnya yang cukup relevan ditulis oleh Rhesqa Syadza Syafa Zahira dan Farikana Adilla yang berjudul “Isu Tentang “Analisis Framing Pemberitaan Politik Dinasti Jokowi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Di Media Online Kompas.Com” (Syafa Zahira & Adilla, 2025). Fenomena politik dinasti di Indonesia bukanlah hal baru, namun isu ini kembali mencuat secara masif menjelang Pemilihan Presiden 2024, terutama setelah munculnya keterlibatan keluarga Presiden Joko Widodo dalam berbagai kontestasi politik. Isu ini menjadi sorotan tajam, bukan hanya karena berkaitan dengan jabatan publik, tetapi juga karena dinilai mengancam prinsip dasar demokrasi Indonesia yang menjunjung kedaulatan rakyat. Pemberitaan media massa memainkan peran penting dalam membingkai isu ini. Salah satu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rhesqa Syadza Syafa Zahira dan Farikana Adilla (2025) menunjukkan bagaimana Kompas.com membingkai isu politik dinasti Jokowi dalam pemberitaannya menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Penelitian tersebut menemukan bahwa media cenderung menampilkan dinamika politik dinasti ini sebagai persoalan yang kompleks, dengan menyoroti aspek hukum, moral, hingga rekomendasi penyelesaian, meskipun tetap terlihat adanya kecenderungan untuk menyeimbangkan antara kritik dan pembelaan terhadap keluarga Presiden.

Penelitian Analisis Framing Dinasti Politik Jokowi pada pemberitaan Tempo.co penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tempo.co sebagai media independent dalam membingkai pemberitaan mengenai Dinasti Politik Jokowi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma Kritis yang diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penuli mengambil judul “Analisis Framing Pemberitaan Dinasti Politik Jokowi Di Tempo.co”

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis framing yang digunakan tempo.co, terhadap pemberitaan dinasti politik. Dengan fokus yang ditentukan, maka penulis bisa menggunakan elemenelemen pada Analisis Framing Robert Entman. Yang mengandung Definisi Masalah, Analisis Penyebab, Analisis Penilaian Moral, dan Rekomendasi Penyelesaian untuk membantu penulis dalam membedah isi wacana yang dikeluarkan oleh tempo.co.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka pertanyaan penilitian ini adalah Bagaimana Tempo membingkai isu dinasti politik Jokowi melalui definisi masalah, penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian terkait dampaknya pada demokrasi?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi sumber refrensi bagi para peneliti yang akan datang serta memberikan manfaat dan informasi bagi peneliti yang berkaitan dengan studi khasanah Komunikasi, khususnya mengenai kajian Analisis Framing dan Media Massa dalam pemberitaan.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi wawasan dan memberikan pandangan dalam pembahasan mengenai bagaimana masyarakat membedah analisis framing bagi kebermanfaatan masyarakat.

1.5 Waktu dan Periode Penelitian

Tabel 1.1 Waktu dan Periode Penelitian

TAHAPAN	Waktu Pengerjaan							
	2024	2025						
	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Proses Menentukan Judul, Topik, dan Objek Penelitian								
Penyusunan BAB I								
Penyusunan BAB II								
Penyusunan BAB III								
Penyusunan BAB IV								
Penyusunan BAB V								
Pendaftaran Sidang								

Sumber: Olahan Data Peneliti (2025)

II. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Framing Robert N. Entman

Teori framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman menyediakan pendekatan yang sangat berguna untuk memahami bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu. Entman menggambarkan framing sebagai "proses pemilihan dan penekanan elemen-elemen tertentu dari peristiwa, aktor, atau isu dalam teks berita untuk mendorong interpretasi, penilaian moral, dan/atau saran solusi tertentu" (R. Entman, 2010) dalam jurnal (Rahayu & Setiawan, 2024). Konsep ini menekankan dua elemen kunci dalam framing, yaitu pemilihan informasi yang akan dipublikasikan dan cara media menyampaikan serta menafsirkan informasi tersebut kepada audiens. Dalam teori ini, Entman mengidentifikasi empat fungsi utama framing, yakni: (1) *define problem*, (2) *diagnose causes*, (3) *make moral judgement*, dan (4) *treatment recommendation*. Dengan framing, media mampu mempengaruhi audiens untuk melihat masalah dari perspektif tertentu dengan menonjolkan aspek-aspek yang dianggap relevan.

Dalam konteks penelitian ini, teori framing dari Entman akan digunakan untuk menganalisis bagaimana Tempo.co menyajikan isu politik dinasti yang melibatkan Joko Widodo. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana

Tempo mendefinisikan isu ini, mengidentifikasi penyebab di balik praktik politik dinasti, memberikan penilaian moral terhadapnya, serta apakah media tersebut menawarkan solusi atau langkah-langkah tertentu untuk menangani masalah tersebut. Melalui penerapan teori ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana framing yang digunakan oleh Tempo membentuk pandangan masyarakat terhadap praktik politik dinasti dalam pemerintahan Indonesia, dan bagaimana pemberitaan tersebut dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Dengan demikian, pemahaman mengenai penerapan teori framing ini akan memperkaya wawasan kita tentang peran media dalam membentuk opini publik mengenai isu-isu politik yang kontroversial.

2.2 Media Massa

Media massa memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk konstruksi realitas sosial dan politik di era kontemporer. Sebagai sarana komunikasi yang mampu menjangkau audiens dalam jumlah besar, media massa tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk membentuk opini dan pandangan masyarakat. Definisi ini menyoroti karakteristik media massa yang mampu menyampaikan pesan kepada audiens yang sangat beragam, mencakup berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Ritzer & Stepnisky (2022) juga menggambarkan media massa sebagai "industri budaya yang memproduksi dan mendistribusikan produk budaya kepada sejumlah besar orang" (Ritzer & Stepnisky, 2022). Dengan demikian, media massa tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membentuk pemahaman sosial dengan mendistribusikan budaya yang dapat mempengaruhi cara pandang publik terhadap isu-isu sosial dan politik, termasuk fenomena politik dinasti.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan teori ini akan membantu mengungkap bagaimana media massa, khususnya Tempo.co, tidak hanya menyampaikan fakta terkait politik dinasti Jokowi, tetapi juga bagaimana media tersebut secara aktif membingkai isu ini untuk mempengaruhi opini publik. Melalui framing yang digunakan dalam pemberitaannya, Tempo.co membentuk narasi tertentu yang dapat mempengaruhi pandangan pembaca mengenai dinamika politik dinasti, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana media berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik yang sensitif dan kontroversial.

2.3 Berita

Berita dalam konteks media kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai cerminan objektif dari realitas, melainkan sebagai produk konstruksi yang dibentuk melalui seleksi dan praktik jurnalistik yang dipengaruhi oleh kebijakan redaksi dan nilai-nilai berita (Bennett, 2016). Berita dipahami sebagai "narasi terpilih tentang peristiwa yang disajikan kepada publik oleh organisasi media" (Bennett, 2016). Van Aelst et al. (2021) juga menekankan bahwa berita adalah "representasi realitas yang difilter dan dibingkai melalui lensa perspektif jurnalis dan organisasi media" (Van Aelst et al., 2021). Artinya, pemberitaan lebih dari sekadar laporan fakta; ia adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang ada dalam media. Dalam konteks pemberitaan tentang dinasti politik Jokowi oleh Tempo.co, pemberitaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh peristiwa itu sendiri, tetapi juga oleh keputusan editorial, serta perspektif ideologis yang dipegang oleh media tersebut.

Penerapan pemahaman ini dalam penelitian ini akan membahas bagaimana Tempo.co, melalui teknik framing, membentuk narasi tertentu mengenai dinasti politik Jokowi. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana Tempo memilih aspek-aspek tertentu dari peristiwa ini untuk dipublikasikan dan disajikan kepada publik, serta bagaimana narasi yang dibentuk ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap fenomena politik dinasti yang melibatkan keluarga Jokowi.

2.4 Politik Media

Framing politik media merupakan alat yang penting dalam memahami bagaimana media membentuk dan menyebarkan interpretasi terhadap isu-isu politik. Strömbäck & Van Aelst (2023) menyatakan bahwa framing politik media adalah "proses strategis di mana aktor politik dan media bersaing untuk membangun dan menyebarkan interpretasi atau 'bingkai' tertentu dari isu-isu politik kepada publik" (Strömbäck & Van Aelst, 2023). Dalam framing politik media, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menyoroti dimensi ideologis atau dampak kebijakan yang dapat memengaruhi cara publik mengevaluasi isu tersebut (Druckman, 2020). Media berperan penting dalam mempengaruhi opini publik dengan menyoroti aspek-aspek tertentu dari isu, yang dapat membangkitkan nilai-nilai dan keyakinan audiens terhadapnya.

Dalam penelitian ini, teori framing politik media akan digunakan untuk menganalisis bagaimana Tempo.co membingkai isu politik dinasti Jokowi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Tempo memilih

dan menonjolkan elemen-elemen tertentu dari isu ini, baik yang lebih menekankan pada dampak negatif seperti nepotisme dan potensi korupsi, atau aspek-aspek lainnya yang lebih mengarah pada dampak positif bagi keluarga Jokowi. Melalui pemahaman ini, penelitian ini akan menggali bagaimana narasi yang dibangun oleh Tempo membentuk opini publik terkait fenomena politik dinasti dalam konteks pemerintahan Joko Widodo.

2.5 Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah interaksi dinamis antara aktor politik, media massa, dan publik yang bertujuan untuk memengaruhi opini dan tindakan politik masyarakat. McNair (2020) mendefinisikan komunikasi politik sebagai "proses di mana informasi dan persuasi disebar dan dipertukarkan antara aktor politik, media, dan publik" (McNair, 2020). Dalam komunikasi politik, media massa berfungsi sebagai perantara yang tidak hanya menyampaikan pesan politik kepada publik, tetapi juga membentuk cara masyarakat menginterpretasikan isu-isu politik yang sedang berkembang. Strömbäck (2021) menekankan bahwa logika media, yang berfokus pada nilai berita, dramatisasi, dan personalisasi, berinteraksi dengan cara aktor politik menyampaikan pesan-pesan mereka (Strömbäck, 2021).

Dalam konteks pemberitaan tentang dinasti politik Jokowi oleh Tempo.co, teori komunikasi politik ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana Tempo memilih dan membingkai isu ini. Pemilihan kata, narasumber, dan sudut pandang yang digunakan dalam pemberitaan Tempo akan memengaruhi cara publik menilai isu politik dinasti tersebut. Melalui framing yang digunakan dalam pemberitaan, Tempo akan membentuk persepsi masyarakat terkait praktik politik dinasti yang melibatkan keluarga Jokowi, serta mempengaruhi pandangan publik mengenai dinamika kekuasaan yang ada.

2.6 Dinasti Politik

Fenomena dinasti politik merujuk pada pewarisan kekuasaan politik yang berlangsung dalam satu keluarga atau kelompok yang mendominasi posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, dinasti politik menggambarkan sebuah sistem di mana individu-individu yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat sering kali menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, baik di level lokal maupun nasional. Winters (2020) menggambarkan dinasti politik sebagai "pola di mana posisi politik signifikan diisi oleh individu-individu yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat" (Winters, 2020). Fenomena ini sering kali dipandang kontroversial karena dapat menimbulkan berbagai permasalahan terkait prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti meritokrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan. Salah satu kekhawatiran utama dari adanya dinasti politik adalah potensi pengurangan kesempatan bagi individu-individu di luar lingkaran keluarga politik untuk mendapatkan posisi-posisi penting dalam pemerintahan, yang seharusnya didasarkan pada kemampuan dan pencapaian, bukan hubungan darah. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, dinasti politik dapat memunculkan pertanyaan besar mengenai kesetaraan kesempatan dalam berpolitik. Ketika posisi-posisi strategis diisi oleh anggota keluarga yang sudah memiliki akses politik, ini dapat mempengaruhi integritas sistem politik dan mengurangi peluang bagi individu lainnya yang tidak memiliki koneksi politik yang kuat. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan, memperburuk kesenjangan sosial, dan mengarah pada terbentuknya oligarki politik yang membatasi perkembangan demokrasi yang sehat dan inklusif.

Penerapan teori dinasti politik dalam penelitian ini akan menggali bagaimana Tempo.co membingkai isu politik dinasti yang melibatkan keluarga Jokowi. Dalam pemberitaannya, Tempo tidak hanya melaporkan fakta-fakta terkait keterlibatan keluarga Presiden dalam politik, tetapi juga memilih cara untuk menyajikan isu ini dengan perspektif tertentu yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pemberitaan Tempo membentuk opini publik mengenai dampak fenomena dinasti politik terhadap tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana pemberitaan Tempo membahas implikasi dari politik dinasti terhadap kualitas pemerintahan, transparansi, serta keadilan dalam distribusi kekuasaan di Indonesia. Dengan demikian, teori dinasti politik ini akan membantu memahami bagaimana media, melalui framing yang digunakan dalam pemberitaan, berperan dalam membentuk persepsi publik mengenai potensi bahaya dan tantangan yang ditimbulkan oleh keberadaan dinasti politik dalam sistem pemerintahan Indonesia.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis merasa perlu dalam menggunakan referensi agar penelitian memiliki acuan yang lebih terarah. Oleh karenanya penelitian terdahulu dalam pembahasan ini sebagai pedoman untuk mencari pembaharuan, serta urgensi dalam penelitian ini. Berikut rangkuman penelitian terdahulu yang serupa.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Jurnal Nasional

Nama Penulis & Tahun	Tanzil Wahyu Ramadhan, Ike Desi Florina, Didi Permadi	Putra Perwira Guna Lubis, Leylia Khairani	Lilis Lisda Suryani, Hendra Setiawan	Nurul Hopipah, Hendra Setiawan	Dewi Nurmala, Hendra Setiawan
Judul	Analisis Framing Pemberitaan Peretasan Pusat Data Nasional (PDN) di Media Online Tempo.co	Analisis Framing Berita Berjudul “Presiden Jakarta Selatan” di Majalah Tempo Edisi 22-28 April 2019	Analisis Framing Berita Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Pada Media Online Suara.Com Dan Tribun News	Analisis Framing Pemberitaan Jabar Siaga Satu Rawan Bencana Alam pada Media Online Detik.com dan Kompas.com	Analisis Framing Pemberitaan Membuka Kemasan Ilegal Motor Ducati pada Media Dalam Jaringan CNNIndonesia.com dan Detiksport.com
Link Sumber	https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1491	https://doi.org/10.53695/js.v1i2.80	https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3476	https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3478	https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3291
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif

ian					
Hasil Penelitian	Pusat Data Nasional Merupakan tempat untuk menyimpan sebagian besar data masyarakat Indonesia, sebagai instalasi yang penting Pusat Data Nasional atau PDN harus dijaga dengan sebaik baiknya agar tidak terjadi peretasan yang membuat kebocoran data. Namun pada 20 Juni 2024 hal ini tidak dilakukan dengan baik yang membuat PDN di	Tempo telah berhasil menyajikan sajian berita yang ter-framingdengan sempurna tanpa ada kesan memaksa pembaca menerimanya tanpa ada latar belakang yang tidak logis. Sajian berita yang menggunakan narasi bercerita yang merujuk pada suasana hasil observasi penulisnya, membuat berita	Penelitian ini berdasarkan kepada kasus pelecehan yang terjadi dalam ruang lingkup Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah ditempa oleh MS (nama samaran) yang dinilai sebagai kasus pelecehan seksual yang membuat mentalnya sangat tidak baik hingga dalam waktu yang sangat lama serta memiliki rasa traumatis yang sangat mendalam. Analisis framing yang digunakan dalam	Penelitian ini menganalisis bagaimana media online detik.com dan regional.kompas.com menyajikan berita tentang daerah-daerah di Jawa Barat yang rawan bencana. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing untuk melihat bagaimana cara penyajian berita tersebut membentuk persepsi pembaca. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua media ini umumnya	Penelitian yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Membuka Kemasan Ilegal Motor Ducati pada Media Dalam Jaringan CNNIndonesia.com dan Detiksprot.com” bertujuan untuk melihat dan mengamati bagaimana pemberitaan mengenai membuka kemasan ilegal atau biasa disebut <i>unboxing</i> sebuah peti berisi motor Ducati yang akan digunakan pada ajang

	retas sehingga data di dalamnya terkunci dan peretas meminta tebusan untuk membuka data tersebut. Pemberitaan mengenai peretasan PDN menjadi topik hangat di media massa, mengingat pentingnya data di dalam PDN. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konstruksi framing berita di media massa Tempo.co terkait dengan	berjudul Presiden Jakarta Selatan yang terbit di Majalah tempo edisi 22-28 April 2019, mudah dicerna dan diterima. Kutipan-kutipan wawancara juga menguatkan posisi framing berita dalam menilai sebuah isu atau kejadian. Sajian berita berjudul “Presiden Jakarta Selatan” ini menarik, karena di satu sisi telah ada hasil	penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembedaan yang dilakukan oleh media online Suara.com dan Tribun News dalam memberikan pemberitaan kasus pelecehan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang terlibat kedalam pelaku pelecehan seksual terhadap MS selaku karyawan dalam kantor Komisi Penyiaran Indonesia tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif	menyajikan informasi secara faktual, namun cara penyajian berita, seperti pemilihan kata, struktur kalimat, dan tema yang diangkat, dapat mempengaruhi pemahaman pembaca terhadap isu bencana ini. Dengan kata lain, media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terkait bencana alam.	World Superbike (WSBK) Mandalika dibingkai oleh dua media dalam jaringan yakni CNNIndonesia.com dan Detiksport.com yang dipublikasi pada bulan November 2021 diselidiki dari struktur sintaksis, tematik, skrip, dan retorik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori analisis framing oleh Zhongdang Pan dan Kosicki. Temuan dan hasil dari penelitian ini yaitu
--	---	--	--	---	---

	peretasan PDN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep framing Robert N. Entman dengan jenis penelitian Kualitatif. Hasil dan Kesimpulan dari analisis adalah Tempo.co memframing pemberitaan dengan stigma yang tergolong netral meskipun terdapat framing yang berstigma negatif namun Tempo juga memberikan saran dalam	sementara hitung cepat Pilpres 2019 dengan keunggulan sementara pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, namun Prabowo sebagai calon presiden nomor urut 02 tidak menerimanya, bahkan mendeklarasikan dan membuat syukuran di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dengan	deskriptif dengan menggunakan analisis framing menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.		terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara dua media dalam jaringan CNNIndonesia.com dan Detiksport.com dalam membingkai berita mengenai insiden membuka kemasan ilegal motor Ducati.
--	--	---	--	--	---

	penyelesaian masalah, hal ini merupakan cerminan dari stigma positif dalam pemberitaan yang dibawakan.	pernyataan bahwa Pasangan Prabowo-Sandiaga memenangkan kontestasi Pilpres 2019 dan terpilih sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Menggunakan perangkat analisa Robert Entman, maka bisa disimpulkan bahwa Majalah Tempo menyajikan pendefenisian masalah bahwa			
--	---	--	--	--	--

		Prabowo merupakan aktor yang menjadi sumber masalah karena merasa unggul dalam Pemilihan Presiden 2019. Majalah Tempo juga menyajikan nilai moral dan solusi di mana kubu Prabowo mesti menerima hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang dilakukan secara ilmiah.			
Keterbatasan dan	Penelitian yang sedang dijalankan oleh penulis lebih	Perbedaan diantara penelitian yang	Penelitian yang sedang saya lakukan menggunakan	Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan meskipun	Penelitian yang sedang saya lakukan menggunakan

Perbedaan Penelitian	mendalami tentang bagaimana media membingkai isu dinasti politik Jokowi, menyelidiki Analisis Framing dalam pemberitaan dinasti politik Jokowi, serta dampaknya terhadap persepsi publik terhadap keluarga Jokowi. Sementara itu, penelitian kedua berfokus pada peristiwa peretasan PDN, menganalisis bagaimana media membingkai isu keamanan siber ini	diambil “Analisis Framing Berita Berjudul “Presiden Jakarta Selatan” di Majalah Tempo Edisi 22-28 April 2019” dengan penelitian saya yang berjudul “Analisis framing pemberitaan dinasti politik Jokowi di tempo edisi 18 februari-28 juli 2024” terdapat pada judul berita yang disajikan oleh Tempo, serta tenggat pemberitaan yang	analisis framing Robert Entman, sedangkan penelitian ini menggunakan teori analisis framing menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.	sama-sama menggunakan analisis framing, memiliki fokus yang berbeda. Penelitian yang sedang dilakukan menyelidiki bagaimana media membingkai isu politik yang bersifat subjektif, seperti dinasti politik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti afiliasi politik media dan kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada isu	analisis framing Robert Entman, sedangkan penelitian ini menggunakan teori analisis framing menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.
-----------------------------	---	--	---	---	---

	dalam konteks yang lebih luas, seperti dampaknya terhadap keamanan data masyarakat dan respons pemerintah.	dikeluarkan oleh Tempo, dan terakhir adalah penelitian ini mengambil dari majalah sedangkan penelitian yang sedang saya lakukan mengambil dari website pemberitaan Tempo.	sosial yang lebih objektif, seperti bencana alam, dan menganalisis bagaimana media membingkai isu ini dalam konteks keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan ini menciptakan <i>research gap</i> yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, seperti perbandingan intensitas framing antara kedua isu, dampak jangka panjang dari framing, dan peran media sosial dalam	
--	---	--	---	--

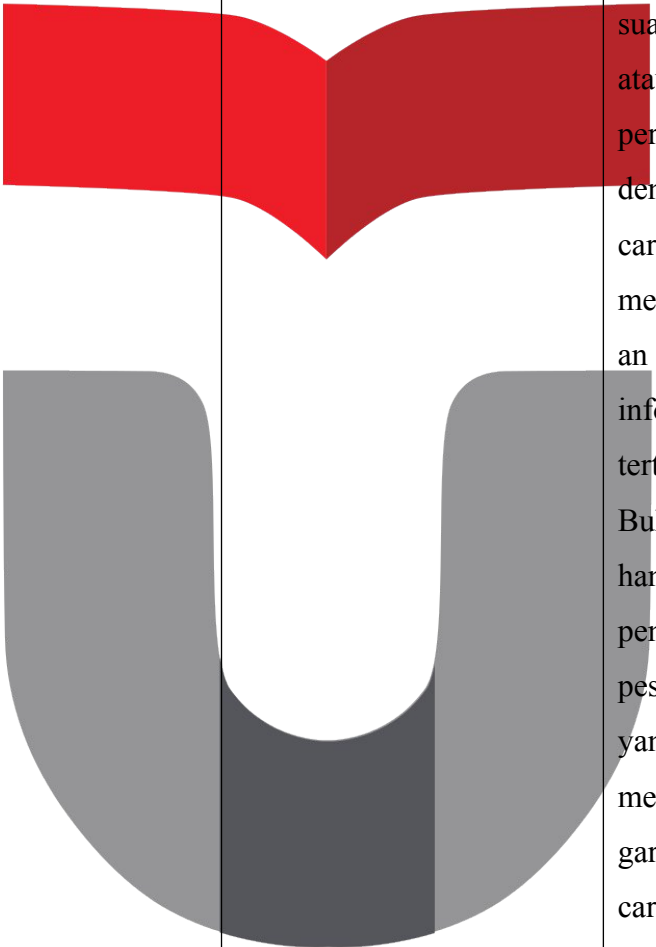
				memperkuat atau mengubah framing yang ada.	
--	--	--	--	--	--

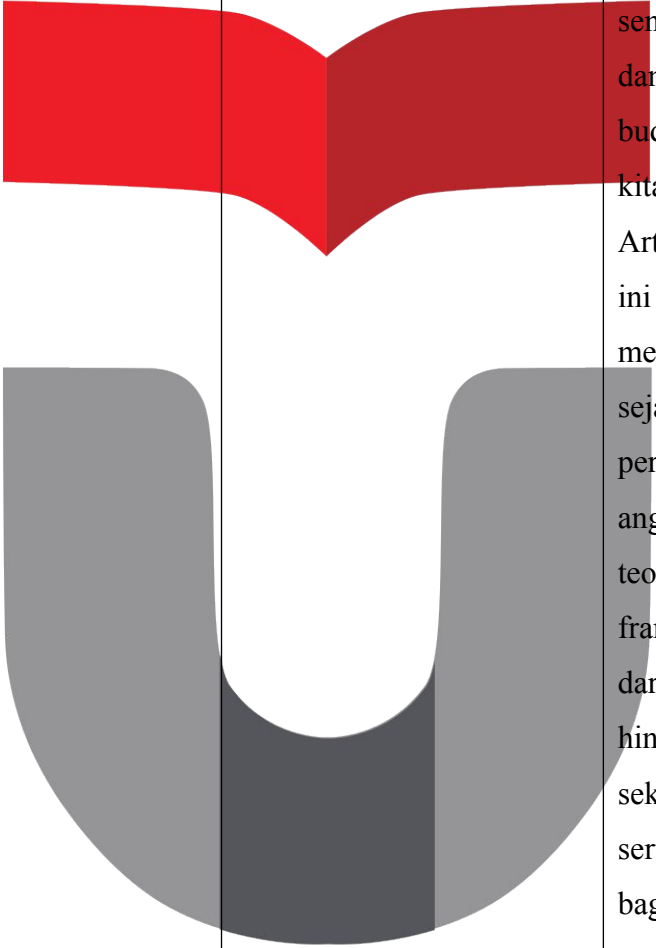
Sumber Olahan Data Peneliti (2025)

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Jurnal Internasional

Nama Penulis & Tahun	Launa Launa	Agus Suprayitno, M Erza Aminanto, Lin Yola	Aondover Eric Msughter, Sabiu Garba, Aisha Bala Rabiu	<u>Ardèvol- Abreu, A.</u>	Anung Anindita, Hari Bakti Mardikantoro, Bernadus Wahyudi Joko Santoso
Judul	Robert Entman Framing Analysis of Prabowo Subianto's Image in Republika.co.id March – April 2019 Edition	Framing Analysis of Reporting on Increases in Fuel Oil Prices (BBM) in Electronic Media	Framing Theory Perspective of Identity and Narratives of Conflict in Nigerian Media	Framing theory in communi cation research. Origins, develop ment and current situation in Spain.	The Images and The Struggle of The 2018 Central-Java Local Government Elcetion Reporting Meaning in Online Media

Link Sumber	10.17933/diakom.v3i1.57	https://doi.org/10.37010/fcs.v3i2.969	http://doi.org/10.54105/ijmcj.D1039.121221	10.4185/RLCS-2015-1053	https://doi.org/10.15294/seloka.v9i2.39062
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	ROL berhasil membangun citra positif Anies Baswedan sebagai sosok pemimpin yang cerdas, berintegritas, dan peduli rakyat. Hal ini dilakukan dengan menyoroti visi ekonomi	Penelitian ini menganalisis framing berita kenaikan BBM di Kompas.com dan Tempo.co. Kompas.com bernada positif, sedangkan Tempo.co bernada negatif. Media massa disarankan untuk selalu objektif dan mendidik publik.	Penelitian ini membahas peran media dalam konflik di Nigeria. Konflik seringkali dipicu oleh perbedaan identitas agama dan etnis. Media dapat memperburuk atau meredakan konflik melalui framing berita. Penelitian ini menganalisis bagaimana media menggunakan framing untuk membentuk persepsi publik tentang konflik, termasuk identitas	Teori framing sudah berkembang pesat sejak tahun 1960-an. Teori ini menjelaskan bagaimana media membentuk	Penelitian ini menganalisis pemberitaan tentang Pilgub Jateng 2018 di tiga media online. Hasilnya menunjukkan bahwa media menggunakan strategi penghapusan informasi, seperti menggabungkan nama kandidat atau menonjolkan kandidat tertentu.

	kerakyatan Anies yang sejalan dengan ideologi ROL, serta rekam jejaknya yang kuat dalam melayani masyarakat. Selain itu, dukungan dari partai-partai Islam dan nasionalis semakin memperkuat citra positif tersebut. ROL, dengan ideologinya yang moderat, telah berhasil		kelompok yang terlibat dan narasi yang digunakan.	persepsi kita tentang suatu isu atau peristiwa dengan cara menyajikan informasi tertentu. Bukan hanya pengirim pesan yang memengaruhi cara kita berpikir, tapi juga	
--	--	---	--	--	--

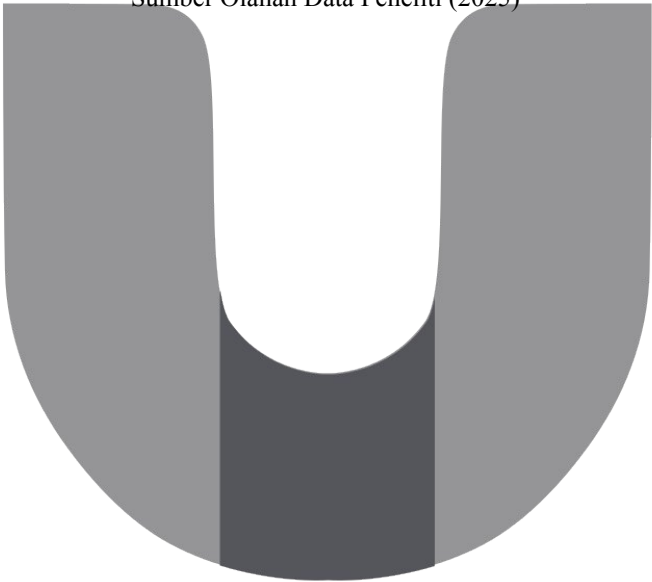
	memposisikan Anies sebagai sosok yang dekat dengan umat Islam dan ulama. Untuk penelitian lebih lanjut, pendekatan kritis dapat digunakan untuk mengungkap motif, latar belakang historis, dan ideologi yang mendasari konstruksi citra positif ini dalam pemberitaan		penerima pesan, pesan itu sendiri, dan budaya kita. Artikel ini mengulas sejarah perkembangan teori framing dari dulu hingga sekarang, serta bagaimana a teori ini diterapka	
--	--	---	---	--

	media.			n dalam penelitia n di Spanyol.	
Keterba tasan dan Perbeda an Peneliti an	Penelitian yang sedang dilakukan menggunakan Tempo sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan Republika.co.id sebagai objek medianya, dan dalam perbedaan subjek penelitian yang sedang	Perbedaan yang terdapat diantara penelitian ini dan penelitian yang sedang dijalankan, penelitian ini menggunakan 2 objek yaitu Kompas.com dan Tempo.co, sedangkan penelitian yang sedang dijalankan terfokus pada satu objek yaitu Tempo.co	Penelitian yang sedang saya lakukan menggunakan analisis framing Robert Entman, sedangkan penelitian ini menggunakan teori analisis framing menurut Goffman (1974)	Pada penelitian ini membahas tentang teori framing secara garis besar dengan situasi Spanyol tahun 2015, yang mana masih	Penelitian ini menggunakan 3 objek media online, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan hanya terfokus pada 1 objek yaitu Tempo.co. Dan juga penelitian ini berjalan dengan fokus pemberitaan pada tahun 2018 sedangkan penelitian yang sedang dilakukan memiliki fokus waktu pada tanggal 18 Februari – 28 Juli 2024.

	dilakukan mengambil Jokowi sebagai subjek sedangkan penelitian ini mengambil subjek Prabowo.		terlalu makro dalam penelitiannya, penelitian yang sedang dijalankan lebih terfokus dan lebih mikro dalam membahas analisis framing terkait dinasti politik Jokowi pada	
--	---	---	--	--

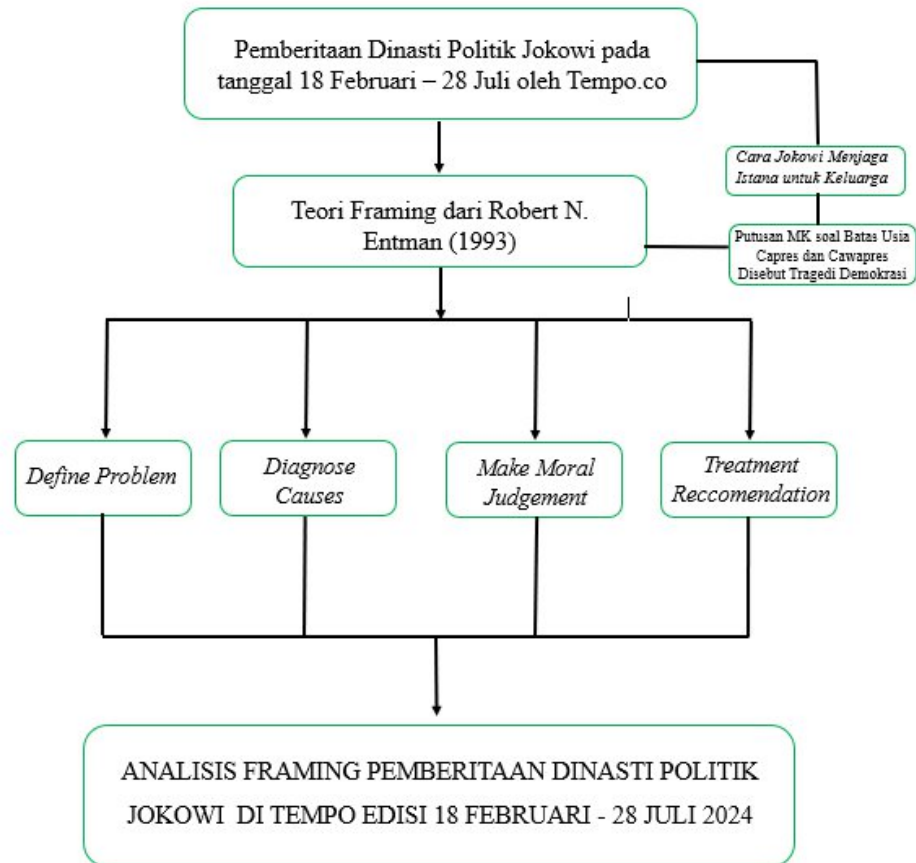
				pemberit aan Tempo tanggal 18 Februari – 28 Juli 2024.	
--	--	--	--	---	--

Sumber Olahan Data Peneliti (2025)



2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis framing pemberitaan tentang dinasti politik Jokowi di media Tempo.co. Media memiliki peran penting dalam menghasilkan berita yang membentuk pandangan pembaca, sehingga perlu diketahui bagaimana framing dilakukan oleh sebuah media. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan Tempo.co mengenai dinasti politik Jokowi dengan menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman. Metode ini membantu menjelaskan bagaimana suatu peristiwa dirumuskan dalam berita agar dapat diterima oleh audiens secara luas.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber Olahan Data Peneliti

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis sebagai pendekatan utama dalam menganalisis framing pemberitaan mengenai dinasti politik Jokowi di Tempo.co. Paradigma kritis menekankan bahwa realitas sosial tidak terbentuk secara alami atau netral, melainkan merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, ideologi, dan hegemoni dalam masyarakat. Paradigma ini berpandangan bahwa berbagai isu sosial dan politik tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang berkuasa. Melalui dominasi ideologi, kelompok tertentu dapat mempertahankan atau menggugat kekuasaan yang ada dengan mengarahkan cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. dikutip dari (Eriyanto, 2001: 29-31) dalam (Wahid et al., 2020) "Paradigma kritis, memahami realitas bukan dibentuk oleh alam (nature), bukan alami, tetapi dibentuk oleh manusia. Ini tidak berarti setiap orang membentuk realitasnya sendiri-sendiri, tetapi orang yang berada dalam kelompok dominanlah yang menciptakan realitas, dengan memanipulasi, mengkondisikan orang lain agar mempunyai penafsiran dan pemaknaan seperti yang mereka inginkan." Oleh karena itu, paradigma kritis berupaya membongkar bagaimana kekuasaan bekerja dalam membentuk cara pandang, persepsi, dan penafsiran terhadap realitas sosial.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemilihan kata, penekanan isu, serta representasi tokoh-tokoh politik dalam pemberitaan Tempo membentuk pemahaman publik mengenai fenomena politik dinasti. Dengan demikian, pendekatan kritis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap struktur ideologis yang bekerja di balik teks media dan memberikan kesadaran kritis kepada masyarakat tentang bagaimana media membentuk informasi yang diterima publik dan bagaimana hal tersebut digunakan untuk mendukung atau menantang struktur kekuasaan yang ada.

3.2 Metode Penelitian

Metode kualitatif, menurut (Flick, 2018), adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks aslinya dengan fokus pada interpretasi makna, sudut pandang, dan proses yang mendasarinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki isu secara mendalam, bukan hanya sekadar mengamati fenomena secara deskriptif, tetapi juga untuk menggali konstruksi naratif yang terbentuk dalam pemberitaan media.

Metode kualitatif sangat relevan mengingat tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi dan memahami secara komprehensif bagaimana Tempo.co membongkai isu dinasti politik Jokowi. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemahaman mendalam mengenai teks dan konteksnya, ketimbang hanya mengukur frekuensi atau variabel dalam pemberitaan. Dengan metode ini, peneliti dapat menganalisis teks dengan lebih holistik, mendalami nuansa bahasa yang digunakan dalam artikel-artikel tersebut, dan mengidentifikasi pola framing yang kompleks serta bervariasi yang ada di dalamnya. Hal ini memberikan kebebasan bagi peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dan memetakan bagaimana pemberitaan media membentuk opini publik.

Sebagai bagian dari pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis framing untuk memahami bagaimana Tempo.co mengkonstruksi narasi tertentu mengenai dinasti politik Jokowi. Framing di sini tidak hanya dilihat sebagai teknik jurnalistik semata, tetapi sebagai sebuah praktik diskursif yang dapat mencerminkan ideologi dan kepentingan tertentu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali berbagai elemen dalam pemberitaan seperti pilihan kata, representasi tokoh, penekanan isu, dan sudut pandang yang diambil oleh media, untuk memahami bagaimana media membentuk dan mengarahkan opini publik terhadap fenomena politik dinasti tersebut. Dengan demikian, metode kualitatif ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana narasi dan framing dalam pemberitaan berperan dalam membentuk persepsi publik mengenai isu-isu politik yang kontroversial.

3.3 Subjek dan Objek

3.3.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, *Tempo.co* menjadi subjek utama yang dianalisis sebagai representasi media massa yang membentuk konstruksi realitas politik melalui pemberitaannya. Penelitian ini menempatkan *Tempo.co* bukan sekadar sebagai penyaji informasi, tetapi sebagai aktor media yang aktif dalam membongkai isu dinasti politik Jokowi melalui pemilihan sudut pandang, narasi, dan simbol-simbol tertentu. Melalui pendekatan analisis framing Robert N. Entman, penelitian ini mengkaji bagaimana

Tempo.co sebagai institusi media menyusun realitas politik, membentuk opini publik, serta memperkuat atau menggugat legitimasi kekuasaan melalui pemberitaan. Dengan menelusuri cara *Tempo.co* mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, dan menyarankan solusi terkait praktik politik dinasti, penelitian ini berupaya mengungkap peran strategis media dalam mengarahkan persepsi masyarakat terhadap dinamika kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia.

3.3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus utama objek yang diteliti adalah pemberitaan *Tempo.co* terkait Dinasti Politik Jokowi dalam edisi terbitan 16 Oktober 2023 dan 28 Juli 2024. Objek penelitian ini merupakan bagian dari studi mengenai bagaimana media massa, dalam hal ini *Tempo.co*, membingkai isu politik dinasti yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Secara khusus, pemberitaan tersebut akan dianalisis untuk menggali bagaimana media membentuk persepsi publik melalui framing terhadap fenomena politik tersebut.

3.4 Unit Analisis Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memerlukan unit analisis yang jelas agar proses analisis dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Unit analisis ini memuat elemen-elemen penting yang relevan dan dapat dijadikan acuan selama proses penelitian berlangsung, khususnya dalam menerapkan model analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman.

Tabel 3.1 Tabel Unit Analisis, Analisis Framing

Unit Analisis	Sub-Unit Analisis	Indikator
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DINASTI POLITIK JOKOWI DI TEMPO.CO	Define Problem	- Isu pokok yang diangkat dalam berita - Penekanan pada konflik, dampak terhadap demokrasi, atau kepentingan publik
	Diagnose Causes	- Siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab munculnya dinasti politik - Penyebutan aktor politik, partai, atau sistem pemilu sebagai latar penyebab
	Moral Judgement	- Sikap redaksi terhadap isu : apakah menyudutkan, mendukung, atau netral - Bahasa atau diksi yang mengandung nilai moral, etika, atau kritik sosial
	Treatment Recommendation	- Solusi atau tindakan yang ditawarkan atau disarankan secara eksplisit atau implisit dalam teks - Ajakan perubahan, reformasi sistem, atau kritik terhadap pembiaran

Sumber: Olahan Data Peneliti (2025)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui analisis teks media. Seperti yang dijelaskan oleh (Krippendorff, 2020), analisis teks media merupakan "metode penelitian yang digunakan untuk membuat inferensi yang valid dan dapat direplikasi dari teks (atau makna lain yang bermakna) ke konteks penggunaannya." Dalam pendekatan kualitatif, analisis teks tidak hanya fokus pada konten yang tampak secara eksplisit (apa yang tertulis), tetapi juga pada konten laten, yaitu makna atau interpretasi yang mendasari teks tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat secara sistematis mengidentifikasi dan memahami framing yang digunakan oleh Tempo.co dalam menyajikan isu dinasti politik Jokowi.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini turut memanfaatkan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan tahap krusial dalam penelitian kebahasaan yang bertujuan untuk menelusuri sejauh mana perkembangan ilmu terkait telah berlangsung, serta menilai hasil-hasil penelitian sebelumnya. Melalui kajian ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dan komprehensif mengenai topik yang dikaji, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objekbahasa yang diteliti. Selain itu, studi kepustakaan juga membantu peneliti mengenali celah-celah penelitian terdahulu dan merumuskan kontribusi baru atau sudut pandang alternatif dalam ranah keilmuan tersebut. (Sholihah, 2020).

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis framing dengan mengacu pada model framing Robert N. Entman. Model ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana media menyusun realitas melalui proses pemilihan, penonjolan, dan pengemasan informasi dalam pemberitaan. Entman menyatakan bahwa framing merupakan proses seleksi beberapa aspek realitas yang ditonjolkan dalam teks untuk mendefinisikan masalah (*Define Problem*), Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*), Membuat Penilaian Moral (*Moral Judgement*), dan Menyarankan Solusi (*Treatment Recommendation*) terhadap isu yang diangkat.

Dengan menggunakan model analisis ini, peneliti dapat mengungkap tidak hanya bagaimana isu dinasti politik diberitakan, tetapi juga bagaimana media seperti *Tempo* memengaruhi pemahaman dan opini publik melalui konstruksi naratif dan ideologisnya.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan Triangulasi Teknik, yaitu kombinasi berbagai metode pengumpulan data untuk meningkatkan validitas hasil. Analisis data dilakukan secara induktif, yang berarti peneliti mengembangkan pola dan tema dari data yang dikumpulkan. Dengan menyelidiki fenomena dalam konteksnya yang sebenarnya (Anggito & Setiawan, 2018). Teknik ini dirasa cocok dengan analisis framing yang dilakukan dalam penelitian dengan keterkaitannya dalam pemberitaan Tempo.co mengenai dinasti politik Jokowi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Berita

Dalam terlaksananya penelitian ini, peneliti memilih untuk menganalisis 2 berita yang diterbitkan oleh Tempo sebagai objek penelitian utama. Kedua berita ini dipilih sebab keterkaitannya dengan isu Dinasti Politik Jokowi, khususnya yang menyoroti pada kritik terhadap Jokowi. Pemilihan berita dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan signifikansi naratif, bobot argumentatif, serta cakupan representasi Tempo dalam membingkai pemberitaan mengenai Dinasti Politik Jokowi. Ketiga berita tersebut kemudian dianalisis secara menyeluruh menggunakan pendekatan analisis framing model Entman yang mencakup empat struktur utama: *Define Problem*, *Diagnose Causes*, *Make Moral Judgement*, *Treatment Recommendation*. Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk mengurai makna tersembunyi di balik teks, serta menelaah bagaimana konstruksi wacana terbentuk dalam konteks sosial-politik yang mengitarinya.

Pemilihan berita dalam edisi Tempo yang dianalisis tidak hanya mencerminkan variasi dalam format penyajian informasi (baik dalam bentuk teks berita maupun infografik), tetapi juga memperlihatkan dimensi wacana yang saling melengkapi, mulai dari representasi kritik publik terhadap praktik dinasti politik, tanggapan dari aktor-aktor politik terkait, hingga bagaimana media menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul dalam narasi kekuasaan Presiden Joko Widodo. Melalui analisis yang mendalam terhadap pemberitaan tempo.co edisi 16 Oktober 2023 dan 28 Juli

2024, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Tempo membingkai relasi antara kekuasaan, warisan politik keluarga, serta oposisi publik dalam lanskap media arus utama.

Tabel 4.1 Judul dan Keterangan Berita

NO	JUDUL BERITA	LINK BERITA	TANNGGAL BERITA
1	Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi	https://www.tempo.co/politik/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-dan-cawapres-disebut-tragedi-demokrasi--131976	16 Oktober 2023
2	Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga	https://www.tempo.co/arsip/dinasti-politik-jokowi-24603	28 Juli 2024

4.2 Hasil

4.2.1 Define Problem

Topik mengenai dinasti politik yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan keluarganya menjadi pusat perhatian dalam pemberitaan Tempo.co 16 Oktober 2023 dan 28 Juli 2024. Dalam kerangka analisis framing oleh Robert N. Entman, tahapan *define problem* menjadi dasar awal untuk memahami cara media mengkonstruksi sebuah peristiwa sebagai isu publik. Tempo secara terang-terangan membingkai keterlibatan keluarga Jokowi dalam berbagai posisi politik strategis sebagai potensi ancaman bagi sistem demokrasi. Permasalahan yang disoroti tidak semata terletak pada keberadaan anggota keluarga dalam ranah politik, tetapi juga pada dugaan kuatnya peran kekuasaan eksekutif dalam melapangkan jalan politik bagi sanak keluarga Presiden. Tempo menampilkan narasi bahwa relasi kekuasaan tidak lagi bersifat kelembagaan semata, melainkan telah dipersonalisasi dalam lingkup keluarga presiden. Dalam laporan berjudul "*Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga*", tergambar bahwa permasalahan yang dikonstruksi tidak terbatas pada persaingan politik, melainkan pada strategi sistematis dalam mengkonsolidasikan kekuasaan. Tempo menuliskan bahwa "Jokowi pun berupaya agar perpanjangan masa jabatan melalui penundaan pemilihan umum bisa bergulir," yang mengindikasikan bahwa manuver kekuasaan telah menabrak batas etika demokrasi. Istilah "karpet merah" yang muncul dalam laporan tersebut turut mempertegas kerangka persoalan bahwa kekuasaan tidak lagi dianggap sebagai bentuk pengabdian, melainkan diwariskan secara personal.

Tempo tidak membatasi definisi masalah pada aspek individual, melainkan memperluasnya ke level sistemik yang lebih mendalam. Dalam narasinya, Tempo menunjukkan bahwa langkah-langkah politik Presiden Jokowi bukan sekadar tindakan sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempertahankan kekuasaan dalam lingkup keluarganya. Salah satu ilustrasi yang diberikan adalah permintaan Jokowi kepada Andi Widjajanto untuk menyusun kajian mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatan, yang memperlihatkan bahwa isu yang diangkat bukan hanya terkait kehendak pribadi, tetapi telah bergerak ke arah institusionalisasi dinasti politik. Tempo juga menggarisbawahi bahwa kekuasaan telah digunakan secara aktif untuk membuka jalur politik bagi Gibran dan anggota keluarga lainnya. Hal ini tampak dalam kutipan berita: "Lima bulan sebelum pemilihan wali kota berlangsung, atau pada Juli 2020, Jokowi mengundang Purnomo ke Istana... Memberi kode agar Purnomo mundur," yang memperkuat narasi bahwa intervensi langsung dari Presiden berperan dalam mendistorsikan proses demokrasi di tingkat lokal. Persoalan yang diangkat tidak hanya berfokus pada hasil akhir yakni terpilihnya Gibran sebagai Wali Kota Solo melainkan juga pada mekanisme yang mendahuluinya, yang dinilai sarat intervensi kekuasaan. Dengan demikian, inti

permasalahan yang ditekankan Tempo adalah tergerusnya prinsip-prinsip demokrasi akibat menyatunya kepentingan kekuasaan negara dengan relasi kekeluargaan.

Tempo turut menyoroti bagaimana instrumen hukum di Indonesia digunakan untuk melegitimasi praktik politik dinasti, seperti tergambar dalam laporan berjudul *“Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi.”* Dalam konteks ini, definisi masalah yang dibangun oleh media meluas ke wilayah yudisial, memperlihatkan bagaimana lembaga peradilan dapat dijadikan perpanjangan kekuasaan eksekutif. Hal ini tercermin dalam kutipan pernyataan Ujang Komarudin, *“Itu tragedi demokrasi yang tidak bagus, kelihatannya MK kebobolan,”* yang oleh Tempo diartikan sebagai indikasi perubahan fungsi Mahkamah Konstitusi dari lembaga penjaga konstitusi menjadi sarana akomodasi ambisi politik keluarga Presiden. Narasi tersebut diperkuat oleh frasa *“putusan hanya untuk keluarga Jokowi,”* yang menyiratkan bahwa keputusan hukum tidak lagi dijalankan atas dasar prinsip keadilan universal, melainkan diarahkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu. Tempo membingkai bahwa permasalahan muncul ketika kebijakan hukum kehilangan sifat impersonalnya dan mulai dipersonalisasi untuk memenuhi tujuan aktor tertentu. Dalam hal ini, media menggarisbawahi bahwa fenomena tersebut mencerminkan lemahnya sistem checks and balances yang seharusnya menjadi pilar utama dalam tata kelola demokrasi. Dengan demikian, persoalan pokok yang dikemukakan Tempo adalah degradasi integritas institusi negara akibat dominasi kepentingan keluarga penguasa terhadap proses-proses kelembagaan.

Tempo secara terstruktur menyoroti strategi konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo melalui pembangunan jaringan politik berbasis loyalitas personal dan hubungan kekeluargaan. Dalam laporan *“Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga”*, diungkap bahwa *“Presiden meminta Koalisi Indonesia Maju mengumumkan pencalonan Gibran ketika ia bersama Iriana melawat ke Cina dan Arab Saudi pada pertengahan Oktober 2023.”* Pernyataan tersebut menjadi elemen penting dalam membingkai permasalahan bahwa dinamika kekuasaan tidak hanya terjadi di ranah formal seperti lembaga eksekutif atau legislatif, tetapi juga berlangsung di ruang-ruang privat yang memiliki implikasi strategis terhadap kebijakan negara. Dalam konteks ini, Tempo tidak hanya melaporkan kejadian politik, melainkan mengartikulasikan bahwa permasalahan inti terletak pada proses pelanggaran kekuasaan melalui pelemahan batas antara kepentingan publik dan kepentingan keluarga. Narasi yang dibangun memperlihatkan bahwa keputusan politik pada level nasional dapat dipengaruhi oleh motivasi personal, bukan berdasarkan prinsip meritokrasi atau kepentingan bersama. Dengan demikian, problematika yang didefinisikan menjadi semakin kompleks, yakni terkait kaburnya garis pemisah antara ranah privat dan publik dalam proses pengambilan keputusan politik.

Definisi masalah yang dirumuskan oleh Tempo semakin diperkuat ketika pemberitaan mulai menyoroti praktik manipulasi opini publik sebagai sarana untuk membenarkan kebijakan kekuasaan. Dalam salah satu laporannya, Tempo mengutip pernyataan bahwa *“Luhut mengklaim mayoritas penduduk negeri ini menginginkan penundaan Pemilu 2024... namun data itu juga menunjukkan 30 persen pemilih tak menyetujui penundaan pemilu.”* Kutipan ini menjadi dasar pembingkai bahwa data statistik dimanfaatkan secara selektif guna membangun narasi dukungan publik terhadap perpanjangan masa jabatan, meskipun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya resistensi yang signifikan. Tempo menggarisbawahi bahwa tindakan tersebut mencerminkan bentuk rekayasa persepsi kolektif untuk melanggengkan kekuasaan dalam lingkup keluarga Presiden. Dengan demikian, permasalahan yang didefinisikan tidak lagi terbatas pada ranah politik formal, tetapi juga mencakup dimensi etis dari komunikasi politik di mana informasi dikonstruksi secara strategis demi kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, Tempo menekankan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak hanya datang dari kecenderungan otoritarianisme, melainkan juga dari strategi komunikasi yang manipulatif, yang mengarahkan opini publik untuk membenarkan agenda tersembunyi yang menguntungkan elite kekuasaan.

Tempo juga memperluas definisi masalah dalam pemberitaannya dengan menyoroti bagaimana isu keberlanjutan program pemerintah dimanfaatkan sebagai dasar pembenaran untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Dalam salah satu kutipannya, disebutkan bahwa *“Jokowi menyampaikan keresahannya soal proyek strategis nasional yang terancam mangkrak saat masa jabatannya berakhir.”* Pernyataan ini digunakan untuk membingkai bahwa agenda pembangunan dijadikan instrumen legitimasi politik demi mempertahankan kekuasaan. Tempo mengidentifikasi bahwa inti persoalan terletak pada distorsi terhadap isu strategis, yang digunakan untuk melemahkan prinsip sirkulasi kekuasaan secara demokratis. Dengan menjadikan proyek seperti Ibu Kota Nusantara sebagai pembenaran politik, Tempo menyusun definisi masalah bahwa pembangunan tidak lagi semata dilihat sebagai proses kebijakan publik, melainkan telah mengalami politisasi dan difungsikan sebagai alat untuk memperkuat posisi

keluarga penguasa. Dalam kerangka ini, problematika yang diangkat bukan soal urgensi proyek tersebut, melainkan bagaimana proyek dimaknai dan diposisikan sebagai sarana memperoleh legitimasi politik yang menyimpang. Tempo menegaskan bahwa isu yang dikemukakan melampaui sekadar dimensi struktural pemerintahan; lebih dari itu, menyangkut manipulasi simbol-simbol pembangunan yang digunakan untuk menopang konsolidasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga Presiden. Tempo secara konsisten membingkai isu dinasti politik Presiden Jokowi sebagai bagian dari sebuah sistem patronase yang terstruktur, bukan sebagai hasil dari pencapaian politik individu semata. Dalam salah satu laporannya, disebutkan bahwa “Gibran akhirnya mendapat penantang dari jalur independen, yaitu Bagyo Wahyono, tukang jahit. Dengan lawan tak seimbang, Gibran menang dengan perolehan suara lebih dari 90 persen.” Kutipan ini mengindikasikan bahwa mekanisme demokrasi formal seperti pemilu dimanfaatkan secara strategis untuk membangun legitimasi atas kekuasaan yang sebenarnya telah dirancang sebelumnya. Tempo mengidentifikasi bahwa kehadiran kontestan dalam pemilihan tidak mencerminkan kompetisi ideologis atau adu program, melainkan hanya berfungsi sebagai pelengkap prosedural guna menghindari label otoritarian. Dalam kerangka definisi masalah yang disusun, Tempo menegaskan bahwa demokrasi prosedural tetap dapat menyimpang apabila dijalankan oleh aktor-aktor yang memiliki dominasi atas sumber daya negara. Dengan demikian, inti permasalahan yang dikedepankan adalah bagaimana sistem demokrasi direayasa oleh kekuasaan dinasti melalui instrumen-instrumen yang secara formal sah, namun secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Tempo juga menyoroti keterlibatan aktor-aktor kunci dalam pemerintahan yang dianggap berperan aktif dalam mendukung wacana perpanjangan kekuasaan sekaligus memperkuat dinasti politik. Figur-figur seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, disebut sebagai pihak yang turut menggulirkan narasi penundaan pemilu. Dalam salah satu narasinya, Tempo menyatakan bahwa “atas restu Istana, Luhut tetap melobi sejumlah politikus senior untuk mendukung penundaan pemilu.” Pernyataan ini membingkai permasalahan bahwa elite pemerintahan telah memanfaatkan posisi dan otoritas formal mereka untuk mendorong agenda politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, yakni pelestarian kekuasaan oleh satu kelompok keluarga. Tempo mengkritisi bahwa praktik semacam ini mencerminkan pergeseran orientasi pemerintahan, dari institusi yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan publik, menjadi instrumen yang melayani kepentingan dinasti. Oleh karena itu, fokus masalah yang dirumuskan tidak semata terletak pada figur Presiden Jokowi atau Gibran secara individual, melainkan pada budaya kekuasaan yang memanfaatkan struktur dan sumber daya negara guna menopang keberlangsungan politik keluarga tertentu. Dalam laporan yang sama, Tempo turut menggarisbawahi persoalan keberpihakan partai politik, yang seharusnya berperan sebagai penyeimbang dalam sistem demokrasi. Namun dalam konteks ini, partai-partai seperti Golkar, PAN, dan PKB justru diposisikan sebagai pendukung aktif dinasti politik, alih-alih berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Disebutkan dalam pemberitaan bahwa “Para ketua umum partai pendukung Jokowi, yaitu PKB, Golkar, dan PAN, ikut mendukung,” saat Presiden mengutus timnya untuk mengamankan kemenangan Gibran. Tempo membingkai fenomena ini sebagai bukti bahwa partai politik telah mengalami pergeseran fungsi, dari institusi pengawasan publik menjadi instrumen kekuasaan personal. Dengan demikian, definisi masalah yang dikemukakan adalah terjadinya krisis kelembagaan dalam demokrasi Indonesia, di mana partai politik tidak lagi berperan sebagai perwakilan aspirasi rakyat, tetapi menjadi bagian integral dari struktur kekuasaan yang melayani kepentingan elite. Lewat narasi tersebut, Tempo menekankan bahwa ancaman terhadap kelangsungan demokrasi tidak hanya bersumber dari figur pemegang kekuasaan, melainkan juga dari institusi politik yang telah kehilangan komitmen terhadap prinsip representasi dan idealisme demokratis.

Tempo juga merumuskan persoalan dinasti politik Presiden Jokowi melalui kerangka legitimasi hukum yang dibentuk oleh keputusan lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam laporan berjudul “Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi”, Tempo mencatat pernyataan bahwa “putusan hanya untuk keluarga Jokowi,” yang secara eksplisit mengkritik bagaimana produk hukum dipersepsikan sebagai sarana untuk memenuhi agenda politik personal. Dalam kerangka framing, media mengarahkan perhatian bukan pada substansi batas usia calon presiden dan wakil presiden, melainkan pada motif dan proses pengambilan keputusan yang dinilai menyimpang dari prinsip keadilan. Hubungan kekeluargaan antara Ketua MK, Anwar Usman, dengan Gibran yang juga keponakan Presiden Jokowi disebut sebagai elemen yang memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Tempo, melalui narasinya, membingkai bahwa krisis demokrasi muncul ketika lembaga yang semestinya berfungsi sebagai penjaga konstitusi justru menjadi instrumen dalam mempertahankan kekuasaan dinasti. Dalam pandangan ini, institusi hukum tidak lagi berperan sebagai pelindung kepentingan publik, tetapi justru terlibat dalam proses pelanggaran kekuasaan politik keluarga.

Dalam rangka memperjelas konstruksi permasalahan, Tempo menerapkan pendekatan naratif untuk menunjukkan bahwa kebijakan dan keputusan politik tidak sepenuhnya lahir dari proses demokrasi formal, melainkan banyak dipengaruhi oleh interaksi informal, komunikasi personal, serta dinamika relasi kuasa yang bersifat noninstitusional. Salah satu kutipan yang memperkuat argumen ini adalah pernyataan bahwa “Jokowi meminta Megawati mengeluarkan rekomendasi untuk Gibran.” Narasi tersebut menggambarkan bahwa arah kebijakan partai bukan merupakan hasil dari proses deliberatif internal yang demokratis, melainkan dipengaruhi secara langsung oleh permintaan Presiden. Tempo membingkai hal ini sebagai bentuk penyimpangan serius, karena mencerminkan kecenderungan elite politik membangun struktur kekuasaan yang lebih bersifat patrimonial daripada berbasis institusi. Dengan kata lain, keputusan strategis partai maupun arah politik nasional ditentukan oleh relasi personal antarelite, bukan oleh mekanisme partai yang partisipatif atau representasi aspirasi publik. Dalam definisinya, Tempo menekankan bahwa situasi ini menandakan kemunduran demokrasi, yang secara prosedural tetap berjalan, namun kehilangan substansi partisipasi rakyat yang sejati dan hanya tersisa sebagai simbol formal belaka.

Tempo juga menganalisis persoalan dari perspektif etika pemerintahan, khususnya terkait penggunaan sumber daya negara yang secara implisit diarahkan untuk membangun citra dan memperkuat posisi politik anggota keluarga Presiden. Dalam salah satu laporannya, disebutkan bahwa “Para lurah diiming-imingi duit Rp 50 ribu untuk setiap suara warga di wilayahnya yang mendukung Bobby.” Pernyataan ini secara eksplisit menunjukkan adanya mobilisasi aparat birokrasi untuk kepentingan politik personal, di luar fungsi administratif yang semestinya. Tempo membingkai masalah ini sebagai bentuk ketimpangan akses terhadap instrumen negara, yang berimplikasi pada distorsi kompetisi politik yang adil dan meruntuhkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Definisi masalah yang dikonstruksi menekankan bahwa praktik seperti ini tidak hanya menimbulkan ketidaksetaraan dalam proses elektoral, tetapi juga merusak integritas moral institusi negara karena birokrasi difungsikan sebagai saluran kampanye yang terselubung. Dalam kerangka framing Robert N. Entman, Tempo menyatakan bahwa isu tersebut tidak sekadar berkaitan dengan pelanggaran administratif, melainkan mencerminkan kemerosotan etika dalam praktik pemerintahan dan pergeseran nilai dalam penyelenggaraan kekuasaan publik. Tempo turut membingkai persoalan dari dimensi psikologis dan simbolik kepemimpinan Presiden Jokowi, yang dalam pemberitaan digambarkan melalui istilah “zigzag.” Ungkapan ini digunakan Tempo saat menuliskan bahwa “langkah zigzag Jokowi terus berlanjut,” sebagai representasi simbolik dari inkonsistensi serta ketidakjelasan arah kebijakan dalam menangani isu-isu strategis nasional. Tempo menyusun definisi masalah bahwa ketidaktegasan posisi politik Presiden tidak semata menjadi persoalan dalam ranah komunikasi publik, tetapi telah menciptakan kebingungan sistemik yang melemahkan kredibilitas serta stabilitas kelembagaan negara. Dalam kerangka ini, persoalan yang diangkat bersifat multidimensi: Presiden yang seharusnya memberikan arah kebijakan yang konsisten dan terbuka justru menampilkan ambiguitas yang berdampak pada ketidakpastian politik di tingkat nasional. Berdasarkan kerangka analisis framing Robert N. Entman, Tempo menempatkan isu ini sebagai problem mendasar dalam kepemimpinan, karena menyangkut aspek kepercayaan publik serta arah jangka panjang tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, media tidak hanya mencatat ketidaktegasan sebagai fenomena politik, melainkan mengartikulasikannya sebagai faktor penyebab dari ketidakseimbangan yang lebih luas dalam dinamika kekuasaan negara.

Tempo turut membingkai persoalan dalam konteks relasi antara narasi publik dan realitas politik yang berlangsung di balik struktur kekuasaan. Salah satu bentuk konstruksi masalah yang menonjol terlihat dalam narasi mengenai “Presiden meminta kolega bisnisnya semasa di Solo itu menjadi komisaris badan usaha milik negara.” Dalam hal ini, Tempo mengindikasikan bahwa kewenangan eksekutif telah digunakan sebagai alat untuk merancang transaksi politik yang menguntungkan lingkaran keluarga, alih-alih berlandaskan pada kepentingan nasional atau prinsip profesionalisme. Media membingkai bahwa dalam suatu sistem demokrasi yang sehat, penunjukan jabatan strategis di BUMN seharusnya didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan institusional, bukan dijadikan sebagai kompensasi politik dalam merespons dinamika kekuasaan lokal. Oleh karena itu, definisi masalah yang dirumuskan menjadi semakin kompleks: adanya praktik transaksional yang tidak hanya mempersempit ruang demokrasi, tetapi juga merusak integritas kelembagaan publik. Tempo menegaskan bahwa dampak dari politik dinasti tidak terbatas pada proses elektoral, melainkan turut merembet ke sektor ekonomi dan institusi negara yang idealnya bersifat netral dan profesional.

Sebagai penutup dari konstruksi definisi masalah, Tempo menggarisbawahi ironi dalam praktik politik dinasti melalui narasi yang dikemas secara simbolik sebagai “doa orang tua.” Dalam pemberitaannya, Tempo mencatat pernyataan Presiden bahwa, “Jokowi dan Iriana pun mendukung Gibran maju sebagai calon wakil presiden meski tak pernah blakblakan menyampaikannya. ‘Orang tua hanya mendoakan anak,’ tutur Jokowi, Oktober 2023.” Pernyataan

ini menjadi signifikan dalam kerangka framing karena memperlihatkan bahwa kekuasaan dinasti tidak selalu diwujudkan melalui instruksi eksplisit atau pengakuan langsung, melainkan bisa dijalankan secara implisit melalui bahasa simbolik. Tempo membingkai bahwa inti persoalan terletak pada pencampuran antara peran pribadi sebagai orang tua dan posisi publik sebagai kepala negara, yang mengaburkan batas-batas etis dan institusional. Dalam perspektif media, definisi masalah dinasti politik tidak semata-mata terkait dengan aspek struktural atau kelembagaan, tetapi juga dengan penggunaan narasi simbolik yang menciptakan ilusi netralitas, padahal terdapat intervensi politik yang substansial. Secara keseluruhan, Tempo secara konsisten menyampaikan bahwa problem utama dalam isu dinasti politik Jokowi adalah hilangnya garis pemisah antara kekuasaan negara dan kepentingan keluarga, serta antara legitimasi publik dan kehendak personal.

4.2.2 Diagnose Causes

Dalam kerangka analisis framing Robert N. Entman, tahap *diagnose causes* bertujuan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas masalah yang telah dibingkai. Tempo.co, dalam laporannya mengenai dinasti politik Jokowi, secara konsisten menunjuk Presiden Joko Widodo sebagai sumber utama persoalan, dengan menyoroti konsentrasi kekuasaan yang digunakan untuk mengatur jalur politik keluarganya. Salah satu faktor penyebab yang ditegaskan adalah keterlibatan aktif Jokowi dalam merancang skenario politik secara sistematis. Dalam laporan “Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga”, disebutkan bahwa rencana perpanjangan masa jabatan Presiden disusun di sebuah rumah di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Hal ini menandakan bahwa munculnya dinasti politik bukan hasil dari dinamika politik spontan atau tekanan publik, melainkan hasil rekayasa kekuasaan yang disengaja dan terorganisir. Jokowi diposisikan sebagai pengendali utama arsitektur kekuasaan, termasuk dalam penempatan anak dan menantunya dalam arena politik nasional dan lokal.

Tempo juga menyoroti keterlibatan langsung Presiden dalam proses pengambilan keputusan partai sebagai salah satu penyebab utama menguatnya politik dinasti. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa “Jokowi datang ke rumah Megawati Soekarnoputri di Menteng... meminta Megawati mengeluarkan rekomendasi untuk Gibran.” Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme internal partai tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena keputusan strategis justru lahir dari intervensi personal elite kekuasaan. Tempo membingkai bahwa gejala ini mencerminkan lemahnya demokrasi prosedural, di mana kekuasaan eksekutif berhasil mengendalikan ruang gerak partai politik. Dengan demikian, penyebab dari berkembangnya politik dinasti tidak hanya terletak pada kehendak Presiden, tetapi juga pada struktur politik yang longgar dalam membatasi dominasi kekuasaan eksekutif atas institusi politik lainnya. Tempo juga mengidentifikasi Mahkamah Konstitusi sebagai elemen kunci dalam menguatnya politik dinasti, khususnya melalui putusan yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam laporan berjudul “Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi”, Tempo menegaskan bahwa “putusan hanya untuk keluarga Jokowi.” Framing ini menyoroti bahwa keputusan tersebut bukan hasil pertimbangan hukum yang independen, melainkan buah dari intervensi kekuasaan yang dimungkinkan oleh hubungan kekerabatan antara Presiden dan Ketua MK. Tempo membingkai bahwa penyebab utama melemahnya prinsip demokrasi terletak pada manipulasi lembaga hukum oleh elite kekuasaan. Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjaga integritas konstitusi, justru kehilangan otonomi akibat kedekatan personal dengan penguasa eksekutif. Dengan demikian, MK tidak berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, melainkan sebagai instrumen yang memperkuat eksistensi politik dinasti. Dalam analisis ini, faktor struktural dan personal berkonvergensi menciptakan kondisi yang mengakomodasi keberlanjutan dinasti tanpa kendala hukum yang memadai.

Tempo juga menggarisbawahi bahwa akar persoalan politik dinasti tidak semata bersumber dari Presiden atau lembaga negara, tetapi juga dari partai-partai politik yang mengabaikan prinsip ideologis demi kedekatan dengan kekuasaan. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa “Para ketua umum partai pendukung Jokowi, yaitu PKB, Golkar, dan PAN, ikut mendukung.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa partai politik, alih-alih berperan sebagai pengawal demokrasi, justru menjadi fasilitator kekuasaan berbasis keluarga. Tempo membingkai bahwa ketundukan partai terhadap dominasi Presiden telah menghilangkan fungsi kontrol dan oposisi terhadap praktik politik dinasti. Dengan demikian, penyebab dinasti bersifat kolektif: ia berlangsung karena adanya konsensus eksplisit maupun implisit dari partai politik. Dalam kerangka ini, penyebab struktural menjadi krusial karena partai telah mengalami pergeseran fungsi, dari lembaga representatif publik menjadi instrumen dalam kalkulasi kekuasaan.

Tempo juga mengidentifikasi penggunaan jaringan kekuasaan yang terorganisir dan bersifat personal sebagai penyebab lain dari menguatnya politik dinasti. Dalam laporan mengenai pemilihan Wali Kota Solo, Tempo menuliskan bahwa “Jokowi mengutus timnya dari Jakarta mengawal kemenangan Gibran.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pengaruh Presiden tidak terbatas pada ranah nasional, melainkan meluas hingga ke level

pemerintahan lokal. Dengan mengerahkan tim khusus untuk mengatur dinamika pemilihan daerah, kontrol politik menjadi sangat terpusat dan melampaui batas kewenangan formal. Tempo membingkai bahwa suburnya dinasti politik disebabkan oleh tidak adanya pembatasan institusional atas jangkauan kekuasaan eksekutif, baik secara spasial maupun politik. Oleh karena itu, penyebab utamanya bukan sekadar ambisi individual Presiden, tetapi juga lemahnya sistem pengawasan dan regulasi yang memungkinkan intervensi kekuasaan dalam proses elektoral di berbagai tingkatan pemerintahan.

Tempo juga mengungkap dimensi legitimasi moral sebagai penyebab menguatnya politik dinasti, khususnya melalui manipulasi opini publik untuk membenarkan kebijakan yang sarat kepentingan pribadi. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa “Luhut mengklaim mayoritas penduduk negeri ini menginginkan penundaan Pemilu 2024... namun data itu juga menunjukkan 30 persen pemilih tak menyetujui penundaan pemilu.” Tempo membingkai bahwa penguasa menggunakan data dan komunikasi publik secara selektif untuk menciptakan kesan dukungan massal yang tidak mencerminkan kenyataan. Dalam konteks ini, penyebab yang diidentifikasi bersifat ideologis: pengendalian terhadap narasi publik dijadikan alat untuk mengamankan kepentingan politik keluarga penguasa. Dengan memanfaatkan kontrol atas wacana dan informasi, masyarakat tidak diberi ruang untuk menyusun opini kritis berbasis fakta utuh. Tempo menegaskan bahwa problem dinasti tidak semata berasal dari pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan formal, tetapi juga dari teknik pembingkai informasi yang secara sistematis mengikis kesadaran demokratis publik.

Tempo juga menyoroti bahwa akar dari menguatnya politik dinasti terletak pada struktur sistem politik yang terlampaui bergantung pada sosok Presiden sebagai pusat kekuasaan. Dalam salah satu berita disebutkan, “Presiden pun disebut-sebut meng-endorse Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai pasangan Prabowo sebelum nama Gibran muncul.” Kutipan ini menegaskan bahwa figur Presiden memiliki pengaruh dominan dalam menentukan arah pencalonan nasional, bukan melalui proses kelembagaan, melainkan melalui restu personal. Tempo membingkai kondisi ini sebagai bentuk disfungsi sistemik yang menggerus independensi politik, karena keputusan strategis bergantung pada preferensi individu, bukan mekanisme kolektif atau institusional. Dalam analisis framing ini, Jokowi tidak hanya dilihat sebagai pelaku, tetapi juga sebagai simbol dari sistem kekuasaan yang tersentralisasi. Dengan demikian, penyebab mendasar dari berkembangnya politik dinasti bukan hanya pada manuver politik Presiden, melainkan pada lemahnya desain sistem politik yang menempatkan satu tokoh sebagai poros utama legitimasi.

Tempo juga mengidentifikasi lemahnya penegakan etika pemerintahan sebagai salah satu faktor yang memungkinkan tumbuhnya praktik dinasti politik. Dalam laporan disebutkan, “Para lurah diiming-imingi duit Rp 50 ribu untuk setiap suara warga di wilayahnya yang mendukung Bobby,” yang menggambarkan keterlibatan aparatur birokrasi dalam konsolidasi kekuasaan keluarga Presiden. Tempo membingkai bahwa penyebab persoalan bukan semata-mata terletak pada elite politik nasional, tetapi juga pada praktik sistemik yang mengizinkan mobilisasi sumber daya negara untuk kepentingan politik pribadi. Dalam konteks ini, penyebab tidak hanya vertikal berasal dari kekuasaan pusat melainkan juga horizontal, menjalar ke struktur pemerintahan daerah. Birokrasi, yang semestinya netral, justru menjadi bagian dari jaringan kekuasaan yang dimobilisasi secara terkoordinasi. Tempo menegaskan bahwa praktik ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjaga integritas etika dalam tata kelola pemerintahan.

Maraknya praktik politik dinasti juga bersumber dari ketidaktegasan, bahkan keterlibatan langsung elite politik dalam membenarkan dan menjalankan skenario kekuasaan berbasis kekerabatan. Dalam salah satu laporan, Tempo mengutip pernyataan bahwa “Jokowi menyampaikan bahwa PDIP telah memutuskan Gibran maju di Solo... Jokowi kemudian meminta Rudy ikut membantu kemenangan Gibran.” Hal ini mencerminkan bahwa elite partai tidak sekadar memberi persetujuan, tetapi turut aktif dalam merealisasikan strategi politik dinasti. Tempo membingkai bahwa penyebab krisis demokrasi bukan lagi terbatas pada dominasi Presiden sebagai individu, melainkan pada terbentuknya konsensus elite yang membiarkan praktik tersebut berjalan tanpa kritik. Dalam konteks ini, penyebab utama bersifat kolektif berakar pada budaya politik yang permisif terhadap nepotisme dan pembajakan institusi oleh kepentingan keluarga. Tempo menegaskan bahwa tanpa perubahan struktural dan normatif di tingkat elite, praktik serupa akan terus berulang dan memperdalam erosi terhadap prinsip demokrasi.

Tempo menyimpulkan bahwa akar dari menguatnya dinasti politik Jokowi terletak pada gabungan faktor sistemik: sentralisasi kekuasaan, lemahnya institusi, oportunisme partai politik, dan birokrasi yang mudah dimobilisasi. Seluruh unsur ini membentuk jejaring kekuasaan yang saling menopang dan menciptakan ekosistem politik yang kondusif bagi praktik dinasti. Dalam laporan tentang pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, Tempo mencatat, “Prabowo meminta Jokowi merestui Gibran sebagai calon wakil presiden.” Kutipan ini menegaskan bahwa keputusan strategis dalam pemilu presiden tidak lagi bergantung pada proses internal partai atau pertimbangan koalisi,

melainkan pada persetujuan pribadi Presiden. Dengan demikian, Tempo membingkai bahwa penyebab utama dinasti politik bukan semata kehendak individu Jokowi, melainkan struktur politik nasional yang memungkinkan dan menormalisasi praktik tersebut sebagai bagian dari keseharian politik kekuasaan.

4.2.3 Make Moral Judgement

Dalam tahap *make moral judgement* menurut kerangka Robert N. Entman, media tidak sekadar menguraikan masalah dan penyebabnya, tetapi juga menyampaikan penilaian etis terhadap peristiwa yang diberitakan. Tempo, dalam laporan mengenai dinasti politik Jokowi, secara eksplisit menilai praktik tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Tempo membingkai upaya pelanggaran kekuasaan keluarga Presiden sebagai tindakan yang secara moral tercela dan berpotensi merusak fondasi institusional negara. Dalam laporan berjudul “Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga”, disebutkan bahwa “Jokowi pun berupaya agar perpanjangan masa jabatan melalui penundaan pemilihan umum bisa bergulir.” Pernyataan ini tidak hanya menggambarkan strategi politik, tetapi dikonstruksi sebagai pelanggaran etis oleh seorang Presiden yang semestinya menjaga, bukan memanipulasi, konstitusi untuk kepentingan pribadi. Tempo menilai bahwa tindakan semacam ini merusak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Tempo juga menyampaikan penilaian moral terhadap intervensi Presiden dalam proses pencalonan anggota keluarganya. Dalam salah satu kutipan disebutkan bahwa “Jokowi menyampaikan bahwa Gibran berniat maju sebagai wali kota... Jokowi meminta kolega bisnisnya menjadi komisaris BUMN.” Tempo menyoroti bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika kepemimpinan publik, tetapi juga mencerminkan kompromi atas prinsip-prinsip demokrasi melalui praktik transaksional kekuasaan. Dalam kerangka moralitas yang diusung media ini, kepemimpinan Jokowi dikritik karena menggunakan otoritas negara untuk mengelola loyalitas politik demi kepentingan keluarga. Penilaian tersebut bersifat tegas dan tidak netral, menunjukkan posisi editorial yang mendukung meritokrasi dan akuntabilitas. Dengan memaknai jabatan sebagai alat tukar politik, Tempo menempatkan tindakan Presiden dalam ranah patronase yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi serta prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung keadilan dan profesionalisme.

Tempo juga menyampaikan penilaian moral yang tajam terhadap institusi hukum yang seharusnya bersikap independen, namun justru berperan dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam laporan berjudul “Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi”, Tempo mengutip pernyataan Ujang Komarudin: “Itu tragedi demokrasi yang tidak bagus, kelihatannya MK kebobolan.” Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan kegagalan prosedural, tetapi juga merupakan penilaian etis terhadap runtuhnya integritas Mahkamah Konstitusi. Tempo membingkai putusan tersebut sebagai bukti tergerusnya moralitas dalam lembaga yudisial, ketika hakim tidak lagi berposisi sebagai penjaga konstitusi, melainkan menjadi alat kepentingan politik dinasti. Penilaian moral ini menyoroti ketidakadilan struktural yang timbul akibat hukum dijadikan instrumen kekuasaan, bukan penegak keadilan. Dengan framing semacam itu, Tempo memperingatkan publik bahwa demokrasi Indonesia tengah mengalami kemunduran etika serius, bahkan di tingkat lembaga tertinggi negara.

Tempo secara tegas menerapkan standar moral dalam menilai praktik penggunaan kekuasaan untuk keuntungan elektoral pribadi dan keluarga. Dalam salah satu pemberitaan, dinyatakan bahwa “Jokowi mengutus timnya dari Jakarta mengawal kemenangan Gibran.” Pernyataan ini dibingkai bukan sekadar sebagai langkah taktis politik, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan otoritas Presiden untuk memengaruhi proses pemilu yang seharusnya berlangsung secara adil dan independen. Tempo menilai bahwa tindakan semacam ini memperlebar kesenjangan dalam kompetisi politik, sebab seorang kandidat memperoleh dukungan langsung dari jaringan kekuasaan dan sumber daya negara, sementara pesaing lain tidak berada dalam posisi setara. Penilaian moral yang dikemukakan menekankan bahwa intervensi semacam ini menciderai prinsip keadilan elektoral dan mengganggu integritas demokrasi. Dalam kerangka normatif, Tempo menggarisbawahi bahwa seorang pemimpin yang menjunjung etika seharusnya menjaga jarak dari pemilihan yang melibatkan keluarganya demi menjamin netralitas negara dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Tempo juga mengarahkan penilaian moralnya kepada para elite politik yang memilih untuk diam atau justru turut memperkuat agenda dinasti kekuasaan. Dalam salah satu laporan, dinyatakan bahwa “Para ketua umum partai pendukung Jokowi, yaitu PKB, Golkar, dan PAN, ikut mendukung.” Sikap para pimpinan partai ini dibingkai sebagai kegagalan moral kolektif, karena mereka secara sadar ikut terlibat dalam mempertahankan dominasi politik keluarga Presiden. Ketiadaan perlawanan internal terhadap praktik tersebut ditafsirkan sebagai bentuk permisivitas terhadap kerusakan institusional demokrasi. Tempo menekankan bahwa tanggung jawab etis dalam politik tidak berhenti pada

kalkulasi strategis semata, tetapi mencakup kewajiban untuk menjaga fondasi moral sistem pemerintahan. Penilaian moral yang ditampilkan menyiratkan bahwa ketika oportunisme menjadi norma dalam perilaku elite, demokrasi tereduksi menjadi ritual prosedural tanpa substansi. Oleh karena itu, integritas politik harus dinilai dari kesetiaan terhadap prinsip demokrasi, bukan sekadar keberhasilan dalam mempertahankan kekuasaan.

Tempo turut menyoroti aspek moral dalam penggunaan kekuasaan untuk membentuk persepsi publik secara sepihak. Dalam laporannya disebutkan, “Luhut mengklaim mayoritas penduduk negeri ini menginginkan penundaan Pemilu 2024... namun data itu juga menunjukkan 30 persen pemilih tak menyetujui penundaan pemilu.” Pernyataan ini dibingkai sebagai bentuk manipulasi informasi, di mana data digunakan secara selektif untuk membangun legitimasi semu atas kebijakan politik yang sarat kepentingan. Tempo memberikan penilaian moral bahwa praktik semacam ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Kritik tidak hanya diarahkan pada individu pelaku, tetapi juga pada kegagalan institusional yang membiarkan distorsi informasi tanpa mekanisme koreksi. Tempo menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dengan prosedur elektoral, melainkan juga menuntut integritas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, segala bentuk penyesatan naratif demi agenda kekuasaan dipandang sebagai bentuk degradasi etika politik yang merusak fondasi deliberasi publik yang rasional dan adil.

Tempo juga memberikan penilaian moral terhadap praktik tekanan terselubung yang dilakukan oleh kekuasaan terhadap pihak-pihak yang dinilai tidak sejalan dengan agenda politik dinasti. Dalam laporan “Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga”, disebutkan bahwa “Jokowi meminta kolega bisnisnya semasa di Solo itu menjadi komisaris badan usaha milik negara.” Tempo membingkai tindakan ini sebagai bentuk instrumentalisasi jabatan publik untuk membangun loyalitas politik. Tawaran posisi strategis di lembaga negara dipandang sebagai bentuk gratifikasi politik yang secara etis menyimpang dari prinsip keadilan dan meritokrasi. Dalam penilaian moral Tempo, tindakan semacam ini mengindikasikan bahwa kekuasaan tidak lagi digunakan untuk melayani kepentingan publik, melainkan dikelola sebagai instrumen barter untuk mempertahankan kesetiaan politik terhadap Presiden dan lingkaran keluarganya. Framing ini menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat tumbuh dalam ekosistem kekuasaan yang memperlakukan jabatan sebagai komoditas politik demi menekan atau mengamankan dukungan.

Tempo tidak hanya mengarahkan penilaian moral pada para elite politik, tetapi juga pada diamnya institusi negara yang seharusnya menjamin netralitas dan keseimbangan kekuasaan. Dalam pemberitaan mengenai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, kutipan “Prabowo meminta Jokowi merestui Gibran sebagai calon wakil presiden” menunjukkan bahwa restu Presiden bukan sekadar simbolik, melainkan krusial dalam penentuan konfigurasi kekuasaan nasional. Tempo membingkai dominasi Presiden dalam proses ini sebagai bentuk monopoli politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Penilaian moral yang diberikan menyoroti bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu figur atau dinasti tidak hanya merusak tatanan institusional, tetapi juga menghambat representasi politik yang seharusnya dibangun atas dasar partisipasi luas dan distribusi kewenangan yang adil. Tempo menegaskan bahwa demokrasi yang sehat menuntut tidak hanya prosedur formal, tetapi juga komitmen etis terhadap pembagian kekuasaan secara inklusif dan proporsional. Pada level lokal, Tempo juga memberikan penilaian moral terhadap proses kemenangan Gibran dan Bobby dalam pemilihan kepala daerah yang dinilai mencederai prinsip kompetisi yang adil. Dalam salah satu laporan disebutkan, “Gibran akhirnya mendapat penantang dari jalur independen... Dengan lawan tak seimbang, Gibran menang dengan perolehan suara lebih dari 90 persen.” Tempo membingkai hasil ini bukan sebagai cerminan kekuatan elektoral yang otentik, melainkan sebagai bentuk rekayasa politik untuk memperoleh legitimasi semu. Moral judgement diarahkan pada praktik simulasi demokrasi, di mana kontestasi dipertahankan hanya sebagai formalitas, tanpa esensi persaingan yang setara. Tempo menilai bahwa mekanisme seperti ini menyesatkan publik sekaligus merusak kredibilitas pemilu sebagai sarana seleksi kepemimpinan. Oleh karena itu, kritik moral tidak hanya ditujukan kepada aktor-aktor politik tertentu, tetapi juga terhadap sistem politik yang memungkinkan praktik pseudo-demokrasi menjadi norma dalam pembentukan kekuasaan.

Tempo juga mengajukan penilaian moral terhadap ketidaksesuaian antara pernyataan publik Presiden dan langkah-langkah politik yang diambil secara terselubung. Dalam pemberitaannya, Tempo mengutip ucapan Jokowi, “Saya tidak berminat menjadi presiden tiga periode,” yang disampaikan pada Maret 2021 sebagai penolakan terhadap isu perpanjangan masa jabatan. Namun, laporan Tempo menyiratkan bahwa di balik penyangkalan tersebut, terdapat gerakan politik yang terstruktur untuk memperpanjang kekuasaan, baik melalui amendemen terbatas konstitusi maupun melalui penundaan pemilu. Tempo membingkai ketidakkonsistenan ini sebagai bentuk kegagalan etis, khususnya dalam hal kejujuran publik. Dalam perspektif demokrasi, integritas pemimpin tidak hanya diukur dari hasil kebijakannya, tetapi dari seberapa selaras tindakan politiknya dengan pernyataan yang disampaikan kepada publik.

Tempo menekankan bahwa inkonsistensi semacam ini merusak kepercayaan publik dan memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap etika kepemimpinan.

Penilaian moral terakhir yang disampaikan Tempo bersandar pada kekhawatiran mendalam mengenai arah masa depan demokrasi di Indonesia. Tempo mengutip pernyataan pengamat politik Ujang Komarudin yang menyatakan bahwa “putusan hanya untuk keluarga Jokowi,” sebagai penegasan bahwa persoalan dinasti politik mencerminkan persoalan moral sistemik yang serius. Tempo tidak hanya mengarahkan kritiknya pada individu atau kelompok tertentu, melainkan mengingatkan bahwa jika praktik semacam ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko terjebak dalam demokrasi yang hanya bersifat prosedural, tanpa substansi. Penilaian moral ini mencakup refleksi terhadap kelangsungan sistem politik nasional, dengan menyatakan bahwa demokrasi tidak akan berjalan sehat apabila dijalankan oleh elite yang abai terhadap nilai-nilai etis seperti keadilan dan kesetaraan. Dalam moral framing-nya, Tempo menyampaikan bahwa dinasti politik bukan sekadar isu nepotisme, melainkan cerminan dari kemerosotan nilai-nilai dasar dalam tata kelola negara. Isu ini, menurut Tempo, bukan hanya persoalan kekuasaan, tetapi juga krisis moral dalam kehidupan berbangsa.

4.2.4 Treatment Recommendation

Dalam kerangka *treatment recommendation*, Entman menyatakan bahwa media berperan menawarkan solusi atas masalah yang telah diidentifikasi dan dinilai secara moral. Tempo, dalam peliputan terkait dinasti politik Jokowi, tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menyiratkan langkah perbaikan yang perlu diambil untuk memulihkan kualitas demokrasi. Salah satu rekomendasi utama yang disorot adalah perlunya pemulihan independensi institusi negara, khususnya Mahkamah Konstitusi. Dalam laporan berjudul “Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi”, Tempo menegaskan bahwa “para hakim MK seharusnya menjadi negarawan.” Pernyataan ini merupakan seruan normatif yang secara implisit menuntut agar hakim agung bertindak independen, menjunjung konstitusi, dan terbebas dari tekanan politik. Tempo menegaskan bahwa penguatan integritas lembaga yudikatif merupakan langkah awal untuk mencegah normalisasi praktik dinasti dalam politik nasional.

Selain menekankan pentingnya independensi hukum, Tempo juga menyiratkan bahwa reformasi partai politik merupakan elemen krusial dalam merespons maraknya politik dinasti. Dalam laporan “Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga”, disebutkan bahwa “Jokowi meminta Megawati mengeluarkan rekomendasi untuk Gibran,” yang menunjukkan bahwa fungsi partai telah bergeser dari institusi ideologis menjadi alat kekuasaan personal. Tempo secara implisit merekomendasikan perlunya reformasi internal partai, khususnya dalam mekanisme rekrutmen dan kaderisasi, agar berbasis pada kompetensi dan prinsip meritokrasi, bukan afiliasi kekerabatan. Dengan demikian, partai politik perlu menolak intervensi eksternal dan memperkuat otonomi dalam proses seleksi kandidat, sebagai prasyarat untuk mencegah reproduksi kekuasaan dinastik dalam sistem demokrasi. Tempo juga menggarisbawahi urgensi penguatan regulasi politik untuk membatasi penyalahgunaan jabatan publik demi kepentingan keluarga penguasa. Dalam laporan yang menyoroti pilkada Bobby Nasution, disebutkan bahwa “Para lurah diiming-imingi duit Rp 50 ribu untuk setiap suara warga di wilayahnya yang mendukung Bobby.” Praktik ini menunjukkan adanya mobilisasi birokrasi secara tidak sah. Tempo secara implisit merekomendasikan pembentukan sistem pengawasan pemilu yang lebih independen, transparan, dan memiliki kewenangan kuat. Penegakan larangan terhadap keterlibatan aparat negara dalam proses elektoral harus diperkuat, dan pelanggaran harus ditindak secara hukum. Dengan demikian, penguatan lembaga seperti Bawaslu tidak hanya diperlukan dari sisi administratif, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk menjaga etika dan integritas demokrasi elektoral.

Tempo juga menyiratkan pentingnya pembangunan budaya politik yang menolak normalisasi praktik dinasti. Dalam laporan mengenai pilkada Gibran dan Bobby, disebutkan bahwa “Gibran akhirnya mendapat penantang dari jalur independen... Dengan lawan tak seimbang, Gibran menang dengan perolehan suara lebih dari 90 persen.” Tempo menyoroti lemahnya resistensi masyarakat terhadap dominasi kekuasaan sebagai indikasi rendahnya partisipasi politik kritis. Rekomendasi implisit yang disampaikan adalah perlunya pemberdayaan masyarakat sipil sebagai pengawas demokrasi. Publik harus aktif menilai rekam jejak kandidat, mengawasi keterlibatan negara dalam pemilu, dan mendukung calon alternatif yang kredibel. Dengan membangun kesadaran politik kolektif dan partisipasi aktif warga negara, perlawanan terhadap politik dinasti dapat dimunculkan tidak hanya melalui regulasi formal, tetapi juga melalui transformasi kultural.

Tempo juga menekankan pentingnya transparansi dalam komunikasi politik sebagai upaya mencegah praktik kekuasaan yang tidak akuntabel. Dalam narasi “Presiden meminta Koalisi Indonesia Maju mengumumkan pencalonan Gibran ketika ia bersama Iriana melawat ke Cina dan Arab Saudi”, Tempo menilai pemilihan waktu pengumuman sebagai strategi untuk menghindari tekanan publik. Ini dipandang sebagai bentuk komunikasi politik yang manipulatif.

Rekomendasi implisit yang disampaikan adalah perlunya sistem komunikasi pemerintah yang terbuka, terstruktur, dan dapat diawasi publik. Dalam kerangka demokrasi, keputusan politik besar harus disampaikan dalam forum yang transparan dan waktu yang tidak disengaja untuk menghindari akuntabilitas. Tempo menyiratkan bahwa transparansi harus mencakup tidak hanya isi, tetapi juga konteks, motif, dan waktu penyampaian informasi politik.

Tempo juga menyoroti urgensi reformasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah untuk mencegah eksploitasi celah hukum oleh aktor politik. Dalam laporan “Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres...”, Tempo mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi mengakomodasi gugatan yang memungkinkan Gibran mencalonkan diri meskipun belum memenuhi batas usia dalam regulasi sebelumnya. Kasus ini memperlihatkan lemahnya sistem checks and balances, yang memungkinkan manipulasi hukum untuk kepentingan kekuasaan. Tempo secara implisit merekomendasikan agar revisi undang-undang dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat sipil, dan diawasi lembaga independen. Hukum pemilu harus dirancang secara tegas dan tidak multitafsir agar tidak dapat digunakan untuk kepentingan personal. Dengan demikian, Tempo menekankan bahwa regulasi elektoral seharusnya berfungsi sebagai penyangga integritas demokrasi, bukan alat legitimasi kekuasaan.

Tempo juga mengisyaratkan perlunya pembatasan peran Presiden dalam penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa “Prabowo meminta Jokowi merestui Gibran sebagai calon wakil presiden,” yang menunjukkan bahwa pengaruh Presiden telah melampaui batas eksekutif dan mencampuri ranah internal partai politik. Tempo menilai hal ini sebagai bentuk dominasi politik yang tidak sehat dalam sistem demokrasi. Rekomendasi implisit yang muncul adalah perlunya mekanisme baik institusional maupun kultural untuk membatasi campur tangan Presiden dalam proses elektoral. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kemandirian partai politik dan penegakan norma yang menegaskan pemisahan peran antara jabatan eksekutif dan proses pencalonan. Tanpa pembatasan yang jelas, kekuasaan simbolik Presiden akan terus dimanfaatkan untuk mengintervensi kontestasi politik secara tidak proporsional. Tempo juga secara implisit mendorong agar media massa terus menjalankan perannya sebagai pengawas kekuasaan yang kritis dan independen. Dalam laporan-laporan investigatif mengenai politik dinasti Jokowi, Tempo konsisten menyajikan narasi tajam dan analitis, seperti dalam kutipan “langkah zigzag Jokowi terus berlanjut.” Framing ini menekankan bahwa peran media tidak berhenti pada penyampaian fakta, tetapi mencakup interpretasi, evaluasi, dan penyampaian implikasi politiknya. Rekomendasi ini penting di tengah tekanan politik dan ekonomi yang kerap membatasi ruang redaksional media. Tempo menegaskan bahwa hanya melalui jurnalisme investigatif yang bebas dan tidak kompromistis, praktik penyalahgunaan kekuasaan dapat diungkap dan menjadi bahan perdebatan publik yang sehat.

Tempo juga secara implisit merekomendasikan perlunya pendidikan politik yang lebih luas dan sistematis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam personalisasi kekuasaan. Dalam bagian penutup pemberitaan, Tempo mengutip pernyataan Jokowi, “Orang tua hanya mendoakan anak,” sebagai respons atas pencalonan Gibran. Pernyataan ini berpotensi membentuk empati publik yang menutupi fakta intervensi politik. Tempo menyiratkan bahwa pemahaman politik yang rasional dan kritis perlu ditanamkan guna mencegah publik menerima narasi kekuasaan yang dibungkus sentimen keluarga secara pasif. Pendidikan politik menjadi strategi jangka panjang untuk membangun kesadaran warga negara terhadap pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan etika dalam proses politik.

Tempo menyiratkan bahwa reformasi demokrasi Indonesia menuntut komitmen kolektif dari seluruh elemen negara: yudikatif, legislatif, eksekutif, hingga masyarakat sipil. Kasus pencalonan Gibran dan Bobby menunjukkan bahwa politik dinasti tidak dapat dihentikan hanya dengan koreksi individu, melainkan membutuhkan restrukturisasi sistemik. Tempo membingkai pelanggaran kekuasaan berbasis kekerabatan sebagai gejala dari sistem politik yang lemah, oportunistik, dan permisif. Rekomendasi utama yang tersirat adalah perlunya membangun tatanan politik yang meritokratis, disertai kesadaran kolektif untuk menjaga integritas demokrasi. Tanpa reformasi menyeluruh, politik dinasti akan bertransformasi dari penyimpangan menjadi norma dalam praktik kekuasaan Indonesia.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Putusan MK soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi

4.3.1.1 Define Problem

A. Putusan MK sebagai Tragedi Demokrasi

Tempo membingkai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagai krisis besar dalam sistem demokrasi Indonesia. Framing ini ditampilkan secara eksplisit dalam judul berita

“Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi” (**Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023**)

yang menjadi pintu masuk bagi pembaca untuk memahami bahwa yang sedang dihadapi bukan sekadar problem hukum, tetapi kegagalan moral dan kelembagaan. Dalam kerangka teori framing Robert N. Entman, fungsi *define problem* merujuk pada penekanan media terhadap elemen-elemen tertentu dari suatu isu untuk membentuk persepsi masalah yang sistemik (R. M. Entman, 1993) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024). Oleh karena itu, ketika Tempo memilih diksi “tragedi”, hal ini bukan sekadar retorika emosional, tetapi bentuk intensifikasi masalah yang ingin ditampilkan sebagai peringatan krisis demokrasi.

Penggunaan istilah “tragedi demokrasi” dari Ujang Komarudin, seperti saat ia mengatakan “Itu tragedi demokrasi yang tidak bagus, kelihatannya MK kebobolan,” difungsikan Tempo bukan sekadar sebagai kutipan, melainkan sebagai konstruksi makna yang diarahkan untuk membingkai MK sebagai lembaga yang gagal menjaga konstitusi.

“Itu tragedi demokrasi yang tidak bagus, kelihatannya MK kebobolan,” kata Ujang Komarudin...”(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)

Hal ini menegaskan bahwa media tidak netral dalam memosisikan aktor, tetapi aktif dalam memilih representasi untuk mengarahkan opini publik. Hal ini sejalan dengan teori berita sebagai representasi realitas yang difilter melalui perspektif jurnalis dan organisasi media (Van Aelst et al., 2021). Dalam konteks ini, realitas MK ditampilkan bukan sebagai institusi yang netral, tetapi sebagai lembaga yang “kebobolan” dan ikut terseret dalam permainan kekuasaan.

Tempo juga memperkuat framing masalah dengan menyisipkan informasi konteks, yakni bahwa putusan ini keluar menjelang Pemilihan Presiden 2024. Penekanan pada waktu keputusan menegaskan pentingnya momentum dalam pembungkaman masalah. Dengan menyoroti timing keputusan, Tempo ingin menunjukkan bahwa tindakan MK berpotensi mengubah arah kompetisi politik nasional secara drastis. Dalam kerangka Entman, ini adalah bagian dari pemilihan elemen realitas yang dianggap penting untuk diangkat yang disebutnya sebagai *salient*. Pendekatan ini juga menjelaskan bagaimana media berperan dalam membentuk realitas sosial, bukan sekadar mencerminkannya (Bennett, 2016).

Dengan membingkai putusan MK sebagai tragedi demokrasi, Tempo tidak hanya sedang membahas substansi yuridis dari keputusan tersebut, tetapi juga sedang menggarisbawahi kegagalan sistemik dalam menjaga netralitas lembaga yudikatif.

“Itu tragedi demokrasi yang tidak bagus, kelihatannya MK kebobolan,” kata Ujang Komarudin dalam pesan suara kepada Tempo pada Senin, 16 Oktober 2023. “Para hakim MK seharusnya menjadi negarawan, putusan hanya untuk keluarga Jokowi.” (Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)

Hal ini menunjukkan bahwa media, dalam kerangka framing politik, dapat menjadi aktor penting dalam mempertanyakan legitimasi institusi negara (Strömbäck & Van Aelst, 2023). Oleh sebab itu, Tempo menempatkan MK bukan sebagai pelaksana hukum netral, melainkan sebagai titik krisis dalam demokrasi yang rawan dimanfaatkan oleh elite kekuasaan. Dengan demikian, fungsi *define problem* bekerja secara maksimal untuk menggiring kesadaran publik bahwa apa yang tampak sebagai prosedur hukum, sebenarnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap etika konstitusional.

B. Keputusan MK sebagai Bagian dari Permainan Politik Tingkat Tinggi

Tempo membingkai putusan MK bukan sebagai produk deliberasi yuridis murni, melainkan sebagai bagian dari permainan politik tingkat tinggi. Ini ditegaskan melalui kutipan Ujang Komarudin:

“Putusan MK ini merupakan permainan politik tingkat tinggi.” (Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)

Pernyataan tersebut diangkat Tempo sebagai elemen penting dalam membangun definisi masalah, yang menurut (R. M. Entman, 1993) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024), merupakan fungsi awal framing media untuk membentuk persepsi publik tentang realitas yang sedang terjadi. Dalam hal ini, realitas putusan hukum dikonstruksi bukan sebagai manifestasi keadilan, tetapi sebagai manuver elite politik untuk memanipulasi struktur negara demi kepentingan dinasti kekuasaan.

Narasi permainan politik ini diperkuat dengan fakta bahwa tiga permohonan uji materi sebelumnya ditolak oleh MK, tetapi permohonan keempat dari Almas dikabulkan sebagian. Pergeseran sikap ini tidak dijelaskan secara logis oleh MK, dan Tempo memanfaatkannya untuk memperkuat frame ketidakkonsistenan hukum.

“Sikap MK berubah pada putusan keempat. Mereka menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbiru Re A.” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Ini mencerminkan apa yang disebut (Van Aelst et al., 2021) sebagai framing sebagai hasil pilihan naratif media untuk menampilkan inkonsistensi sebagai indikator adanya pengaruh politik yang mencemari lembaga hukum. Dalam kerangka ini, Tempo tidak hanya melaporkan fakta, tetapi mengatur urutan narasi sedemikian rupa agar ketidakstabilan dan inkonsistensi MK tampak sebagai anomali yang perlu dipertanyakan publik. Tempo secara implisit juga menunjukkan aktor yang paling diuntungkan dari keputusan tersebut: Gibran Rakabuming Raka. Dengan menyebut bahwa

“putusan MK membuat peluang Gibran maju di Pilpres 2024 terbuka lebar,” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Tempo membangun narasi bahwa keputusan tersebut bukanlah peristiwa acak, tetapi hasil dari desain kekuasaan. Dalam teori komunikasi politik, (McNair, 2020) menyatakan bahwa media tidak hanya menyampaikan pesan politik, tetapi juga berperan aktif dalam mengonstruksi bagaimana publik memahami relasi antara aktor politik dan sistem. Oleh karena itu, ketika Tempo mengaitkan Gibran dengan putusan MK, hal ini bukan hanya tentang satu aktor, melainkan simbol dari pembusukan sistem demokrasi melalui proses legal yang dipaksakan.

Dengan menyusun narasi secara strategis, Tempo berhasil membentuk persepsi bahwa putusan MK bukan hanya soal hukum, melainkan soal infiltrasi kekuasaan. Media, dalam hal ini, menjalankan fungsi framing politik sebagaimana dijelaskan oleh (Strömbäck & Van Aelst, 2023), yaitu sebagai alat persaingan interpretasi antara elite dan publik. Tempo berpihak pada kepentingan publik dengan cara menunjukkan bahwa proses hukum telah direduksi menjadi instrumen kekuasaan keluarga. Dalam konteks ini, definisi masalah yang dibentuk bukan hanya tentang aktor, tetapi tentang sistem yang gagal membedakan antara prosedur legal dan agenda politik personal.

C. Inkonsistensi Putusan MK sebagai Sumber Masalah Demokrasi

Tempo secara eksplisit membingkai inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sumber gangguan utama terhadap kestabilan hukum dan demokrasi di Indonesia. Media menyoroti bahwa dari lima permohonan uji materi yang dibacakan pada hari yang sama, tiga pertama ditolak, namun permohonan keempat justru dikabulkan sebagian.

“Sikap MK berubah pada putusan keempat. Mereka menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Mereka menyatakan menerima sebagian putusan tersebut” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Dalam perspektif framing Entman, ini adalah bentuk define problem di mana media memilih peristiwa yang dianggap penting untuk membentuk makna dominan (R. M. Entman, 1993) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024). Ketika Tempo menempatkan perbedaan sikap MK ini sebagai hal yang mencurigakan, mereka sedang membangun persepsi bahwa hukum tidak bekerja secara objektif, melainkan tunduk pada kehendak politik tersembunyi.

Penting untuk dicatat bahwa framing ini bekerja dengan membangun urutan naratif yang menciptakan relasi sebab-akibat antara inkonsistensi hukum dan manipulasi kekuasaan. Tempo mengaitkan aktor pemohon Almas Tsaqibbiru Re A. dengan struktur kekuasaan melalui afiliasi keluarganya dan efek politik dari keputusan MK tersebut. Dalam teori framing, ini merupakan bentuk causal interpretation yang melekat dalam define problem, karena ia menyiratkan bahwa ada kekuatan yang sengaja memanipulasi hasil hukum melalui cara yang sah secara prosedural, tetapi menyimpang secara substansial (McNair, 2020). Dengan demikian, pembaca diajak melihat bahwa hukum tidak lagi netral, tetapi fleksibel terhadap tekanan dari luar sistem hukum.

Tempo tidak hanya mengangkat inkonsistensi sebagai hal aneh, tetapi juga menekankan waktu pengambilan keputusan: menjelang masa pendaftaran capres-cawapres. Elemen waktu ini memperkuat framing bahwa keputusan MK bukanlah bagian dari proses hukum rutin, melainkan intervensi terhadap proses politik. Hal ini sejalan dengan pendapat (Van Aelst et al., 2021) bahwa framing media tidak hanya membentuk opini terhadap peristiwa, tetapi juga mengatur bagaimana peristiwa tersebut ditempatkan dalam struktur kekuasaan yang lebih luas. Dengan kata lain,

Tempo tidak hanya ingin pembaca mengetahui bahwa ada inkonsistensi, tetapi juga memahami bahwa inkonsistensi tersebut terjadi pada saat yang strategis untuk menguntungkan pihak tertentu.

Dalam kerangka inilah, Tempo menggunakan framing inkonsistensi MK untuk menyoroiti degradasi fungsi hukum dalam demokrasi. Ketika hukum berubah seiring perubahan aktor yang terlibat, maka publik tidak lagi dapat mempercayai proses hukum sebagai landasan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa media berfungsi sebagai watchdog, yang tidak hanya melaporkan, tetapi juga membentuk interpretasi kritis terhadap proses hukum. Seperti yang dikemukakan oleh McNair (2020), media massa berperan penting dalam mengonstruksi dan mendistribusikan makna politik kepada publik, yang dalam konteks ini diarahkan untuk mencurigai sistem hukum yang manipulatif.

D. Konflik Kepentingan Keluarga dalam Lembaga Yudikatif

Tempo juga secara sadar membingkai isu konflik kepentingan dalam lembaga yudikatif sebagai sumber kerusakan sistemik terhadap demokrasi. Dalam berita tersebut, Gibran Rakabuming Raka secara eksplisit disebut sebagai keponakan dari Ketua MK, Anwar Usman, yang memimpin persidangan perkara batas usia caprescawapres.

“...Gibran merupakan Wali Kota Solo dan juga keponakan dari Ketua MK Anwar Usman...” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Menurut Entman, framing masalah dimulai ketika media menyoroiti siapa aktor yang bertanggung jawab atas kondisi krisis tertentu (R. M. Entman, 1993) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024). Dalam hal ini, Tempo menempatkan Anwar Usman sebagai figur sentral yang memiliki relasi personal dengan aktor yang diuntungkan dari keputusan tersebut.

Dalam kerangka teori media dan kekuasaan, relasi keluarga seperti ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip netralitas institusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Strömbäck dan (Strömbäck & Van Aelst, 2023), media memiliki kewajiban untuk mengungkap ketika institusi tidak lagi bekerja berdasarkan prinsip impersonal, tetapi diintervensi oleh afiliasi personal dan politik. Tempo menunjukkan bahwa hubungan keluarga tidak dijauhkan dari proses hukum, tetapi justru menjadi bagian yang memengaruhi putusan. Hal ini mempertegas bahwa apa yang tampak sebagai putusan hukum sebenarnya dibentuk oleh jejaring personal yang kuat dan berpotensi melumpuhkan kredibilitas institusi. Narasi konflik kepentingan diperkuat dengan penekanan bahwa Gibran merupakan satu-satunya kandidat yang secara langsung diuntungkan dari putusan MK tersebut. Dengan menyatakan bahwa

“putusan MK membuat peluang Gibran terbuka lebar,” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Tempo menegaskan hubungan antara konflik kepentingan dan hasil politik. Dalam framing Entman, ini menunjukkan penggunaan framing untuk mengarahkan pembaca pada kesimpulan bahwa sistem tidak lagi adil karena digerakkan oleh relasi kekuasaan yang tak kasat mata. Hal ini juga mencerminkan apa yang disebut oleh (Van Aelst et al., 2021) sebagai framing elitis, yaitu ketika institusi negara hanya melayani kepentingan kelompok tertentu dalam lingkaran kekuasaan.

Dengan menempatkan konflik kepentingan sebagai elemen inti dalam framing masalah, Tempo tidak hanya mengkritik satu individu atau satu keputusan, tetapi keseluruhan sistem yang memungkinkan konflik semacam itu terjadi dan dibiarkan. Oleh karena itu, dalam kerangka define problem, Tempo menyoroiti masalah struktural yang membutuhkan perhatian serius dari publik, bukan sekadar reformasi prosedural. Media di sini berperan sebagai opinion shaper, bukan hanya informan, yang bertujuan membangun pemahaman publik bahwa demokrasi hanya akan hidup jika integritas lembaga dipisahkan secara tegas dari jaringan kekuasaan keluarga.

E. Konstruksi Hukum sebagai Alat Legalisasi Dinasti Politik

Tempo secara sistematis membingkai bahwa hukum telah direduksi menjadi alat untuk melegalkan dominasi politik dinasti. Hal ini tergambar dari penyebutan bahwa sebelum adanya putusan MK, Gibran tidak memenuhi syarat usia, namun setelah perubahan norma dengan menambahkan frasa

“Dalam putusannya, MK menambahkan frasa, “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah,” dalam Pasal 169 huruf 1 UU Pemilu,” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Gibran langsung menjadi kandidat potensial. Dalam konteks framing Entman, media sedang menunjukkan bahwa hukum tidak lagi melayani prinsip keadilan universal, tetapi digunakan secara instrumental untuk menguntungkan kelompok tertentu (R. M. Entman, 1993) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024). Dengan demikian, define problem di sini diarahkan pada rekayasa hukum sebagai taktik politik.

Sebagaimana dijelaskan oleh (McNair, 2020), dalam demokrasi modern, hukum adalah salah satu kanal utama yang dapat dipakai untuk memperkuat atau melanggengkan kekuasaan melalui cara yang tampak legal namun problematis secara etis. Tempo menggunakan narasi legalisasi ini untuk menunjukkan bahwa yang sedang terjadi bukanlah reformasi hukum, tetapi manipulasi hukum untuk menciptakan legalitas semu. Dalam hal ini, framing Tempo bertujuan memperlihatkan bahwa produk hukum dapat dibentuk secara cepat dan efisien jika ada kepentingan elite di baliknya sementara kepentingan publik justru diabaikan.

Framing ini juga diperkuat melalui identitas pemohon, yang disebut sebagai anak dari aktivis publik dan saudara dari pemohon kelima.

“....Arkaan Wahyu Re A. Almas dan Arkaan merupakan kakak beradik dan anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.” (Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)

Penyusunan fakta ini mendukung teori bahwa framing tidak hanya dilakukan melalui pemilihan kata, tetapi juga melalui pemilihan struktur naratif dan urutan informasi (Van Aelst et al., 2021). Tempo tidak menyatakan langsung adanya konspirasi, tetapi menyusun fakta-fakta yang menggiring pembaca pada pemahaman bahwa hukum telah dikonstruksi untuk melayani agenda dinasti kekuasaan. Hal ini membuat pembaca mempertanyakan legitimasi sistem hukum yang hanya melayani elit.

F. Dampak Keputusan MK terhadap Kompetisi Demokrasi

Poin terakhir dari framing Tempo adalah bahwa keputusan MK memiliki dampak sistemik terhadap keadilan dalam kompetisi demokrasi. Tempo menyatakan bahwa pencalonan Gibran hanya mungkin terjadi setelah MK mengubah norma usia, dan menyebut bahwa

“Nama Gibran sebelumnya telah disodorkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Sebelumnya, langkah Gibran untuk maju pada Pilpres 2024 terhambat karena masih berusia 36 tahun, atau kurang 4 tahun dari syarat dalam UU Pemilu.” (Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)

Dalam hal ini, media menunjukkan bahwa hukum bukan hanya berdampak individual, tetapi berperan dalam merekayasa struktur politik nasional. Dalam teori Entman, ini merupakan bentuk penegasan bahwa definisi masalah tidak berhenti pada tindakan, tetapi meluas pada konsekuensi sosial dan politik dari tindakan tersebut (R. M. Entman, 1993) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024).

Tempo menggunakan elemen framing ini untuk menunjukkan bahwa perubahan hukum telah menyebabkan ketimpangan struktural dalam arena pemilu. Kandidat lain yang tidak memiliki akses terhadap perubahan hukum akan berada pada posisi yang tidak adil. Hal ini mengingatkan pada gagasan media sebagai pembela kepentingan publik, yaitu bahwa media berperan penting dalam mengungkap distorsi sistemik yang merugikan prinsip kompetisi setara dalam demokrasi (Strömbäck & Van Aelst, 2023). Oleh karena itu, framing Tempo diarahkan untuk menyadarkan publik bahwa demokrasi bisa runtuh bukan karena kudeta, tetapi karena pengaturan hukum yang timpang.

Dengan mbingkai keputusan MK sebagai faktor pembuka jalan bagi satu kandidat, Tempo membentuk persepsi bahwa pemilu mendatang tidak dimulai dari titik yang adil. Dalam framing Entman, ini adalah bentuk define problem yang mengarahkan pemahaman bahwa sistem elektoral sedang dikendalikan oleh elite politik untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Media di sini berperan bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai aktor normatif yang mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan keadilan prosedural dan substantif untuk tetap hidup.

4.3.1.2 Diagnose Causes

A. Intervensi Kekuasaan sebagai Akar Permasalahan Putusan MK

Tempo secara implisit mbingkai bahwa intervensi kekuasaan eksekutif menjadi penyebab utama lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial. Hal ini tercermin dalam kutipan Ujang Komarudin yang menyatakan,

“Putusan MK ini merupakan permainan politik tingkat tinggi. Institusi hukum masih bisa dikendalikan oleh kekuasaan.” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Sebagaimana ditegaskan oleh (R. M. Entman, 1993) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024), media menggunakan fungsi diagnose causes untuk mengaitkan penyebab masalah dengan tindakan atau aktor tertentu, dalam hal ini adalah kekuasaan eksekutif yang menyusupi ranah yudisial. Pernyataan ini berfungsi sebagai pengidentifikasi sebab dalam kerangka Diagnose Causes menurut teori Entman. Peneliti menganalisis masalah tragedi demokrasi yang sebelumnya telah didefinisikan oleh media tidak muncul secara alami, tetapi merupakan produk dari relasi kuasa yang menyusup ke dalam lembaga yudikatif. Dalam sistem demokrasi yang ideal, lembaga hukum harus bebas dari tekanan kekuasaan; namun framing Tempo menunjukkan bahwa prinsip ini telah dilanggar secara sistemik.

Dalam konteks pemberitaan tersebut, Tempo tidak hanya mengutip opini narasumber, tetapi juga secara naratif menyusun bagaimana kekuasaan berperan dalam membentuk hasil putusan. Ketika Tempo menyebut bahwa putusan tersebut menguntungkan “Putra Presiden Joko Widodo” mengutip dari berita

“Dia menuding upaya itu dilakukan untuk meloloskan Putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka,” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

media memperlihatkan bahwa Presiden bukanlah pihak yang netral dalam proses tersebut. Dalam logika framing Entman, penyebab dari masalah dirancang secara sistemik oleh aktor politik yang memiliki kepentingan elektoral, sehingga proses hukum dijadikan alat untuk memuluskan tujuan politik dinasti. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menunjukkan bahwa demokrasi terganggu, tetapi juga siapa yang menyebabkannya dan melalui mekanisme apa.

Tempo juga membingkai bahwa tekanan kekuasaan tidak bersifat kasat mata, tetapi terjadi secara halus dan terselubung melalui jaringan kekeluargaan dan loyalitas institusional. Penyusunan informasi yang menyebutkan bahwa Gibran adalah anak Presiden dan keponakan Ketua MK memperkuat pemahaman bahwa lembaga lembaga kunci negara telah berada dalam orbit kendali satu keluarga. Dalam hal ini, penyebab dari krisis demokrasi bukanlah institusi hukum yang lemah secara struktural, tetapi karena telah ditempatkan dalam posisi yang memungkinkan terjadinya subordinasi terhadap kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, Tempo membentuk framing bahwa intervensi kekuasaan adalah penyebab utama terjadinya distorsi hukum. Lebih lanjut, Tempo menampilkan hubungan sebab-akibat antara keputusan MK dan potensi kemenangan politik dinasti Jokowi. Penyajian narasi bahwa

“Putusan MK tersebut membuat peluang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2024 terbuka lebar. Gibran merupakan Wali Kota Solo dan juga keponakan dari Ketua MK Anwar Usman.” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

memperlihatkan bahwa kekuasaan bukan hanya mempengaruhi lembaga hukum, tetapi juga mendesain hasil politik yang diinginkan. Dalam teori framing Entman, penyusunan narasi semacam ini sangat penting dalam membangun pemahaman publik bahwa sumber masalah demokrasi bukan semata keputusan yang keliru, tetapi adanya kekuatan politik yang secara aktif membajak mekanisme hukum demi mempertahankan kuasa. Dengan demikian, Tempo berhasil memfungsikan elemen Diagnose Causes untuk menjelaskan bahwa kegagalan demokrasi bersumber pada infiltrasi kekuasaan ke dalam ranah yudisial.

B. Konflik Kepentingan dalam Struktur Kekuasaan Yudisial

Tempo juga menempatkan konflik kepentingan sebagai penyebab utama rusaknya integritas putusan Mahkamah Konstitusi. Mengutip (Ritzer & Stepnisky, 2022), media sebagai industri budaya tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga membentuk konstruksi sosial, termasuk dalam hal ini narasi tentang konflik kepentingan dalam lembaga yudikatif. Penyebab ini terlihat dari penekanan bahwa Gibran adalah

“Gibran merupakan Wali Kota Solo dan juga keponakan dari Ketua MK Anwar Usman.”. **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Dalam framing Entman, penyebab masalah tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga personal, yakni ketika individu dalam posisi kekuasaan memiliki relasi langsung terhadap pihak yang diuntungkan dari kebijakan. Tempo menyusun fakta ini untuk menunjukkan bahwa ketidaknetralan keputusan MK bukanlah asumsi, tetapi dibuktikan melalui kedekatan biologis antara pengambil keputusan dan penerima manfaat kebijakan. Ini adalah bentuk eksplorasi sebab yang kuat dalam narasi media.

Penting untuk dicatat bahwa Tempo tidak memberikan justifikasi atau pembelaan terhadap Anwar Usman. Sebaliknya, media menyusun narasi bahwa kedekatan itu bukan hanya etis bermasalah, tetapi juga mengindikasikan celah dalam sistem hukum kita. Ketika mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan tidak berjalan, maka keputusan apa pun yang diambil oleh lembaga tersebut akan kehilangan legitimasi moral dan hukum. Sebagaimana yang dikutip dari

“Ujang mengatakan putusan MK ini merupakan permainan politik tingkat tinggi. Menurutnya, institusi hukum masih bisa dikendalikan oleh kekuasaan.” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Dalam hal ini, Tempo sedang memosisikan konflik kepentingan sebagai faktor penyebab turunnya kredibilitas MK, serta sebagai salah satu bentuk praktik korupsi kekuasaan yang halus namun merusak. Media menjadikan relasi keluarga sebagai pusat penyebab kerusakan sistem hukum, sehingga menguatkan framing masalah demokrasi yang telah dibangun sebelumnya.

Framing konflik kepentingan ini juga diperkuat dengan penjelasan tentang identitas pemohon perkara, yaitu mahasiswa bernama Almas, yang juga merupakan anak dari tokoh yang dekat dengan elite hukum.

“...Mereka menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbiru Re A....” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

“Arkaan Wahyu Re A. Almas dan Arkaan merupakan kakak beradik dan anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Penyajian informasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa bahkan proses pengajuan uji materi pun bukan berasal dari aspirasi rakyat secara luas, tetapi dari pihak-pihak yang memiliki relasi kekuasaan. Hal ini mencerminkan bagaimana pengaruh kekuasaan menyusup dari segala sisi proses hukum, mulai dari siapa yang menggugat hingga siapa yang memutus. Tempo dengan demikian membangun gambaran bahwa konflik kepentingan telah menjelma menjadi modus operandi yang sah secara prosedural, namun cacat secara etis.

Tempo juga tidak menyebutkan adanya tindakan pencegahan dari MK untuk mencegah konflik kepentingan tersebut. Tidak ada pernyataan bahwa Anwar Usman mengundurkan diri atau menolak terlibat dalam pengambilan putusan yang berkaitan dengan keponakannya. Ketidakhadiran narasi tersebut justru memperkuat framing bahwa lembaga yudikatif tidak memiliki mekanisme pengaman yang kuat, atau setidaknya, tidak menjalankannya secara konsisten. Dalam kerangka Diagnose Causes ala Entman, hal ini menunjukkan bahwa kegagalan demokrasi tidak hanya karena aktor, tetapi juga karena absennya sistem kontrol internal yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

C. Rekayasa Proses Hukum Melalui Pemohon yang Dipilih Secara Strategis

Tempo membingkai penyebab permasalahan putusan Mahkamah Konstitusi juga terletak pada siapa yang menjadi pemohon gugatan. Dalam konteks framing media, (Strömbäck & Van Aelst, 2023) menyatakan bahwa media dan aktor politik saling bersaing untuk menentukan interpretasi dominan atas isu politik, termasuk melalui narasi tentang pemohon yang strategis. Dalam berita, disebutkan bahwa

“Sikap MK berubah pada putusan keempat. Mereka menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Mereka menyatakan menerima sebagian putusan tersebut.” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Framing ini sangat signifikan dalam teori Entman karena membangun kesadaran bahwa proses hukum bisa dikendalikan sejak awal oleh pihak-pihak yang memiliki afiliasi atau jejaring tertentu. Almas bukan pemohon biasa. Dia adalah anak dari aktivis publik dan saudara dari pemohon kelima, Arkaan Wahyu Re A. Narasi ini memperlihatkan bahwa pemilihan pemohon pun diduga bukan berlangsung secara netral, melainkan dimanipulasi untuk mencapai putusan tertentu.

Tempo dengan sengaja menyoroti fakta bahwa tiga permohonan sebelumnya ditolak, dan hanya permohonan keempat yang dikabulkan sebagian.

“...Dalam putusan pertama hingga ketiga, MK menyatakan menolak uji materi yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda dan tiga kepala daerah....” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Penempatan kronologis ini penting karena membentuk pemahaman publik bahwa putusan MK tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang lebih kuat, melainkan pada pemohon yang “tepat.” Dengan menekankan keunikan pemohon keempat, Tempo menyusun framing bahwa sistem hukum telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan jejaring kuat di pusat kekuasaan. Dalam kerangka Diagnose Causes, hal ini menandakan bahwa akar masalah bukan hanya pada isi putusan, tetapi juga dalam strategi pengajuan perkara yang dirancang untuk menghasilkan hasil hukum yang diinginkan.

Tempo tidak menyatakan secara eksplisit bahwa Almas merupakan boneka politik, namun narasi yang dibangun mengarah pada anggapan bahwa ia merupakan perantara yang dipilih secara strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, Tempo membingkai bahwa instrumen hukum bisa didesain dari hulu ke hilir oleh kepentingan elite, bahkan ketika wajah yang ditampilkan ke publik adalah mahasiswa atau individu biasa. Dalam teori Entman, ini merupakan perluasan penyebab dari sekadar aktor dalam lembaga hukum menjadi aktor-aktor di sekitar sistem hukum yang bekerja secara koordinatif dan terstruktur. Media berhasil menunjukkan bahwa ketika proses awal hukum telah dirancang sedemikian rupa, maka hasilnya pun tidak dapat dikatakan objektif.

Framing ini juga memperlihatkan bahwa strategi kekuasaan tidak lagi bergantung pada tekanan langsung terhadap lembaga hukum, tetapi melalui desain skenario yang kompleks dan nyaris tak terlihat. Pemilihan pemohon yang tampaknya netral, tetapi memiliki jejaring tertentu, merupakan bentuk kontrol yang sangat sulit dibuktikan secara hukum, namun sangat efektif secara politis. Dalam hal ini, Tempo mengajak pembaca untuk menginterpretasikan realitas hukum secara kritis, bahwa yang tampak di permukaan seringkali tidak mencerminkan siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan arah kebijakan. Dengan menunjukkan bahwa proses hukum bisa dikendalikan dari luar panggung, Tempo membentuk kesadaran bahwa demokrasi tengah dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tak terlihat yang bekerja melalui sistem formal.

D. Dominasi Politik Dinasti sebagai Faktor Penyebab Subversi Demokrasi

Tempo mengarahkan framing penyebab masalah pada dominasi dinasti politik yang kian menguat dalam sistem kekuasaan Indonesia. Disebutkan bahwa

“Putusan MK tersebut membuat peluang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2024 terbuka lebar. Gibran merupakan Wali Kota Solo dan juga keponakan dari Ketua MK Anwar Usman.” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

menunjukkan bahwa keputusan hukum secara langsung menguntungkan keluarga Presiden. Dalam teori Entman, ini adalah bentuk Diagnose Causes yang menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan hasil dari sistem politik yang memberi ruang pada pengaruh kekuasaan keluarga dalam proses formal kenegaraan. Dominasi ini menyebabkan tumpulnya prinsip meritokrasi dan semakin mengaburkan batas antara negara dan keluarga. Tempo menempatkan dinasti politik bukan sebagai gejala sosial biasa, tetapi sebagai kekuatan yang mampu memodifikasi instrumen hukum demi kepentingan ekspansi kekuasaan. Dengan menunjukkan bahwa perubahan pasal dalam UU Pemilu langsung berdampak terhadap status hukum Gibran, Tempo menyusun narasi bahwa lembaga-lembaga negara telah beroperasi bukan untuk publik, melainkan untuk segelintir elite yang memiliki hubungan darah.

“Dalam putusannya, MK menambahkan frasa, “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah,” dalam Pasal 169 huruf 1 UU Pemilu.” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Dalam konteks Diagnose Causes, ini berarti bahwa penyebab kerusakan demokrasi terletak pada menguatnya pengaruh jaringan keluarga dalam mengontrol proses legislasi dan yudikatif.

Framing ini memperlihatkan bahwa keberadaan dinasti politik tidak lagi hanya terbatas pada struktur eksekutif atau legislatif, tetapi juga telah menyusup ke lembagalembaga penegak hukum. Ketika keputusan hukum berpihak kepada kerabat Presiden, maka seluruh sistem pemerintahan telah kehilangan kredibilitas. Tempo membingkai bahwa pengaruh kekuasaan keluarga bukan sekadar masalah politik, tetapi menjadi penyebab fundamental hilangnya fungsi check and balance dalam sistem demokrasi. Ini memperlihatkan bagaimana kerusakan

politik bisa terjadi secara sistemik ketika negara tidak mampu membatasi ruang gerak dominasi keluarga dalam lembaga formal.

Dengan demikian, Tempo berhasil menyusun Diagnose Causes bahwa penguatan dinasti politik tidak hanya berdampak pada rotasi kekuasaan, tetapi juga menciptakan mekanisme manipulasi hukum secara halus namun sistematis. Ketika hukum dibuat, diubah, dan dimanfaatkan untuk mengakomodasi keinginan politik keluarga penguasa, maka demokrasi telah kehilangan substansinya. Dalam logika Entman, media berperan penting untuk menunjukkan bahwa penyebab utama dari krisis ini adalah struktur kekuasaan yang telah dikooptasi oleh hubungan personal dan nepotistik.

4.3.1.3 Make Moral Judgement

A. Putusan MK sebagai Kemunduran Moral Demokrasi

Penilaian moral atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai “tragedi demokrasi” memperlihatkan proses delegitimasi moral terhadap lembaga yang seharusnya menjaga supremasi konstitusi. (R. M. Entman, 1993) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024) menyebutkan bahwa make moral judgement adalah alat framing yang digunakan media untuk memberi penilaian normatif terhadap aktor atau tindakan politik yang menyimpang. Hal ini didukung oleh (Winters, 2020) yang menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya soal prosedur elektoral, tetapi juga menyangkut moralitas dan akuntabilitas kekuasaan. Tempo menggunakan pendekatan ini untuk menilai bahwa lembaga yudikatif yang tunduk pada kekuasaan eksekutif telah kehilangan legitimasi etiknya. Dengan menyebut peristiwa ini sebagai tragedi, Tempo memberikan makna moral bahwa telah terjadi penyimpangan serius dari nilai-nilai demokrasi yang semestinya dijaga oleh lembaga tinggi negara. Tragedi tidak hanya berarti kesalahan, tetapi menyiratkan kerusakan etis dan kegagalan prinsipil yang mendalam.

Penyebutan bahwa Mahkamah Konstitusi “kebobolan” memperkuat framing bahwa lembaga tersebut telah gagal dalam fungsi moral dan institusionalnya. Tempo tidak sekadar menggambarkan MK sebagai institusi yang membuat kesalahan teknis, tetapi sebagai entitas yang secara etik tidak mampu mempertahankan integritas konstitusi.

“Itu tragedi demokrasi yang tidak bagus, kelihatannya MK kebobolan,” kata Ujang Komarudin...”

(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)

Dalam perspektif moral, ini menunjukkan bahwa MK tidak netral, dan bahkan bisa dianggap berkhianat terhadap amanat rakyat dan konstitusi. Penilaian ini sangat penting dalam framing Entman karena membentuk opini publik bahwa pelanggaran ini bukan hanya ilegal, tetapi juga tidak bermoral dalam konteks negara hukum. Tempo juga menyusun penilaian moral terhadap sistem demokrasi yang tercederai akibat putusan tersebut. Demokrasi tidak hanya tentang prosedur pemilu, tetapi lebih dari itu adalah keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak semua warga negara. Ketika putusan hukum justru membuka ruang bagi kekuasaan untuk melanggengkan dinasti, maka Tempo menyatakan secara tersirat bahwa hal tersebut adalah bentuk degradasi nilai moral demokrasi. Dalam logika moral publik, keputusan semacam ini menciptakan ketidaksetaraan, menghilangkan kepercayaan, dan menjadikan demokrasi sekadar formalitas belaka. Oleh karena itu, Tempo menyematkan bobot moral yang berat atas tindakan Mahkamah Konstitusi dalam peristiwa ini.

Penilaian moral Tempo diperkuat dengan konteks waktu dan momentum politik menjelang Pilpres 2024. Tempo menunjukkan bahwa perubahan hukum yang berdampak besar ini dilakukan secara cepat dan tertutup, tanpa keterlibatan publik atau pertimbangan panjang. Dalam etika demokrasi, kebijakan yang mempengaruhi konstelasi kekuasaan tidak boleh diambil dalam ruang-ruang gelap, melainkan harus melalui proses deliberatif yang transparan. Dengan menampilkan aspek ketertutupan dan keberpihakan terhadap aktor tertentu, Tempo secara moral menyalahkan cara keputusan ini diambil dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Dalam hal ini, media menunjukkan bahwa tindakan MK bukan hanya tidak sah secara hukum, tetapi juga cacat secara moral dan etika demokrasi.

B. Penilaian Moral terhadap Konflik Kepentingan Keluarga dalam Proses Hukum

Tempo memberikan penilaian moral yang tajam terhadap relasi keluarga antara Ketua MK Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam berita, disebutkan bahwa Gibran adalah “keponakan dari Ketua MK”, dan putusan MK secara langsung membuka jalur pencalonan dirinya sebagai cawapres.

“Putusan MK tersebut membuat peluang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2024 terbuka lebar. Gibran merupakan Wali Kota Solo dan juga keponakan dari Ketua MK Anwar Usman.” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Dalam framing Entman, ini adalah penilaian moral terhadap ketidakpantasan seseorang dalam posisi pengambil keputusan untuk tetap terlibat dalam perkara yang menyangkut keluarganya sendiri. Tempo tidak menggunakan diksi menyalahkan secara langsung, tetapi narasi yang dibangun mengarah pada pemahaman bahwa konflik kepentingan semacam ini adalah pelanggaran etis berat dalam lembaga hukum. Dalam hal ini, (McNair, 2020) menyatakan bahwa media massa memiliki fungsi utama dalam menyoroti pelanggaran etika publik, karena hal itu berkaitan langsung dengan integritas lembaga demokrasi.

Penilaian moral ini diperkuat dengan diamnya Ketua MK terkait potensi konflik kepentingan tersebut. Tidak ditemukan informasi bahwa Anwar Usman menarik diri atau mendeklarasikan ketidakterlibatan dalam kasus ini. Dalam demokrasi yang sehat, standar moralitas publik menuntut agar pejabat tinggi negara menjaga jarak dari keputusan yang dapat menguntungkan keluarga sendiri. Tempo membingkai bahwa tindakan diam dan tetap aktif dalam putusan tersebut adalah bentuk ketidakpekaan terhadap etika publik. Dalam logika moral Entman, media menggunakan penyusunan fakta untuk menampilkan bahwa tidak hanya keputusan itu salah, tetapi juga aktor pengambil keputusan telah gagal secara etik menjaga marwah institusi. Tempo juga menilai bahwa ketidaktegasan sistem internal MK dalam menangani potensi konflik kepentingan turut mencerminkan kebobrokan moral kelembagaan. Ketika tidak ada sistem pencegahan atau pembatasan yang diberlakukan terhadap hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan, maka hal tersebut tidak hanya menunjukkan celah hukum, tetapi juga lemahnya komitmen moral terhadap keadilan. Framing ini penting karena menunjukkan bahwa kegagalan moral bukan hanya pada individu, tetapi menyebar pada sistem yang membiarkannya terjadi. Tempo mengajak publik untuk melihat bahwa MK tidak lagi menjunjung tinggi prinsip ketakberpihakan yang menjadi nilai dasar keadilan.

Dalam logika penilaian moral, konflik kepentingan yang dibiarkan merajalela di lembaga hukum tertinggi adalah pengkhianatan terhadap prinsip rule of law. Tempo menampilkan bahwa keadilan telah berubah menjadi proyek keluarga, dan hal ini secara moral tidak dapat diterima oleh siapa pun yang menjunjung demokrasi. Media membentuk wacana bahwa pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada logika hukum, tetapi pada relasi darah dan kepentingan politik dinasti. Ini bukan hanya moral, tetapi juga membahayakan masa depan demokrasi Indonesia, yang dibangun atas prinsip pemisahan kekuasaan dan etika dalam bernegara.

C. Moralitas yang Diragukan dalam Strategi Hukum Elitis

Tempo secara eksplisit menilai bahwa penggunaan pemohon uji materi yang “tertentu” sebagai strategi hukum adalah tindakan yang tidak bermoral karena mempermainkan mekanisme hukum untuk tujuan politik sempit. Dalam konteks framing Entman, tindakan menggunakan seorang mahasiswa (Almas) sebagai pemohon, sementara ia memiliki relasi keluarga dengan tokoh publik yang dekat dengan kekuasaan, digambarkan sebagai bentuk manipulasi sistem hukum yang bersifat elitis.

“Mereka menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Mereka menyatakan menerima sebagian putusan tersebut.” **(Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)**

Tempo menyampaikan bahwa permohonan yang dikabulkan berasal dari aktor yang tidak hanya tampak lemah secara politik, tetapi juga memiliki jaringan strategis. Fenomena ini menunjukkan apa yang disebut (Ritzer & Stepnisky, 2022) sebagai bentuk rekayasa hukum dalam sistem yang dikuasai oleh struktur kekuasaan dominan untuk melegitimasi kepentingan elite politik, membentuk persepsi bahwa proses hukum telah direkayasa. Ini menunjukkan bahwa strategi hukum bukan diarahkan untuk keadilan substantif, tetapi untuk menciptakan legitimasi semu bagi ambisi kekuasaan dinasti. Penilaian moral Tempo dalam hal ini menyiratkan kritik terhadap instrumentalitas hukum, yaitu ketika hukum dijadikan alat untuk memanipulasi proses dan bukan sebagai alat keadilan. Tempo tidak menyalahkan Almas secara personal, tetapi framing naratif menunjukkan bahwa ia hanya pion dalam permainan kuasa yang lebih besar. Dalam tatanan moral demokrasi, penggunaan orang-orang yang secara formal tampak netral, tetapi secara fungsional menguntungkan aktor kekuasaan, adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai transparansi dan kejujuran dalam sistem hukum. Tempo melalui narasinya menyatakan bahwa hal ini adalah taktik licik yang merusak legitimasi hukum secara menyeluruh.

Lebih jauh, Tempo memotret bahwa proses hukum yang tidak dilakukan secara terbuka dan deliberatif telah menciptakan kesan bahwa pengambilan keputusan bukanlah hasil dari proses yang adil. Penggunaan pemohon yang tidak mencerminkan aspirasi publik, tetapi berfungsi sebagai “jalan pintas hukum,” menandakan bahwa elite kekuasaan telah membajak jalur yudisial. Dalam nilai moral demokrasi, jalur hukum yang seharusnya dimanfaatkan

oleh semua warga negara secara setara telah menjadi eksklusif milik jaringan politik keluarga. Tempo membingkai bahwa kondisi ini adalah bentuk pelanggaran moral terhadap asas kesetaraan hukum dan prinsip keadilan prosedural.

Dalam sistem demokrasi, moralitas proses jauh lebih penting dibandingkan sekadar legalitas hasil. Tempo menyampaikan bahwa meskipun keputusan MK memiliki kekuatan hukum, ia tetap cacat secara etis jika prosesnya dirancang untuk menyamarkan niat politik yang eksploitatif. Maka, dalam logika moral Entman, Tempo tidak hanya menilai bahwa strategi ini sah secara hukum, tetapi secara moral adalah pengkhianatan terhadap prinsip kejujuran publik. Ini menunjukkan bahwa hukum tanpa etika hanyalah instrumen kekuasaan, bukan fondasi keadilan.

D. Pembiaran Etis oleh Mahkamah Konstitusi

Tempo menyampaikan penilaian moral terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang membiarkan pelanggaran etika terjadi di dalam tubuhnya. Dalam konteks teori Entman, framing media terhadap MK yang tidak melakukan tindakan terhadap potensi konflik kepentingan memperlihatkan bahwa lembaga ini gagal menjalankan tanggung jawab moralnya. Tempo tidak menampilkan adanya mekanisme atau sikap resmi MK untuk mencegah konflik kepentingan Ketua MK, Anwar Usman. Sebagaimana ditegaskan oleh (Strömbäck & Van Aelst, 2023), framing media sangat efektif dalam mengekspos ketiadaan akuntabilitas kelembagaan yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, dalam perkara yang menyangkut keponakannya. Framing ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa MK adalah institusi yang permisif terhadap pelanggaran etika, yang semestinya menjadi garis batas minimum dalam sebuah negara hukum.

Ketika MK memilih untuk tetap memproses permohonan uji materi dan membiarkan keterlibatan Ketua MK dalam perkara yang menguntungkan keluarganya, Tempo menyampaikan bahwa lembaga ini bukan hanya lemah secara hukum, tetapi juga lalai secara moral. Dalam sistem hukum yang sehat, prinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah landasan pengambilan keputusan. Namun Tempo membingkai bahwa prinsip ini tidak diindahkan. Ketika etika dijadikan opsional dalam proses hukum, maka hasil dari proses tersebut tidak bisa dihormati sepenuhnya oleh publik. Oleh karena itu, Tempo menyiratkan bahwa MK secara moral telah gagal menjalankan peran sebagai penjaga etika konstitusi.

Tempo juga membingkai bahwa kebisuan institusional dalam menanggapi kecurigaan publik adalah bentuk keengganan moral untuk bertanggung jawab. Tidak ada pernyataan klarifikasi, pembentukan panel etik, atau evaluasi internal yang dilaporkan dalam berita. Dalam kerangka make moral judgement, sikap pasif ini bukan netralitas, melainkan bentuk pembiaran aktif terhadap krisis etika di dalam lembaga yudikatif. Tempo dengan demikian menilai bahwa MK tidak lagi menjadi penjaga nilai-nilai luhur konstitusi, tetapi telah menjadi bagian dari normalisasi praktik-praktik yang merusak integritas demokrasi.

Penilaian moral Tempo diperkuat dengan konteks bahwa lembaga seperti MK seharusnya menjadi benteng terakhir demokrasi. Jika lembaga ini sudah tidak lagi menunjukkan sikap menjaga martabatnya, maka semua keputusan yang dihasilkan akan kehilangan legitimasi moral. Tempo menunjukkan bahwa bukan hanya aktor individu yang patut disalahkan, tetapi juga sistem kelembagaan yang membiarkan nilai-nilai etika dilanggar. Dalam moralitas publik, sikap membiarkan adalah bentuk lain dari keterlibatan, dan karena itu MK tidak bisa lepas dari tanggung jawab moral atas terjadinya pergeseran prinsip keadilan dalam putusan ini.

E. Legalisasi Kekuasaan sebagai Tindakan Tidak Etis

Tempo membingkai bahwa upaya melegitimasi kekuasaan keluarga Presiden melalui perubahan batas usia capres-cawapres adalah bentuk eksploitasi hukum yang tidak bermoral. Dalam berita, disebutkan bahwa

“Putusan MK tersebut membuat peluang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2024 terbuka lebar. Gibran merupakan Wali Kota Solo.....” (**Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023**)

Tempo menilai bahwa perubahan aturan bukan didasarkan pada pertimbangan universal, tetapi dilakukan demi membuka jalan bagi individu tertentu. Pandangan ini sejalan dengan (Winters, 2020) yang menyatakan bahwa dalam sistem oligarki, kekuasaan kerap menggunakan legalitas sebagai topeng untuk melanggengkan dominasi keluarga penguasa. Dalam kerangka Entman, framing ini menunjukkan bahwa tindakan yang tampaknya sah secara hukum dapat tetap dinilai tidak bermoral karena niat dan dampaknya menyimpang dari nilai keadilan. Legalisasi kekuasaan keluarga melalui rekayasa hukum adalah bentuk perampokan terhadap demokrasi.

Tempo mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa perubahan pasal tersebut terjadi dalam waktu yang sangat tepat yakni menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres yang memperkuat dugaan bahwa perubahan ini disengaja.

“Putusan soal batas usia capres dan cawapres disebut permainan politik tingkat tinggi.” (**Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023**)

Dalam nilai moral publik, rekayasa hukum untuk kepentingan keluarga presiden tidak dapat diterima karena menciptakan ketimpangan dan menghapus esensi persaingan yang adil dalam pemilu. Tempo menyusun narasi yang menyatakan bahwa tindakan ini tidak dilakukan atas dasar kebutuhan publik, tetapi demi melanggengkan kekuasaan. Maka, penilaian moral yang ditawarkan Tempo adalah bahwa proses legal yang terjadi sesungguhnya adalah bentuk moral corruption atau pembusukan nilai keadilan melalui jalan yang sah.

Framing ini memperlihatkan bahwa jika hukum dapat dimodifikasi demi satu aktor tertentu, maka hukum kehilangan makna moralnya sebagai instrumen kesetaraan. Tempo menyampaikan bahwa keadilan tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga niat dan praktik yang mencerminkan semangat konstitusi. Dengan menyajikan fakta bahwa sebelum putusan MK Gibran tidak memenuhi syarat usia, tetapi kemudian menjadi layak hanya karena penyesuaian redaksi hukum, Tempo menyiratkan bahwa hukum telah dijadikan komoditas politik. Dalam konteks moralitas, hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak hanya merusak sistem, tetapi juga mencederai hati nurani publik.

Dengan demikian, penilaian moral Tempo dalam poin ini adalah bahwa tindakan yang tampak legal belum tentu etis. Ketika kekuasaan digunakan untuk mengubah hukum demi kepentingan pribadi atau keluarga, maka yang terjadi adalah legalisasi ketidakadilan. Dalam nilai-nilai demokrasi, kekuasaan harus dibatasi, bukan dilebarkan melalui manipulasi hukum. Tempo dengan framing-nya mengajak pembaca untuk menolak praktik ini karena ia bukan hanya menyimpang dari prinsip hukum, tetapi juga merendahkan martabat konstitusi sebagai simbol keadilan tertinggi negara.

F. Ketiadaan Keterlibatan Publik sebagai Kegagalan Moral Demokrasi

Tempo secara moral mengkritik bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam ruang tertutup tanpa melibatkan publik, dan hal ini merupakan kegagalan moral dalam demokrasi. Tidak ada catatan bahwa putusan ini dikonsultasikan dengan masyarakat sipil, akademisi, atau pakar hukum secara luas. Dalam framing Entman, ketiadaan partisipasi publik dalam keputusan penting menyiratkan bahwa proses demokrasi telah digantikan oleh kesepakatan elite. Hal ini sejalan dengan pendapat (R. M. Entman, 1993) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024) yang menegaskan bahwa dalam framing media, eksklusi terhadap publik dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan kegagalan institusi dalam menjamin prinsip inklusi dan demokrasi deliberatif. Penilaian moral Tempo dalam hal ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tanpa keterlibatan rakyat adalah demokrasi yang kosong dan tidak berjiwa.

Dalam logika moral publik, keputusan hukum harus didasarkan pada diskusi terbuka, transparansi, dan legitimasi sosial. Tempo menyampaikan bahwa tidak ada mekanisme partisipatif dalam pembentukan argumentasi hukum dalam putusan tersebut. Framing ini menggambarkan bahwa hukum hanya ditentukan oleh segelintir orang yang memiliki posisi strategis, bukan sebagai hasil konsensus kolektif warga negara. Dalam sistem yang sehat, moralitas proses hukum tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari cara keputusannya diambil. Tempo menampilkan bahwa dalam kasus ini, prinsip deliberatif demokrasi telah diabaikan secara terang-terangan.

Dengan menunjukkan bahwa keputusan tersebut sangat menguntungkan keluarga penguasa, Tempo memperkuat penilaian bahwa ketidakterlibatan publik bukanlah kelalaian, melainkan strategi. Ketika hukum dibuat dalam kesunyian dan diputuskan untuk mengakomodasi kepentingan satu keluarga, maka keadilan publik telah ditinggalkan. Dalam konteks moral, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Tempo membingkai bahwa kegagalan ini bukan hanya institusional, tetapi menyentuh akar nilai-nilai kebangsaan dan etika publik.

Akhirnya, Tempo menyimpulkan bahwa putusan ini secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ketika suara rakyat tidak hadir dalam proses hukum, maka kekuasaan yang muncul darinya juga tidak sah secara moral. Dalam framing Entman, ini adalah bentuk moral disqualification terhadap proses hukum tersebut. Tempo mengajak publik untuk menyadari bahwa keadilan hanya bisa hidup jika hukum terbuka terhadap partisipasi rakyat. Jika tidak, maka demokrasi hanyalah topeng dari oligarki.

4.3.1.4 Treatment Recommendation

A. Pemulihan Independensi Lembaga Yudikatif sebagai Solusi Utama

Tempo menyiratkan bahwa salah satu rekomendasi penting yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi demokrasi adalah mengembalikan independensi lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditunjukkan melalui kutipan,

“Para hakim MK seharusnya menjadi negarawan.” (Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)

Frasa ini bukan sekadar imbauan, melainkan seruan normatif yang menegaskan perlunya keberanian moral dan integritas tinggi dari para pengambil keputusan di lembaga hukum tertinggi negara. (R. M. Entman, 1993) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024) menyatakan bahwa framing treatment recommendation berfungsi untuk menyarankan solusi konkret yang sesuai dengan akar penyebab masalah sosial yang telah didefinisikan media secara sistematis. Dalam teori framing Entman, treatment recommendation berfungsi untuk menyarankan solusi atas masalah yang telah didefinisikan, dianalisis sebabnya, dan dinilai secara moral. Dalam hal ini, Tempo membingkai bahwa hanya dengan menjunjung tinggi kenegaraan dan independensi, kredibilitas MK dapat dipulihkan.

Media juga menunjukkan bahwa kerusakan yang telah terjadi di Mahkamah Konstitusi bersifat struktural, sehingga tidak cukup diselesaikan dengan teguran personal atau sekadar kritik publik. Tempo menyiratkan perlunya reformasi kelembagaan yang memungkinkan terbangunnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap para hakim konstitusi.

“Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menuding ada desain terstruktur, sistematis, dan masif dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat batas usia capres dan calon wakil presiden.” (Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023)

Menurut (McNair, 2020), fungsi media sebagai kontrol kekuasaan harus mendorong akuntabilitas struktural, terutama pada lembaga negara yang cenderung tertutup terhadap kritik publik. Mekanisme pencegahan terhadap konflik kepentingan, misalnya, harus dibakukan dan ditegakkan secara ketat. Dalam framing ini, rekomendasi bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat institusional dan prosedural, karena problem demokrasi tidak dapat diperbaiki hanya dengan mengganti aktor, tetapi dengan memperbaiki sistem tempat mereka bekerja.

Selain itu, Tempo menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap MK. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan bersifat transparan dan dapat diakses publik. Langkah ini menjadi bagian dari rekomendasi penyelesaian yang berorientasi pada jangka panjang. Tempo secara implisit menyarankan bahwa MK perlu mengadopsi prinsip keterbukaan dalam proses argumentasi hukum, sebagaimana lazim terjadi di negara-negara dengan sistem demokrasi mapan. Keterbukaan bukan hanya meningkatkan legitimasi, tetapi juga menjadi kontrol publik terhadap potensi penyimpangan. Dengan demikian, Tempo merumuskan bahwa penyembuhan terhadap krisis kepercayaan publik terhadap MK hanya dapat dilakukan apabila lembaga ini membersihkan dirinya dari pengaruh kekuasaan politik dan hubungan kekeluargaan. Hakim konstitusi harus bersedia mengambil langkah mundur dari perkara-perkara yang menimbulkan konflik kepentingan, dan menjadikan integritas sebagai fondasi utama pengambilan putusan. Dalam kerangka treatment recommendation teori Entman, rekomendasi ini menjadi bentuk kritik solutif yang diarahkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi melalui pembenahan lembaga hukum sebagai benteng terakhir konstitusi.

B. Penataan Etika Jabatan dan Aturan Anti-Nepotisme

Tempo secara implisit memberikan rekomendasi bahwa perlu ada penataan ulang terhadap etika jabatan, khususnya bagi pejabat publik di lembaga yudikatif, agar tidak terjebak dalam praktik nepotisme. Dalam konteks berita ini, hubungan keluarga antara Ketua MK dan pihak yang diuntungkan dari putusan menjadi masalah etika yang serius. Sebagaimana dikemukakan (Bennett, 2016), media framing sering digunakan untuk membangun persepsi bahwa kekuasaan publik harus dibatasi oleh etika jabatan yang kuat, agar tidak merusak legitimasi hukum. Oleh karena itu, framing Tempo menyiratkan bahwa ke depan harus ada sistem yang melarang keterlibatan hakim dalam perkara yang menyangkut keluarga dekatnya. Ini merupakan bentuk treatment recommendation yang menekankan pentingnya pembentukan standar etika jabatan yang ketat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang mencederai integritas putusan hukum.

Lebih dari itu, rekomendasi ini tidak hanya berlaku untuk MK, tetapi juga bagi seluruh pejabat publik yang memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan kebijakan. Tempo secara naratif membentuk opini bahwa apabila

seseorang berada dalam posisi kekuasaan dan memiliki hubungan personal dengan penerima manfaat dari kebijakan, maka ia wajib untuk mundur atau tidak terlibat dalam proses tersebut. Sejalan dengan

“Para hakim MK seharusnya menjadi negarawan, putusan hanya untuk keluarga Jokowi.” (**Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Disebut Tragedi Demokrasi, 16/10/2023**)

Dalam konteks kenegaraan, ini berarti Indonesia membutuhkan kerangka regulasi anti-nepotisme yang lebih tegas, (McNair, 2020) menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan sistem hukum dan etika yang mampu membatasi akumulasi kekuasaan berbasis relasi personal dalam tubuh negara, bukan hanya dalam bentuk aturan internal, tetapi juga dalam perundang-undangan yang berlaku nasional. Rekomendasi ini penting agar ruang kekuasaan tidak menjadi ruang keluarga.

Tempo juga menyiratkan bahwa perlu ada penguatan lembaga pengawasan etik, baik di internal MK maupun di tingkat nasional seperti Komisi Yudisial. Lembaga pengawasan ini harus diberi kewenangan nyata untuk menindak, memberikan sanksi etik, atau merekomendasikan pemberhentian terhadap hakim yang terlibat dalam konflik kepentingan. Rekomendasi ini penting agar etika jabatan tidak hanya menjadi simbol atau slogan, tetapi benar-benar berfungsi dalam menjaga integritas proses demokrasi. Tanpa sanksi, norma etika hanya akan menjadi formalitas yang mudah dilanggar oleh siapa pun yang memiliki kuasa.

Dengan merekomendasikan sistem pengamanan etik dan penataan jabatan yang lebih ketat, Tempo menunjukkan bahwa demokrasi hanya bisa dijaga jika para pejabat publik dipagari oleh tanggung jawab moral yang jelas dan mekanisme kontrol yang kuat. Dalam konteks framing Entman, ini menjadi solusi konkret yang berangkat dari pemahaman bahwa problem demokrasi Indonesia terletak pada longgarnya sistem kontrol terhadap konflik kepentingan. Oleh karena itu, pembenahan etika jabatan bukan hanya soal moralitas individu, tetapi juga instrumen untuk menjaga kesehatan institusi publik dalam jangka panjang.

4.3.2 Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga

4.3.2.1 Define Problem

A. Jokowi Bermanuver untuk Perpanjangan Masa Jabatan dan Memupuk Dinasti Politik

Dalam perspektif teori framing oleh Robert N. Entman, elemen define problem digunakan media untuk menyoroti suatu kondisi sebagai masalah publik yang patut diperhatikan. Tempo membingkai langkah Presiden Joko Widodo dalam memperpanjang masa jabatannya dan mendorong keterlibatan anggota keluarganya dalam kontestasi politik sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi. Framing ini ditunjukkan sejak paragraf awal melalui pernyataan yang sangat tegas

“Jokowi bermanuver agar perpanjangan masa jabatan presiden bisa berjalan. Memberi karpet merah untuk dinasti politiknya.” (**Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024**)

Kalimat ini langsung menegaskan bahwa Tempo tidak sekadar melaporkan tindakan politik Jokowi, tetapi mengidentifikasinya sebagai manuver politik yang dipandang bermasalah. Framing seperti ini bertujuan untuk mengarahkan opini publik agar memahami tindakan tersebut bukan sebagai hak politik semata, melainkan sebagai potensi pelanggaran etika politik dan ancaman terhadap mekanisme demokratis. “Define problem menjadi cara media untuk mengidentifikasi suatu isu sebagai masalah politik, moral, atau sosial yang membutuhkan perhatian publik” (R. M. Entman, 1993) dalam (Rahayu & Setiawan, 2024)

Dalam berita tersebut, terlihat bahwa upaya memperpanjang masa jabatan presiden tidak dilakukan secara terbuka melalui saluran formal, melainkan melalui pendekatan informal dan terselubung. Jokowi disebut meminta Andi Widjajanto membuat kajian strategis mengenai kemungkinan tiga periode kekuasaan dengan berbagai skenario yang bisa ditempuh. Fakta bahwa proses penyusunan kajian dilakukan di luar institusi resmi pemerintahan, yakni di rumah pribadi di kawasan Cilangkap, semakin memperkuat framing masalah sebagai sesuatu yang disembunyikan dari publik.

“...Di kompleks milik keluarga Andi Widjajanto yang juga markas Lab 45-singkatan dari Laboratorium Indonesia 2045 – sejumlah peneliti bekerja...” (**Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024**)

Dalam konteks framing Entman, media mengkonstruksi peristiwa ini sebagai penyimpangan dari norma konstitusional, di mana kekuasaan seharusnya dibatasi oleh masa jabatan yang sudah diatur dalam undang-undang, bukan diakali dengan narasi kedaruratan atau amandemen tersembunyi.

Lebih jauh lagi, Tempo menunjukkan bahwa penyusunan skenario perpanjangan masa jabatan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menjaga kesinambungan kekuasaan yang terpusat pada keluarga Jokowi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan tentang “tujuh variasi cara untuk memuluskan berbagai skenario”, dalam kutipan berita “Kajian Lab 45 merumuskan tujuh variasi cara untuk memuluskan berbagai skenario itu.” **(Cara Jokowi**

Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)

termasuk melobi DPR dan MPR untuk mendukung amandemen konstitusi. Dengan menempatkan informasi tersebut dalam struktur naratif yang menunjukkan kerahasiaan dan tertutupan, Tempo berhasil mengonstruksi masalah sebagai bentuk manipulasi terhadap sistem politik. Framing ini mengarahkan pembaca pada pemahaman bahwa tindakan tersebut berpotensi merusak prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem demokrasi.

Dalam membingkai masalah tersebut, Tempo juga menyertakan aktor-aktor kunci yang terlibat, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan elit partai politik, yang disebut ikut menyuarakan narasi penundaan pemilu dengan berbagai alasan. Namun, Tempo tidak begitu saja menerima klaim yang diajukan aktor-aktor tersebut, seperti klaim Luhut tentang big data masyarakat yang mendukung penundaan. Alih-alih memperkuat legitimasi, media ini justru membingkai penggunaan data tersebut sebagai alat pembenaran semu yang tidak akuntabel.

“Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga mewacanakan penundaan pemilu pada Februari-Maret 2022...” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Hal ini mempertegas bagaimana media membangun problem definition dengan menggambarkan upaya sistematis dan terstruktur yang menyimpang dari prinsip demokrasi partisipatif. Sebagai hasilnya, pembaca diarahkan untuk melihat masalah ini bukan hanya sebagai agenda politik personal, melainkan ancaman sistemik terhadap integritas pemilu.

B. Konsolidasi Politik Keluarga Lewat Pemanfaatan Kekuatan Negara

Elemen define problem dalam framing juga terlihat dalam cara Tempo membingkai bagaimana Jokowi mengerahkan sumber daya kekuasaan negara untuk mengamankan posisi politik keluarganya. Salah satu contoh paling mencolok adalah ketika Jokowi mengintervensi proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo, dengan mengundang Achmad Purnomo ke Istana Negara dan memberi sinyal agar mundur melalui tawaran posisi komisaris BUMN. Sejalan dengan kutipan berita

“Lima bulan sebelum pemilihan wali kota berlangsung, atau pada Juli 2020, Jokowi mengundang Purnomo ke Istana. Berbincang empat mata sembari makan siang, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran berniat maju sebagai wali kota. Memberi kode agar Purnomo mundur, Jokowi meminta kolega bisnisnya semasa di Solo itu menjadi komisaris badan usaha milik negara.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam konteks framing ala Entman, tindakan ini dibingkai sebagai penyimpangan serius terhadap prosedur demokrasi dan prinsip meritokrasi. Alih-alih membiarkan proses pencalonan berlangsung secara alami berdasarkan dukungan kader dan masyarakat, Jokowi disebut Tempo menggunakan kedudukannya untuk mengintervensi proses internal partai.

Tempo tidak hanya membingkai tindakan Jokowi sebagai bentuk intervensi personal, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan struktural digunakan secara sistematis. Misalnya, dengan melibatkan PDIP pusat untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap Gibran, Jokowi memperlihatkan kemampuan menggerakkan keputusan partai demi kepentingan keluarganya. Hal ini kemudian dikuatkan dengan fakta bahwa Jokowi melakukan lobi kepada Megawati Soekarnoputri agar merestui pencalonan Gibran.

“Berupaya mendapatkan tiket untuk Gibran, Jokowi datang ke rumah Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat. Tiga petinggi PDIP yang mengetahui isi pertemuan itu mengatakan bahwa Jokowi meminta Megawati mengeluarkan rekomendasi untuk Gibran. Permintaan itu disetujui oleh Megawati.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Framing ini memperjelas bahwa media melihat praktik tersebut bukan sebagai dinamika biasa dalam politik, tetapi sebagai bentuk privatisasi kekuasaan di mana otoritas publik digunakan untuk keuntungan keluarga. Menurut Winters (2020), oligarki adalah bentuk kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir elite yang mampu memanipulasi institusi demi kepentingan mereka sendiri.

Tempo juga menyoroti bahwa manuver tersebut tidak berhenti pada Solo. Bobby Nasution dan Wahyu Purwanto menantu dan ipar Presiden juga ikut masuk gelanggang Pilkada dengan dukungan politik serupa.

Penyebutan bahwa Jokowi “langsung menyuruh Wahyu mundur” setelah sorotan publik menguat menunjukkan bagaimana framing problem diarahkan pada kontrol Jokowi terhadap distribusi kekuasaan bahkan dalam lingkup keluarga.

“....Bekas Gubernur Jakarta itu langsung menyuruh Wahyu mundur dari pencalonan. Jokowi menyatakan hanya mendukung Gibran dan Bobby.....” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam konteks Entman, media menjadikan ini sebagai tanda bahwa terdapat kekhawatiran terhadap konsolidasi kekuasaan yang bersifat oligarkis, dan hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi.

Selain menggunakan instrumen politik, laporan Tempo juga menegaskan bagaimana aparat negara ikut dilibatkan dalam pemenangan politik keluarga Jokowi. Lurah yang diiming-imingi uang untuk mendukung calon tertentu menjadi simbol penyalahgunaan kekuasaan struktural.

“....Para lurah diiming-imingi duit Rp 50 ribu untuk setiap suara warga di wilayahnya yang mendukung Bobby. Elite partai di tingkat nasional juga turun gunung memenangkan keduanya...” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Framing ini menunjukkan bahwa problem utama bukan hanya soal pencalonan keluarga, tetapi soal normalisasi penyimpangan dalam birokrasi negara. Dengan menempatkan semua elemen tersebut secara terpadu, Tempo memperkuat define problem bahwa pemerintahan Jokowi telah bergerak ke arah yang berbahaya: mengaburkan batas antara kekuasaan publik dan kepentingan pribadi.

C. Strategi Politik Gibran Dari Wali Kota Solo hingga Cawapres

Tempo membingkai persoalan naiknya Gibran dari Wali Kota Solo ke panggung nasional sebagai calon wakil presiden bukan sebagai proses politik yang alami, tetapi sebagai hasil dari rekayasa politik kekuasaan. Dalam konstruksi define problem, media ini menggambarkan bahwa langkah Gibran ke jenjang yang lebih tinggi tidak didasarkan pada kinerja politik yang mumpuni, melainkan hasil orkestrasi kekuatan negara oleh sang ayah. Misalnya, disebut bahwa Jokowi mengirim Devid Yunanto bekas ajudannya untuk menghimpun dukungan relawan bagi Gibran, yang menunjukkan bahwa jaringan kekuasaan digunakan untuk mengatur panggung politik bagi anak presiden.

“...Dua kolega Jokowi di Solo mengungkapkan, Presiden mengirim orang kepercayaan, Devid Yunanto, membantu Gibran. Devid, bekas ajudan Jokowi, menghimpun dukungan relawan. Devid enggan berkomentar saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Framing ini memperkuat gagasan bahwa proses regenerasi politik telah digantikan oleh sistem pewarisan dinasti, yang merupakan masalah serius dalam demokrasi modern. Lebih lanjut, Tempo mencatat bagaimana Gibran tidak hanya memperoleh dukungan politik, tetapi juga menikmati keistimewaan logistik dan fasilitas negara. Dukungan dari para menteri, kemudahan akses terhadap struktur kekuasaan, hingga kedekatan dengan tokoh-tokoh partai menempatkan Gibran dalam posisi yang jauh lebih unggul dibandingkan pesaing politiknya. Hal ini diperkuat dengan narasi tentang

“....Dua narasumber yang dekat dengan keluarga Jokowi serta terlibat dalam pencarian lawan boneka pun bercerita, Presiden ingin kemenangan Gibran lebih sah.....” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

untuk Gibran di Pilkada Solo agar kemenangan putra presiden tampak sah. Narasi ini memperlihatkan bahwa framing masalah tidak berhenti pada pencalonan Gibran, melainkan pada upaya sistematis untuk menciptakan legitimasi semu atas kekuasaan yang telah diatur sebelumnya. Dalam konteks framing Entman, ini merupakan contoh klasik dari bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap penyalahgunaan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Framing adalah proses seleksi aspek realitas tertentu untuk ditegaskan dalam narasi sehingga dapat membentuk persepsi publik mengenai suatu isu politik (Entman, 1993 dalam Rahayu & Setiawan, 2024).

Masalah semakin menguat ketika pencalonan Gibran sebagai wakil presiden muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial tentang batas usia capres-cawapres. Tempo menyisipkan informasi bahwa sidang MK tersebut dipimpin oleh Anwar Usman adik ipar Presiden yang membingkai praktik ini sebagai pengaturan hukum yang sarat konflik kepentingan.

“...Publik menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Sidang MK yang kala itu dipimpin Anwar Usman-adik ipar Jokowi-memutuskan mengabulkan gugatan usia minimal.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Di sinilah fungsi define problem menjadi sangat penting: media ingin memperjelas kepada publik bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan politik, tetapi integritas konstitusional. Dengan menghadirkan narasi ini secara runtut, Tempo membangun logika bahwa kenaikan Gibran ke panggung nasional bukanlah hasil dari proses demokrasi yang sehat, melainkan buah dari praktik kekuasaan yang eksekutif dan manipulatif.

Framing masalah yang dibangun Tempo tidak hanya mengarah pada Gibran, tetapi juga pada keterlibatan Jokowi dalam menyusun formasi capres-cawapres. Tempo menuliskan bahwa Jokowi awalnya menjodohkan Prabowo dengan Ganjar, kemudian mengalihkan dukungan penuh kepada Prabowo setelah Ganjar diusung PDIP. Dalam analisis framing Entman, media tidak hanya menyoroti siapa yang maju dalam kontestasi politik, tetapi bagaimana proses pengambilan keputusan itu berlangsung. Ketika keputusan tersebut tidak transparan, tidak demokratis, dan disusun melalui pertemuan rahasia, maka media membingkainya sebagai bentuk distorsi terhadap demokrasi representatif. Oleh karena itu, masalah yang diangkat tidak hanya soal nepotisme, tetapi juga tentang pembusukan etika dalam sistem demokrasi Indonesia.

D. Penggunaan Instrumen Negara dalam Mendukung Dinasti

Salah satu titik krusial dalam framing define problem yang dibangun Tempo adalah penggunaan instrumen negara untuk memperkuat posisi politik keluarga Jokowi. Tempo menyebut bahwa proyek-proyek strategis nasional, bantuan sosial, dan dana CSR BUMN banyak mengalir ke daerah-daerah yang dipimpin Gibran dan Bobby. Dalam perspektif framing ala Entman, media ini secara sadar membingkai aliran dana tersebut sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan berbasis hubungan keluarga, bukan kebutuhan publik. Oligarki dalam konteks Indonesia bekerja melalui jaringan keluarga dan pemanfaatan kekuasaan negara untuk mempertahankan dominasi politik (Winters, 2020). Hal ini bertolak belakang dengan prinsip kesetaraan dalam distribusi anggaran negara yang menjadi pilar utama dalam demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang adil.

Tempo tidak hanya menuliskan fakta aliran bantuan dan proyek, tetapi juga menyertakan testimoni dari para pejabat dan narasumber internal yang memperkuat framing masalah. Misalnya, Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengakui bahwa komunikasi dengan BUMN adalah

“Wali Kota Solo Teguh Prakosa tak menampik kabar bahwa bantuan sejumlah BUMN merambah ke kotanya. “Soal komunikasi dengan BUMN, para menteri, itu urusan Mas Gibran. Kami telah berbagi tugas,” ujar Teguh di Solo, Senin, 15 Juli 2024.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

yang memberi kesan bahwa ada jalur khusus antara pemimpin daerah dan pusat kekuasaan. Dengan mengangkat kutipan ini, Tempo menyusun narasi bahwa kekuasaan digunakan secara terpusat dan tidak merata. Ini bukan hanya tentang proyek pembangunan, tetapi tentang penggunaan sumber daya negara untuk memperkuat basis kekuasaan politik dinasti. Dalam framing Entman, hal ini memperjelas bahwa persoalan yang sedang diangkat bersifat struktural, bukan insidental. Lebih lanjut, framing ini diperkuat dengan laporan bahwa menteri-menteri Jokowi sering bolak-balik mengunjungi Solo dan Medan lebih dari wilayah lain. Dalam konteks pemerataan pembangunan, hal ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk keberpihakan kekuasaan terhadap keluarga presiden.

“Empat orang dekat keluarga Jokowi di Solo bercerita, sepanjang Gibran menjadi wali kota, sejumlah menteri Jokowi bolak-balik bertandang....” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dengan demikian, Tempo ingin menunjukkan bahwa persoalan bukan terletak pada pembangunan itu sendiri, melainkan pada intensi di baliknya. Jika pembangunan dilakukan atas dasar kepentingan elektoral keluarga presiden, maka terjadi bias dalam kebijakan publik yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi deliberatif. Framing ini menyoroti publik agar sadar bahwa dinasti politik berpotensi membajak fungsi negara untuk kepentingan pribadi.

Yang membuat framing ini semakin kuat adalah ketika Tempo menyertakan penolakan atau pembelaan dari pihak pemerintah, seperti Budi Arie Setiadi yang mengatakan bahwa proyek-proyek itu telah “melalui proses yang transparan.” Namun Tempo justru membandingkan klaim tersebut dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan sebaliknya.

“...Budi Arie Setiadi mengklaim semua proyek telah melalui proses yang transparan dan sesuai dengan prosedur....” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam teori Entman, penempatan kontras ini merupakan strategi framing yang efektif untuk menyoroti persoalan: ketika pernyataan resmi tidak sejalan dengan kenyataan, maka publik diarahkan untuk meragukan kredibilitas institusi negara. Oleh karena itu, framing masalah tidak hanya ditujukan pada individu, tetapi juga pada struktur pemerintahan yang menjadi instrumen dinasti politik.

E. Normalisasi Politik Dinasti Lewat Simbol, Wacana, dan Pernyataan Resmi

Tempo juga membingkai upaya Jokowi membangun dinasti politik melalui permainan simbolik dan wacana publik sebagai bagian dari strategi normalisasi. Pernyataan seperti “Orang tua hanya mendoakan anak” yang dikutip dari narasi berita

“Jokowi dan Iriana pun mendukung Gibran maju sebagai calon wakil presiden meski tak pernah blakblakan menyampaikannya.” “Orang tua hanya mendoakan anak,” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

menjadi salah satu bentuk pembingkai simbolis yang tampak pasif tetapi bermakna strategis. Dalam teori Entman, framing define problem tidak hanya dibentuk oleh peristiwa besar, tetapi juga melalui ujaran dan narasi yang mempengaruhi cara masyarakat menafsirkan realitas politik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Entman, 1993 dalam Rahayu & Setiawan, 2024) Framing dapat terbentuk melalui pengulangan simbolik, bahasa, dan wacana yang digunakan elite untuk membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa atau kebijakan. Dalam konteks ini, Tempo menyusun fakta bahwa Jokowi berusaha memosisikan diri seolah tidak aktif dalam mendorong pencalonan Gibran, meskipun data dan tindakan politik menunjukkan sebaliknya.

Normalisasi praktik dinasti juga dibangun melalui pembungkaman kritik terhadap proses tersebut. Misalnya, ketika masyarakat mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Anwar Usman, Jokowi disebut mencoba menunda pengumuman pencalonan Gibran karena membaca sentimen negatif publik. Dalam logika framing, hal ini merupakan bagian dari kontrol persepsi di mana pemerintah tidak membatalkan keputusan, tetapi hanya mengatur momen pengumumannya. Tempo membingkai tindakan ini sebagai bentuk manipulasi komunikasi politik yang berbahaya karena mengaburkan proses sebenarnya. Alih-alih transparan, kekuasaan menjadi semakin personal dan berbasis kalkulasi popularitas.

Wacana yang dibangun oleh tokoh-tokoh seperti Luhut Pandjaitan dengan klaim “big data” sebagaimana yang dikutip pada pemberitaan Cara Jokowi Menjaga untuk Istana

“Mengaku punya big data, Luhut mengklaim mayoritas penduduk negeri ini menginginkan penundaan Pemilu 2024. Ia mengklaim datanya valid. “Ya, pasti (valid), lah, masak bohong?” kata Luhut pada Maret 2022.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

juga menjadi bagian dari strategi pembentukan persepsi publik yang dimasukkan Tempo ke dalam kerangka masalah. Dengan menghadirkan narasi bahwa “mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu”, Luhut menciptakan ilusi legitimasi. Namun Tempo membongkar bahwa data tersebut juga menunjukkan 30 persen penolakan dan potensi konflik sosial yang tidak pernah disampaikan ke publik. Dalam framing Entman, media menggarisbawahi adanya distorsi informasi yang digunakan untuk membentuk opini publik demi mendukung agenda politik penguasa. Oleh karena itu, framing ini memperluas definisi masalah dari sekadar dinasti politik menjadi problem disinformasi yang dikendalikan oleh kekuasaan.

F. Penguatan Keluarga Melalui Koneksi Budaya dan Sosial

Tempo juga membingkai upaya penguatan dinasti Jokowi melalui jalur sosialbudaya, seperti penggunaan Pendapa Pura Mangkunegaran untuk pernikahan Kaesang Pangarep. Meskipun pada permukaan ini tampak sebagai kegiatan privat, media justru membingkainya sebagai bagian dari pola konsolidasi kekuasaan melalui simbol budaya.

“...Ada keinginan Jokowi menggunakan pendapa Pura Mangkunegaran sebagai tempat resepsi pernikahan anak bungsunya, Kaesang Pangarep.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam framing Entman, ini merupakan bentuk define problem yang berfokus pada cara kekuasaan mereproduksi dominasi tidak hanya melalui struktur formal seperti partai politik dan hukum, tetapi juga melalui simbol-simbol tradisional dan sosial. Ketika Jokowi disebut melobi Gusti Bhre agar diizinkan menggunakan Pendapa, framing ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa kekuasaan kini menjangkau hingga ke ruang privat dan adat.

Masalah semakin tampak ketika disebut bahwa renovasi keraton tersebut diduga menjadi bagian dari barter antara negara dan keluarga Jokowi. Tempo menampilkan narasumber internal Mangkunegaran yang menyatakan bahwa tidak pernah ada pihak luar menggunakan Pendapa untuk acara pribadi.

“...Menurut seorang narasumber, belum ada pihak yang bukan keturunan Mangkunegaran menggunakan pendapa untuk pernikahan...” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dengan menghadirkan narasi ini, Tempo mengarahkan pembaca pada pemahaman bahwa terjadi pelemahan batas antara ruang publik, ruang privat, dan kekuasaan negara. Framing masalah tidak lagi hanya berkutat pada politik elektoral, tetapi juga pada bagaimana kekuasaan menormalisasi privilese dan menjadikannya hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat.

Tempo juga mencatat bahwa proyek revitalisasi keraton disebut sebagai bagian dari kolaborasi budaya. Namun dalam logika framing Entman, justru penyertaan narasi tersebut menjadi strategi media untuk menunjukkan bahwa klaim pemerintah selalu bersifat defensif ketika berhadapan dengan isu-isu yang menyangkut keluarga presiden. Oleh karena itu, Tempo tidak membantah secara langsung, tetapi menyusun bukti dan konteks naratif yang menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut tidak netral. Dalam hal ini, framing problem yang dibangun adalah bahwa kekuasaan politik telah meluas hingga ke wilayah budaya, menjadikan ruang-ruang simbolik sebagai alat memperkuat hegemoni dinasti. Dalam framing, media memiliki peran penting dalam membentuk makna sosial melalui penekanan simbol, narasi budaya, dan representasi visual tertentu (Entman, 1993 dalam Rahayu & Setiawan, 2024).

4.3.2.2 Diagnose Causes

A. Strategi Sistematis untuk Memperpanjang Kekuasaan

Dalam kerangka teori Robert N. Entman, elemen diagnose causes bertujuan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas masalah yang telah didefinisikan. Tempo secara eksplisit menunjuk Presiden Joko Widodo sebagai aktor utama di balik skenario perpanjangan masa jabatan. Dalam laporan tersebut, Tempo menyebut bahwa

“.....Jokowi memanggilnya di ruang tengah Istana Negara. Jokowi meminta Andi membuat kajian tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Andi diberi waktu tiga bulan.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Fakta bahwa kajian ini diminta langsung oleh Jokowi menunjukkan bahwa inisiatif berasal dari dirinya, bukan dari wacana publik atau dorongan legislatif. Dengan demikian, media membingkai Jokowi sebagai sumber penyebab utama dari masalah konsolidasi kekuasaan yang dibahas dalam berita. Tidak hanya menunjukkan pelibatan langsung Jokowi, Tempo juga menjelaskan bagaimana proses kajian dilakukan secara tertutup dan di luar struktur pemerintahan resmi. Lokasi penyusunan kajian yang disebut berada di rumah pribadi milik keluarga Andi Widjajanto, sebagaimana yang dikutip dari berita

“.....Di kompleks milik keluarga Andi Widjajanto yang juga markas Lab 45- singkatan dari Laboratorium Indonesia 2045 – sejumlah peneliti bekerja.....” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

serta tidak adanya keterlibatan lembaga negara secara formal, memperkuat framing bahwa proses tersebut bersifat rahasia. Ini mengarah pada diagnosis bahwa akar masalah terletak pada praktik kekuasaan yang tidak transparan dan menutup ruang partisipasi publik. Dalam perspektif framing Entman, penyampaian informasi semacam ini membantu publik memahami bahwa krisis demokrasi tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perencanaan strategis oleh elit kekuasaan.

Lebih lanjut, Tempo menjelaskan adanya tiga skenario perpanjangan masa jabatan melalui alasan darurat pandemi, amendemen terbatas, dan dekret presiden yang semuanya disiapkan secara sistematis. Dengan menyebut skenario-skenario ini sebagai hasil kajian dari “Lab 45” yang diberi tenggat waktu tiga bulan,

“....Jokowi meminta Andi membuat kajian tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Andi diberi waktu tiga bulan.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

media memperkuat framing bahwa proses penyebab masalah melibatkan struktur elite yang terorganisir. Dalam analisis framing Entman, hal ini menggambarkan bahwa bukan hanya tindakan Jokowi sebagai individu yang menjadi penyebab, tetapi juga keberadaan jaringan kekuasaan yang bekerja secara simultan dan kolaboratif. Artinya, masalah bukan sekadar kesalahan perseorangan, tetapi bagian dari skema politik yang luas dan terencana.

Tempo juga menunjukkan bahwa upaya ini mendapat dukungan dari figur-figur penting di pemerintahan dan partai politik. Disebutkan bahwa Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi penghubung kepada petinggi partai di DPR.

“....Jokowi mengirim orang-orang dekatnya untuk melobi para petinggi partai politik. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo beberapa kali berbincang dengan petinggi partai di DPR.”

(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)

Keterlibatan tokoh-tokoh negara dalam menjalankan lobi politik menunjukkan bahwa penyebab masalah tidak berhenti pada satu orang, tetapi merupakan bentuk keterlibatan kolektif dalam struktur pemerintahan. Dalam kerangka diagnose causes, ini memperjelas bahwa terdapat penyalahgunaan institusi negara untuk memenuhi agenda pribadi, yang pada akhirnya menyebabkan distorsi sistem demokrasi. Tempo mengarahkan pembaca untuk menyadari bahwa ketika lembaga-lembaga negara tunduk pada keinginan eksekutif, maka check and balance tidak lagi berjalan.

B. Keterlibatan Aktif Jokowi dalam Pengaturan Pencalonan Keluarga

Pada poin kedua, Tempo menyuguhkan bukti kuat bahwa Presiden Jokowi secara aktif terlibat dalam proses pengaturan pencalonan keluarganya untuk menduduki jabatan strategis, yang dalam kerangka Entman menjadi titik

utama dari diagnose causes. Salah satu narasi penting adalah undangan Presiden kepada Achmad Purnomo ke Istana Negara, di mana secara pribadi Jokowi menyampaikan bahwa Gibran ingin maju sebagai Wali Kota Solo dan memberi tawaran jabatan komisaris sebagai kompensasi.

“...Jokowi mengundang Purnomo ke Istana. Berbincang empat mata sembari makan siang, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran berniat maju sebagai wali kota...” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Tindakan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Jokowi tidak hanya menyetujui pencalonan anaknya, tetapi juga mengatur jalannya proses politik di level lokal. Tempo menggunakan kutipan seperti “Memberi kode agar Purnomo mundur, Jokowi menawarkan posisi komisaris BUMN” untuk menegaskan bahwa praktik patronase dan intervensi langsung berasal dari Presiden sendiri, dalam kutipan berita

“Lima bulan sebelum pemilihan wali kota berlangsung, atau pada Juli 2020, Jokowi mengundang Purnomo ke Istana. Berbincang empat mata sembari makan siang, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran berniat maju sebagai wali kota. Memberi kode agar Purnomo mundur, Jokowi meminta kolega bisnisnya semasa di Solo itu menjadi komisaris badan usaha milik negara.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Diagnosis penyebab diperkuat dengan keberadaan langkah-langkah lanjutan seperti lobi kepada Megawati Soekarnoputri agar Gibran mendapat rekomendasi dari PDIP. Narasi ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak bertindak sendirian, melainkan mengandalkan jejaring politik yang luas, termasuk pengaruh dalam partai politik. Seorang petinggi PDIP menyebutkan bahwa Jokowi “lebih dari sekali menggelar rapat dengan Hastu Kristiyanto”, dikutip dari berita,

“Amendemen terbatas digadang-gadang menjadi gerbang masuk Jokowi memperpanjang masa jabatan. Seorang petinggi partai banteng menuturkan, Jokowi lebih dari sekali menggelar rapat dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hastu Kristiyanto untuk membahas amendemen.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

yang menandakan adanya intensi kuat dan berulang dalam memuluskan agenda pencalonan Gibran. Dengan membingkai fakta ini secara berlapis, Tempo mengarahkan pembaca untuk melihat Jokowi sebagai aktor sentral yang mengatur konfigurasi politik berdasarkan pertimbangan keluarga, bukan kepentingan publik atau meritokrasi.

Selain itu, Tempo juga menyingkap bagaimana Jokowi menggunakan pengaruh dalam jaringan kekuasaan lokal, termasuk aparat kepolisian, untuk menjembatani komunikasi antara dirinya dan tokoh-tokoh lokal seperti F.X. Rudy.

“...Ketua DPC PDIP Solo Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo atau F.X. Rudy pun telah menekan surat keputusan pengurus cabang untuk Purnomo.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam framing diagnose causes, peran aktor negara seperti aparat keamanan dalam menyelesaikan urusan politik keluarga menunjukkan bahwa institusi netral telah dibajak demi kepentingan personal. Tempo tidak hanya menyebut tindakan ini sebagai fakta, tetapi juga memberikan implikasi serius bahwa sistem pemerintahan telah mengalami pergeseran fungsi: dari pelayan publik menjadi alat kekuasaan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab dari krisis demokrasi yang diangkat Tempo bersifat sistemik, bukan insidental.

Pada akhirnya, diagnosis Tempo memperjelas bahwa penyebab utama dari munculnya masalah dinasti politik adalah keterlibatan aktif Jokowi dalam mengatur jalannya kontestasi politik keluarganya, baik melalui struktur partai maupun aparatur negara. Media tidak sekadar menyalahkan kondisi sistemik atau kekosongan regulasi, tetapi secara spesifik menyoroti bagaimana Jokowi sebagai kepala negara menyalahgunakan wewenangnya. Dalam perspektif Entman, ini merupakan bentuk framing blame yang diarahkan kepada sumber kekuasaan tertinggi di negara ini, dengan harapan publik dapat memahami akar dari krisis yang sedang berlangsung.

C. Pengangkatan Gibran sebagai Cawapres dalam Rangkaian Intervensi Politik Terstruktur

Tempo secara tegas membingkai bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden bukanlah hasil dari proses politik yang organik, melainkan sebagai kelanjutan dari intervensi yang dilakukan Jokowi untuk mengamankan posisi strategis bagi keluarganya. Dalam konteks diagnose causes menurut Robert N. Entman, media tidak hanya menyajikan fakta pencalonan, tetapi juga menelusuri aktor utama di balik munculnya nama Gibran. Jokowi disebut secara aktif menjodohkan tokoh-tokoh politik seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dan kemudian memfokuskan dukungan kepada Prabowo setelah PDIP menetapkan Ganjar sebagai capres. Dalam kutipan berita

“Sedangkan untuk pemilihan presiden 2024, Jokowi mulanya menjodohkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Meski tak pernah terang-terangan, perjodohan itu kentara ketika Jokowi mempertemukan Prabowo-Ganjar di pematang sawah di Kebumen, Jawa Tengah, Maret 2023.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Fakta ini memperlihatkan bahwa Presiden tidak menjaga netralitas dalam proses suksesi kekuasaan, melainkan justru berperan langsung dalam membentuk aliansi politik demi agenda pribadi. Framing Tempo mengarah pada penegasan bahwa Jokowi berada dalam posisi sentral untuk memfasilitasi pencalonan anaknya. Misalnya, disebutkan bahwa pada momen Lebaran 2023, Prabowo datang ke rumah Jokowi dan secara langsung meminta restu untuk menggandeng Gibran.

“...Bertemu di rumah Jokowi seusai Lebaran, April 2023, Prabowo meminta Jokowi merestui Gibran sebagai calon wakil presiden.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam berita itu juga disebut bahwa Jokowi menyambut tawaran tersebut, dan tidak lama kemudian, Koalisi Indonesia Maju mengumumkan pasangan PrabowoGibran. Dalam kerangka diagnose causes, hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan Jokowi dalam manuver elite bukan sekadar simbolis, melainkan substantif. Jokowi tidak lagi berperan sebagai kepala negara yang menjaga konstitusi dan etika pemilu, tetapi berubah menjadi kingmaker yang mengatur suksesi dengan menjadikan keluarganya sebagai bagian dari kelanjutan kekuasaan.

Tempo bahkan menyingkap lebih dalam bagaimana Jokowi mengelola isu publik seputar pencalonan Gibran. Salah satu contoh kunci adalah ketika Presiden meminta agar pengumuman pencalonan Gibran ditunda saat ia sedang melakukan lawatan ke luar negeri, karena memperhatikan sentimen negatif publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

“Dua narasumber di lingkaran Istana dan seorang kolega Jokowi bercerita, Presiden meminta Koalisi Indonesia Maju mengumumkan pencalonan Gibran ketika ia bersama Iriana melawat ke Cina dan Arab Saudi pada pertengahan Oktober 2023. Namun, di Cina, Jokowi mengirim pesan untuk menunda pengumuman.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam logika framing Entman, ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak hanya mengatur strategi politik, tetapi juga mengatur waktu komunikasi publik demi meredam kritik. Dengan demikian, penyebab dari masalah pencalonan Gibran tidak hanya terletak pada struktur sistem politik yang longgar, tetapi juga pada kecakapan Jokowi dalam memanipulasi persepsi publik untuk membentuk narasi legitimasi atas dinasti politiknya.

Selain itu, Tempo menyebut adanya upaya pencoretan Erick Thohir dari kandidat cawapres setelah Jokowi menerima laporan bahwa serangan media sosial terhadap Gibran diduga diatur oleh orang-orang di sekitar Erick.

“Namun, setelah Erick terbang ke Indonesia, Jokowi menerima laporan dari seorang petinggi lembaga negara bahwa serangan di media sosial terhadap Gibran ikut diorkestrasi oleh orang-orang yang terkoneksi dengan Erick. Seketika itu pula kursi calon wakil presiden Prabowo kembali ke tangan Gibran.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak sekadar mendukung Gibran, tetapi juga menjaga dan mengontrol ekosistem politik agar sepenuhnya aman bagi anaknya. Dalam kerangka diagnose causes, media membongkar Jokowi sebagai arsitek utama dari pencalonan Gibran, dengan membongkar rangkaian intervensi yang terjadi di balik layar. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa penyebab dari lahirnya dinasti politik bukanlah faktor struktural semata, tetapi lebih pada intensi dan strategi politik yang dilancarkan secara sadar oleh aktor utama dalam kekuasaan.

D. Keterlibatan Lembaga Negara dan Alokasi Proyek untuk Kepentingan Keluarga

Dalam laporan Tempo, alokasi sumber daya negara baik berupa proyek strategis, dana CSR BUMN, hingga kunjungan intensif menteri ke daerah-daerah yang dipimpin oleh keluarga Jokowi disebut sebagai bukti konkrit penyalahgunaan institusi negara. Dalam elemen diagnose causes menurut Entman, penyebab dari masalah ini ditelusuri melalui struktur dan aktor kekuasaan yang terlibat dalam proses pendistribusian kekuasaan dan anggaran. Tempo menyebut bahwa pembangunan rel layang Yogyakarta Solo dimulai pada masa kepemimpinan Gibran meskipun sudah direncanakan sebelumnya, serta menyampaikan bahwa aliran CSR dari BUMN masuk ke Solo dan Medan lebih deras dibanding daerah lain.

“Selain itu, dana sosial badan usaha milik negara disebut-sebut banyak mengalir ke Solo dan Medan. Tiga pejabat BUMN menuturkan, sejumlah perusahaan pelat merah dari sektor pariwisata, industri transportasi, perbankan, hingga pertambangan acap mengalirkan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan ke Medan dan Solo.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam bingkai ini, Jokowi didiagnosis sebagai otoritas tertinggi yang memobilisasi instrumen negara untuk menguatkan posisi keluarganya di panggung kekuasaan lokal. Framing ini diperkuat dengan testimoni dari pejabat lokal seperti Wali Kota Solo Teguh Prakosa, yang menyebut bahwa komunikasi dengan BUMN adalah urusan Gibran.

“Wali Kota Solo Teguh Prakosa tak menampik kabar bahwa bantuan sejumlah BUMN merambah ke kotanya. "Soal komunikasi dengan BUMN, para menteri, itu urusan Mas Gibran. Kami telah berbagi tugas," ujar Teguh di Solo, Senin, 15 Juli 2024.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Tempo membingkai pernyataan ini sebagai bukti bahwa jalur kekuasaan langsung antara pusat dan kepala daerah yang merupakan bagian dari keluarga presiden terbuka lebih lebar dibandingkan kepala daerah lain. Ini menjadi sumber ketimpangan akses terhadap pembangunan, yang dalam kerangka framing Entman merupakan bentuk penyebab struktural dari ketidakadilan dalam sistem demokrasi. Dalam hal ini, lembaga negara tidak lagi netral dan berorientasi pada pelayanan publik, tetapi telah menjadi alat pengamanan dinasti kekuasaan.

Tempo juga membongkar bahwa beberapa pejabat BUMN mengakui adanya aliran CSR ke daerah-daerah keluarga Jokowi, meskipun tidak semua bersedia memberi komentar terbuka. Dengan menyajikan informasi ini, Tempo ingin menunjukkan bahwa ada kesadaran diam-diam di kalangan birokrasi tentang pengaruh Jokowi yang begitu besar terhadap arah proyek dan distribusi dana negara.

“...Tiga pejabat BUMN menuturkan, sejumlah perusahaan pelat merah dari sektor pariwisata, industri transportasi, perbankan, hingga pertambangan acap mengalirkan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan ke Medan dan Solo.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam framing diagnose causes, kondisi ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terletak pada Jokowi sebagai individu, tetapi juga pada struktur birokrasi dan institusi negara yang tunduk pada kehendak kekuasaan. Ketiadaan kontrol dari lembaga independen dan lemahnya fungsi checks and balances memperkuat diagnosis bahwa penyebab utama munculnya dinasti politik adalah kooptasi penuh terhadap sistem pemerintahan.

Penyebab lainnya juga dibangun dari dimensi kultural, ketika narasi “karena Medan adalah ibu kota Sumatera Utara” atau “pemerintah pusat memang mendukung pembangunan” digunakan sebagai pembenaran oleh Bobby Nasution. Tempo membingkai narasi ini sebagai bagian dari proses normalisasi kekuasaan yang diselimuti oleh retorika kebijakan. Namun melalui analisis lapangan, media menunjukkan bahwa dukungan semacam itu jauh lebih masif dibandingkan daerah lain, sehingga bisa disimpulkan bahwa penyebab dari konsentrasi pembangunan adalah relasi keluarga, bukan urgensi daerah. Dalam logika Entman, penyebab seperti ini dibentuk oleh relasi politik patron-klien yang telah mengakar dalam struktur kekuasaan Indonesia.

E. Strategi Komunikasi Politik dalam Meredam Kritik Publik

Salah satu aspek penting dalam diagnose causes adalah bagaimana aktor utama berupaya mengontrol narasi publik agar terhindar dari krisis legitimasi. Tempo menunjukkan bahwa Jokowi menggunakan pendekatan komunikasi yang terukur untuk menutupi intensi politiknya. Salah satu kutipan penting adalah pernyataan Jokowi, “Orang tua hanya mendoakan anak,” yang berusaha menciptakan kesan pasif terhadap pencalonan Gibran. Dikutip dari berita

“Jokowi dan Iriana pun mendukung Gibran maju sebagai calon wakil presiden meski tak pernah blakblakan menyampaikannya. "Orang tua hanya mendoakan anak," tutur

Jokowi, Oktober 2023.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam framing Entman, bentuk komunikasi seperti ini merupakan strategi framing subtlety, di mana narasi dikemas agar tampak netral, padahal sarat muatan politik. Tempo menganalisis bahwa penyebab dari berlarutnya pembiaran terhadap dinasti politik adalah kemampuan elit kekuasaan memanipulasi persepsi publik melalui simbolisme dan retorika budaya.

Selain itu, Tempo juga menyoroti penggunaan klaim data sebagai alat pembingkai legitimasi. Dalam kasus ini, Luhut Pandjaitan disebut menyatakan bahwa “mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu berdasarkan big data.” Namun data tersebut tidak pernah dipublikasikan secara utuh, dan narasumber dari Kemenko Marves menyebut bahwa 30 persen publik justru menolak gagasan tersebut.

“...Data ditarik dari percakapan semua platform media sosial. Namun yang tak pernah terungkap di publik: data itu juga menunjukkan 30 persen pemilih tak menyetujui penundaan pemilu.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam kerangka diagnose causes, hal ini menunjukkan bahwa penyebab dari krisis demokrasi juga terletak pada penggunaan informasi yang tidak transparan untuk membenarkan tindakan politik tertentu. Tempo membongkar bahwa ada proses penyaringan informasi untuk menciptakan narasi tunggal yang menguntungkan kekuasaan.

Salah satu tindakan yang memperkuat diagnosis Tempo adalah ketika Jokowi menunda pengumuman pencalonan Gibran saat sedang ke luar negeri karena mencermati sentimen publik. Ini menunjukkan bahwa Presiden secara aktif membaca opini publik dan menyesuaikan strategi komunikasinya untuk mengurangi resistensi. Dalam logika framing, hal ini berarti bahwa pemimpin bukan hanya sebagai pelaku kebijakan, tetapi juga sebagai pengatur cara kebijakan

itu dipersepsikan. Oleh karena itu, penyebab dari diterimanya praktik dinasti di masyarakat bukan karena masyarakat menyetujuinya, tetapi karena narasi yang terbentuk telah dimanipulasi sedemikian rupa

F. Penyalahgunaan Jalur Budaya dan Simbol Sosial oleh Kekuasaan

Tempo juga mendiagnosis bahwa kekuasaan politik Jokowi tidak hanya bermain dalam ranah politik formal, tetapi juga masuk ke dalam wilayah budaya dan sosial yang seharusnya bebas dari intervensi politik. Salah satu contohnya adalah penggunaan Pendapa Pura Mangkunegaran untuk resepsi pernikahan Kaesang Pangarep.

“...Ada keinginan Jokowi menggunakan pendapa Pura Mangkunegaran sebagai tempat resepsi pernikahan anak bungsunya, Kaesang Pangarep.” (**Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024**)

Dalam logika framing Entman, hal ini mencerminkan penyebab struktural dari meluasnya pengaruh dinasti: kekuasaan merambah ke wilayah simbolik yang punya nilai sakral dan historis. Ketika tempat yang selama ini hanya digunakan untuk upacara adat kini dipakai untuk kepentingan keluarga presiden, maka terjadi pelemahan batas antara negara, keluarga, dan kebudayaan.

Tempo menyampaikan bahwa pemugaran keraton Mangkunegaran disebutsebut sebagai bagian dari barter simbolik dengan keluarga Jokowi. Meski Gusti Bhre membantah adanya keterkaitan langsung, narasi yang dibangun media mengarah pada asumsi bahwa revitalisasi kebudayaan telah dijadikan instrumen kekuasaan.

“...Tapi Gusti Bhre menampik jika pemugaran disebut terkait dengan resepsi anak Jokowi. "Revitalisasi itu kolaborasi untuk melestarikan dan mengembangkan Mangkunegaran sebagai salah satu pusat budaya," kata Bhre di Solo, Senin, 22 Juli 2024.” (**Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024**)

Dalam diagnose causes, hal ini menunjukkan bahwa penyebab dari pembentukan hegemoni dinasti tidak hanya bersumber dari pengaruh politik formal, tetapi juga dari akumulasi simbol dan norma sosial yang diubah maknanya untuk mendukung kekuasaan. Dengan demikian, penyebab krisis demokrasi tidak bisa dilepaskan dari aspek budaya yang telah dikendalikan oleh elite politik. Tempo juga menyisipkan klaim pemerintah bahwa semua proyek dilakukan melalui prosedur yang transparan.

“Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengklaim semua proyek telah melalui proses yang transparan dan sesuai dengan prosedur...” (**Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024**)

Namun dalam bingkai yang dibangun media, pernyataan itu ditampilkan sebagai kontradiksi dengan fakta-fakta lapangan, seperti komunikasi eksklusif antara Gibran dan para menteri, serta dominasi proyek pemerintah di daerah keluarga presiden. Dalam framing Entman, hal ini memperkuat diagnosis bahwa kebohongan birokrasi merupakan bagian dari penyebab sistemik krisis tata kelola. Dengan mengatur narasi budaya, pemerintah tidak hanya mempertahankan kekuasaan, tetapi juga membentuk ulang norma-norma sosial untuk melanggengkan dominasi keluarga presiden.

4.3.2.3 Make Moral Judgement

A. Penilaian Moral terhadap Manuver Perpanjangan Jabatan Presiden

Dalam teori Robert N. Entman, elemen make moral judgement dimaksudkan untuk memberikan penilaian etis terhadap tindakan yang telah didefinisikan sebagai masalah dan didiagnosis penyebabnya. Tempo secara tegas memposisikan manuver perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebagai tindakan yang tidak hanya menyimpang secara politik, tetapi juga bertentangan secara moral. Dengan menyebut bahwa “Jokowi bermanuver agar perpanjangan masa jabatan presiden bisa berjalan. Memberi karpet merah untuk dinasti politiknya,” media ini memberikan penilaian bahwa praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang sehat. Tempo menyisipkan makna bahwa ketika seseorang yang sedang berkuasa berusaha memperpanjang kekuasaannya melalui skema tersembunyi dan manipulatif, maka tindakan itu mengandung cacat moral yang serius. Selain itu, framing moral juga dibangun melalui cara Tempo menyoroti lokasi dan metode perencanaan perpanjangan masa jabatan. Ketika disebut bahwa kajian dilakukan di rumah pribadi Andi Widjajanto dan tidak melibatkan institusi formal

“....Di kompleks milik keluarga Andi Widjajanto yang juga markas Lab 45-singkatan dari Laboratorium Indonesia 2045 – sejumlah peneliti bekerja...” (**Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024**)

Tempo memberikan sinyal kuat bahwa tindakan ini tidak transparan dan melanggar etika pemerintahan yang akuntabel. Tempo menilai bahwa Presiden telah menyalahgunakan posisinya bukan hanya secara politis, tetapi juga secara etis, dengan menutup ruang partisipasi publik dalam diskursus penting tentang masa depan demokrasi. Dalam hal ini, penilaian moral tidak diarahkan hanya pada tujuan perpanjangan kekuasaan, tetapi juga pada cara mencapainya yang bersifat rahasia, elitis, dan manipulatif.

Lebih jauh, Tempo juga membingkai bahwa penggunaan alasan pandemi Covid-19 sebagai dalih perpanjangan kekuasaan merupakan bentuk eksploitasi terhadap krisis nasional untuk keuntungan pribadi. Dengan menyebut bahwa

skenario perpanjangan “bisa berjalan jika didukung lembaga legislatif untuk mengamendemen UUD 1945” serta bahwa “puncak pandemi telah terjadi” saat wacana ini dimunculkan,

“Menurut Andi, Jokowi menyampaikan keresahannya soal proyek strategis nasional yang terancam mangkrak saat masa jabatannya berakhir. Perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19 ikut memperlambat berbagai proyek. Salah satu yang disebut Jokowi adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).” Covid menghambat ketertarikan investor ke IKN”, ucap Andi.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Tempo secara implisit mengkritik aspek moralitas dari justifikasi tersebut. Dalam framing Entman, ketika media menunjukkan bahwa sebuah kebijakan dipaksakan melalui alasan yang tidak relevan atau kadaluwarsa, maka media tengah menyuarakan penilaian moral yang menyatakan bahwa kebijakan itu bersifat manipulatif dan tidak jujur.

Akhirnya, penilaian moral Tempo terhadap manuver perpanjangan jabatan ini juga diperkuat dengan diamnya aktor-aktor kunci seperti Pratikno dan Listyo Sigit yang “tidak merespons” permintaan konfirmasi dari Tempo.

“Tempo beberapa kali menghubungi Praktino dan Listyo lewat sambungan telepon dan pesan pendek. Hingga Rabu, 24 Juli 2024, keduanya tak merespons.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Sikap ini dibingkai sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab publik, yang secara etis dipandang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam demokrasi. Dalam framing Entman, kondisi ini menunjukkan bahwa aktor kekuasaan tidak hanya menyimpang dari norma politik, tetapi juga gagal memenuhi standar moral dasar sebagai pejabat publik yang semestinya terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan demikian, Tempo tidak hanya menampilkan fakta, tetapi juga mengarahkan opini publik pada penilaian bahwa tindakan perpanjangan masa jabatan merupakan manifestasi dari penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bermoral.

B. Etika Kekuasaan dalam Pengaturan Karier Politik Anggota Keluarga

Tempo memberikan penilaian moral yang tajam terhadap keterlibatan Jokowi dalam mengatur karier politik anak dan kerabatnya, terutama Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. Dalam kerangka make moral judgement, media ini menunjukkan bahwa tindakan Jokowi bukanlah bentuk kasih sayang orang tua biasa, melainkan perwujudan dari keinginan untuk melanggengkan pengaruh politik melalui darah dan keluarga. Hal ini ditekankan melalui narasi yang menyebut Jokowi mengundang Achmad Purnomo ke Istana untuk secara halus memintanya mundur dan memberikan tawaran jabatan sebagai kompensasi.

“....Jokowi mengundang Purnomo ke Istana. Berbincang empat mata sembari makan siang, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran berniat maju sebagai wali kota. Memberi kode agar Purnomo mundur,....” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam logika moral publik, tindakan semacam ini dapat dipandang sebagai bentuk barter kekuasaan yang tidak etis dan mencederai asas meritokrasi dalam politik.

Selain itu, Tempo juga menilai bahwa upaya Jokowi untuk melobi Megawati Soekarnoputri guna mendapatkan rekomendasi untuk Gibran merupakan bentuk intervensi personal yang memanfaatkan relasi kuasa, bukan pertimbangan obyektif atas kapasitas kandidat. Penilaian moral dibentuk melalui penyampaian fakta bahwa “Jokowi lebih dari sekali menggelar rapat dengan Hasto Kristiyanto” yang mencerminkan determinasi presiden dalam mengatur jalur politik anaknya. Mengutip dari

“....Jokowi lebih dari sekali menggelar rapat dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk membahas amendemen....” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam perspektif Etman, ini menandakan bahwa media telah membingkai Jokowi sebagai pemimpin yang gagal menjaga jarak antara peran sebagai kepala negara dan peran sebagai kepala keluarga. Ketika dua peran ini tumpang tindih dan berujung pada intervensi politik, maka yang tercipta adalah degradasi etika publik.

Tempo juga menyoroti bagaimana Jokowi mengutus tim dari Jakarta untuk mengawal kemenangan Gibran, bahkan mencari lawan tandingan untuk menciptakan ilusi kompetisi.

“...Jokowi mengutus timnya dari Jakarta mengawal pemenangan Gibran. Para ketua umum partai pendukung Jokowi, yaitu PKB, Golkar, dan PAN, ikut mendukung.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Hal ini memperkuat framing bahwa bukan hanya demokrasi yang dipertaruhkan, tetapi juga kejujuran dalam berpolitik. Penilaian moral dibentuk dari narasi yang menyebut adanya skenario kemenangan dengan lawan yang lemah, yang menunjukkan bahwa kemenangan Gibran tidak diperoleh melalui proses adil. Dalam konteks Etman, hal ini menyatakan bahwa institusi pemilu telah diperalat untuk membenarkan kemenangan yang sudah diatur sebelumnya, dan itu adalah bentuk pelanggaran moral terhadap prinsip fairness dalam kontestasi demokratis. 114

Penting juga untuk dicatat bahwa Tempo menggunakan kritik internal dari PDIP, serta testimoni dari tokoh seperti FX Rudy, untuk memperkuat penilaian moral terhadap upaya Jokowi.

“Kala itu Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Solo telah mengusung Achmad Purnomo, bekas Wakil Wali Kota Solo, sebagai calon wali kota. Ketua DPC PDIP Solo Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo atau F.X. Rudy pun telah meneken surat keputusan pengurus cabang untuk Purnomo” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dengan menampilkan tokoh internal partai yang merasa tersingkirkan, Tempo membangun opini bahwa tindakan Jokowi menimbulkan luka dalam demokrasi internal partai politik, yang semestinya menjadi wadah meritokrasi. Dalam framing Entman, ketika konflik internal partai diangkat sebagai dampak dari intervensi keluarga presiden, maka media sedang menggarisbawahi bahwa etika kekuasaan telah dikompromikan demi agenda politik pribadi

C. Penilaian Moral terhadap Kenaikan Gibran ke Panggung Nasional

Tempo membingkai kenaikan Gibran Rakabuming dari Wali Kota Solo menjadi calon wakil presiden sebagai proses politik yang sarat penyimpangan moral. Dalam elemen make moral judgement, media ini membentuk opini bahwa langkah tersebut tidak hanya menyalahi etika demokrasi, tetapi juga mengandung konflik kepentingan yang akut. Salah satu bentuk framing moral yang kuat terlihat dari kutipan narasumber yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi secara aktif menjodohkan Prabowo dengan Ganjar, dan setelah itu mengarahkan dukungan kepada Prabowo demi membuka jalan bagi Gibran.

“...Jokowi mulanya menjodohkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo...” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Ketika seorang kepala negara menggunakan posisinya untuk menentukan arah koalisi dan mengatur pasangan calon, maka Tempo menilai hal itu sebagai pelanggaran moral terhadap asas netralitas kekuasaan eksekutif.

Lebih jauh lagi, Tempo menyoroti bahwa pencalonan Gibran diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman adik ipar Presiden yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres.

“...Publik menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Sidang MK yang kala itu dipimpin Anwar Usman-adik ipar Jokowi-memutuskan mengabulkan gugatan usia minimal.”

(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)

Penilaian moral dikembangkan melalui penggambaran relasi kekeluargaan dalam lembaga hukum tertinggi sebagai bentuk konflik kepentingan yang mencederai integritas lembaga yudisial. Tempo tidak secara eksplisit menuduh adanya rekayasa, namun penyajian fakta-fakta tersebut secara berurutan memberi kesan kuat bahwa struktur kekuasaan telah digunakan untuk menyokong keluarga, bukan untuk melayani keadilan. Dalam kerangka Entman, ketika media menempatkan relasi personal di atas institusi negara, maka yang dibangun adalah penilaian bahwa tatanan hukum telah dibelokkan oleh moralitas yang lemah.

Tempo juga memberi sorotan etis terhadap proses pencalonan Gibran yang ditunda pengumumannya karena Jokowi tengah mengamati sentimen negatif publik.

“Saat itu Jokowi memperhatikan sentimen negatif publik terhadap dia. Publik menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden...” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam perspektif moral, tindakan ini menunjukkan bahwa Presiden sadar akan problem etik di balik pencalonan anaknya, namun tetap melanjutkannya dengan cara memanipulasi waktu publikasi. Penilaian moral diarahkan bukan hanya pada substansi pencalonan, tetapi juga pada strategi komunikasi kekuasaan yang dilakukan untuk menyamarkan intensi politik di balik pencalonan tersebut. Dalam framing Entman, tindakan semacam ini menunjukkan bahwa pemimpin yang etis seharusnya bertindak terbuka dan jujur kepada rakyatnya, bukan menunda informasi demi menghindari gelombang kritik.

Tempo bahkan mengangkat peristiwa menarik: pencoretan Erick Thohir sebagai kandidat cawapres oleh Jokowi setelah menerima laporan tentang serangan terhadap Gibran di media sosial.

“Menurut tiga narasumber di lingkaran Istana, Jokowi sempat mempertimbangkan ulang pendamping Prabowo ketika di Cina....” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Narasi ini memberikan penilaian bahwa pemilihan pasangan capres-cawapres tidak didasarkan pada kompetensi atau kesesuaian program, melainkan pada loyalitas dan keamanan politik bagi keluarga presiden. Dalam hal ini, framing moral Tempo sangat tegas: keputusan strategis negara telah bergeser dari orientasi kebangsaan menuju kepentingan dinasti. Bagi Entman, penilaian moral seperti ini penting untuk membangkitkan kesadaran kolektif publik bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal nilai-nilai moral yang dijaga oleh para pemimpin.

D. Penyimpangan Moral dalam Penggunaan Proyek dan Dana Negara

Tempo menilai penggunaan proyek nasional dan dana CSR BUMN untuk memperkuat kekuasaan politik Gibran dan Bobby sebagai bentuk pelanggaran moral yang serius. Dalam elemen make moral judgement, Tempo menyampaikan bahwa pembangunan yang semestinya berbasis kebutuhan publik telah direduksi menjadi alat transaksi kekuasaan. Hal ini tampak dalam kutipan narasumber yang menyebut menteri-menteri Jokowi “sering bolak-balik ke Solo dan Medan” selama Gibran dan Bobby menjabat.

“Empat orang dekat keluarga Jokowi di Solo bercerita, sepanjang Gibran menjadi wali kota, sejumlah menteri Jokowi bolak-balik bertandang. Kunjungan itu kerap membuahkan hasil pembangunan.....” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Tempo tidak menyebut bahwa hal ini melanggar hukum, tetapi membingkai intensitas dukungan itu sebagai tindakan yang secara moral tidak adil karena menciptakan ketimpangan politik berbasis relasi darah, bukan kebutuhan wilayah. Framing moral juga diperkuat melalui penyampaian data mengenai mengalirnya dana CSR ke Solo dan Medan. Tempo menyisipkan penilaian bahwa aliran tersebut “disebut-sebut” terjadi secara massif, yang memberi kesan bahwa proses itu tidak transparan dan tidak setara. Narasi dari Bobby yang menyebut pembangunan di Medan sebagai hal “lumrah” karena status kota itu sebagai ibu kota provinsi juga dikontraskan dengan temuan lapangan.

“Adapun Bobby Nasution enggan menanggapi informasi soal dana CSR BUMN yang mengalir ke Medan dan bantuan pemerintah pusat secara istimewa ke daerahnya. Menurut dia, pembangunan di Medan lumrah karena statusnya sebagai ibu kota Sumatera Utara. “Lagi pula, dilihat dari proyek strategis kita, APBN lebih besar dibanding APBD,” tutur Bobby” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam kerangka Entman, kontras antara klaim pemerintah dan realitas di lapangan digunakan media untuk membentuk penilaian bahwa kekuasaan telah gagal menjelaskan secara etis mengapa keluarganya mendapat porsi pembangunan lebih besar dibanding daerah lain.

Tempo juga menunjukkan bahwa ketika ditekan untuk menjelaskan aliran proyek dan bantuan sosial, pemerintah selalu menggunakan narasi prosedural seperti “semua sudah sesuai prosedur” atau “ditentukan oleh kebutuhan daerah”.

“Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengklaim semua proyek telah melalui proses yang transparan dan sesuai dengan prosedur. Ia membantah bila semua proyek itu disebut terkait dengan dinasti politik Jokowi atau rencana perpanjangan masa jabatan presiden. “Penunjukan didasarkan pada kebutuhan daerah, bukan hubungan keluarga,” ucap Budi” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Penilaian moral dibentuk dengan menyandingkan klaim tersebut dengan kenyataan bahwa aktor-aktor di daerah lain tidak mendapat perlakuan serupa, dan bahwa komunikasi strategis antara menteri dan kepala daerah keluarga presiden berjalan lebih intens. Dalam framing Entman, ketika negara tidak mampu mempertanggungjawabkan alokasi sumber daya secara adil, maka yang terjadi adalah kegagalan moral dalam pengelolaan keuangan publik dan dalam menjamin kesetaraan akses terhadap pembangunan.

Dengan demikian, Tempo membingkai bahwa tindakan Presiden bukan hanya melanggar prinsip keadilan dalam tataran teknis pemerintahan, tetapi juga telah menurunkan standar moral dalam birokrasi publik. Jika proyek, dana, dan relasi institusional diarahkan untuk memperkuat posisi keluarga, maka hal ini menandakan bahwa negara tidak lagi berfungsi sebagai pelayan publik, tetapi sebagai pelindung dinasti. Dalam logika Entman, penilaian moral ini penting untuk menggugah masyarakat agar menolak dominasi kekuasaan yang dibangun atas dasar hubungan keluarga dan bukan atas dasar integritas dan kapabilitas kepemimpinan.

E. Normalisasi Dinasti Melalui Retorika, Simbol, dan Pengaburan Makna

Dalam framing moral, Tempo juga menyoroti bagaimana upaya Jokowi membentuk persepsi publik tentang dinasti politik dilakukan melalui retorika yang dibungkus nilai-nilai kultural, simbolik, dan personal. Pernyataan seperti “Orang tua hanya mendoakan anak” menjadi contoh nyata dari strategi komunikasi yang berusaha mengaburkan intensi politik sebenarnya dengan pendekatan emosional dan kekeluargaan.

“Jokowi dan Iriana pun mendukung Gibran maju sebagai calon wakil presiden meski tak pernah blakblakan menyampaikannya. “Orang tua hanya mendoakan anak,” tutur Jokowi, Oktober 2023.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Tempo membingkai pernyataan ini bukan sebagai bentuk kerendahan hati, tetapi sebagai alat untuk menolak pertanggungjawaban publik atas keputusan politik yang jelas dikendalikan oleh sang Presiden. Dalam logika Entman, ketika pemimpin menggunakan simbol moral sebagai topeng bagi ambisi politik, maka itu merupakan pelanggaran etika yang merusak kepercayaan publik terhadap komunikasi kekuasaan.

Tempo juga menilai bahwa penggunaan narasi big data oleh Luhut Pandjaitan untuk membenarkan wacana penundaan pemilu adalah bentuk lain dari pembungkaman moral yang cacat. Klaim bahwa mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu, tanpa membuka data secara transparan, digambarkan sebagai pembenaran semu yang digunakan untuk mendukung strategi politik tertentu. Bahkan, Tempo mengungkap bahwa data yang sama juga menunjukkan penolakan 30 persen masyarakat dan potensi konflik sosial.

“Tim Luhut menganalisis reaksi yang muncul dari kelompok 30 persen ini bisa menyebabkan protes besar. Bahkan demonstrasi bisa mengarah pada perpecahan dan konflik sosial. Meski begitu, atas restu Istana, Luhut tetap melobi sejumlah politikus senior untuk mendukung penundaan pemilu.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam analisis moral Entman, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya menyembunyikan informasi, tetapi juga memanipulasinya untuk mendukung agenda pribadi. Penilaian moral diarahkan pada ketidakjujuran dan ketidaktransparanan kekuasaan.

Dalam hal ini, Tempo menyajikan bagaimana upaya Jokowi dan lingkarannya mengendalikan narasi publik bukan hanya dilakukan melalui tindakan, tetapi juga melalui pengaturan waktu, simbol, dan komunikasi politik. Penundaan pengumuman pencalonan Gibran, misalnya, dibingkai sebagai bentuk kalkulasi politik yang mengabaikan etika kejujuran terhadap rakyat. Ketika pemimpin hanya menyampaikan informasi saat kondisi publik sudah netral atau pasif, maka itu merupakan manipulasi komunikasi yang mencederai moralitas kepemimpinan. Dalam framing Entman, moral judgement yang disampaikan Tempo mengarah pada gagasan bahwa penguasa seharusnya bersikap terbuka, jujur, dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang berdampak besar pada bangsa.

F. Penyimpangan Etika dalam Penggunaan Simbol Budaya untuk Kekuasaan

Tempo secara halus namun tajam memberikan penilaian moral terhadap penggunaan Pendapa Pura Mangkunegaran sebagai lokasi pernikahan Kaesang Pangarep.

“...Ada keinginan Jokowi menggunakan pendapa Pura Mangkunegaran sebagai tempat resepsi pernikahan anak bungsunya, Kaesang Pangarep.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam framing Entman, ketika ruang budaya yang sakral digunakan untuk acara pribadi keluarga presiden dan dikaitkan dengan renovasi keraton oleh negara, maka hal itu bukan hanya soal privatisasi ruang publik, melainkan juga soal pelanggaran etika simbolik. Dalam masyarakat Jawa, pendapa keraton adalah ruang yang sakral dan eksklusif untuk urusan adat. Ketika tempat itu digunakan oleh keluarga non-Mangkunegaran, maka Tempo menyiratkan bahwa kekuasaan telah melewati batas kepantasan, sekalipun dalam urusan yang bersifat sosial-kultural.

Tempo menghadirkan narasumber yang menyatakan bahwa sebelumnya belum pernah ada pihak non-keturunan Mangkunegaran yang mengadakan resepsi pernikahan di sana.

“...Menurut seorang narasumber, belum ada pihak yang bukan keturunan Mangkunegaran menggunakan pendapa untuk pernikahan. Pendapa itu biasa digunakan untuk upacara adat Keraton.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Ini membingkai tindakan Jokowi sebagai bentuk normalisasi privilese kekuasaan dalam wilayah budaya, yang secara moral dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai tradisi. Dalam kerangka Entman, media menggunakan narasi budaya ini sebagai sarana memperluas kritik moral terhadap dominasi kekuasaan: bahwa kekuasaan tidak hanya meluas dalam politik, tetapi juga dalam simbol dan kebudayaan. Ketika nilai luhur budaya dijadikan alat legitimasi kekuasaan, maka hal itu mencerminkan pengaburan batas antara etika publik dan agenda personal.

Penilaian moral terhadap tindakan ini juga diperkuat oleh kontras antara pembelaan Gusti Bhre dan opini publik yang menolak penggunaan pendapa untuk kepentingan keluarga presiden.

“...Tapi Gusti Bhre menampik jika pemugaran disebut terkait dengan resepsi anak Jokowi...” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Tempo tidak secara langsung menuduh, tetapi dengan menyandingkan pembelaan dengan testimoni masyarakat, media ini membingkai bahwa terjadi tarik menarik antara nilai tradisi dan tekanan kekuasaan. Dalam kerangka moral Entman, ini menunjukkan bahwa negara semestinya menjadi pelindung nilai budaya, bukan justru menjadi pengalih fungsi budaya demi tujuan simbolik kekuasaan dinasti.

Dengan demikian, penilaian moral dalam framing ini tidak hanya diarahkan pada tindakan politik yang formal, tetapi juga pada penetrasi kekuasaan dalam ruangruang simbolik yang sebelumnya netral. Tempo ingin menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan Jokowi telah mencapai tingkat yang memungkinkan dirinya mengubah struktur sosial, politik, dan budaya secara bersamaan. Dalam hal ini, framing moral berfungsi membangkitkan kesadaran publik bahwa

dinasti politik tidak hanya mengancam demokrasi secara prosedural, tetapi juga merusak norma dan etika dalam tatanan sosial yang lebih luas.

4.3.2.4 Treatment Recommendation

A. Rekomendasi terhadap Manuver Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Dalam elemen treatment recommendation, Robert N. Entman menjelaskan bahwa media tidak hanya bertugas menyoroti masalah, mendiagnosis penyebab, dan memberikan penilaian moral, tetapi juga menyarankan atau mengisyaratkan solusi atas permasalahan yang telah diangkat. Dalam konteks manuver perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, Tempo tampak menyarankan secara implisit bahwa solusi utama terletak pada penegakan kembali batas kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam konstitusi. Hal ini dapat dibaca dari kutipan Andi Widjajanto yang menirukan Megawati Soekarnoputri bahwa”

Kalau Jokowi ingin masa kepemimpinannya bablas, hanya ada dua syarat. "Yaitu sesuai dengan konstitusi dan ada kondisi darurat," **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Kalimat ini menjadi indikator bahwa Tempo mendukung gagasan bahwa perubahan masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar dan dalam situasi krisis yang sah secara objektif.

Rekomendasi media terhadap persoalan ini tampak pula dalam cara Tempo menyoroti minimnya respons dari pihak-pihak terkait, seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang tidak menjawab pertanyaan Tempo.

"...Tempo beberapa kali menghubungi Pratikno dan Listyo lewat sambungan telepon dan pesan pendek. Hingga Rabu, 24 Juli 2024, keduanya tak merespons." **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Ketika aktor kunci tidak memberikan penjelasan, media justru menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari solusi. Dengan kata lain, rekomendasi yang disiratkan adalah perlunya keterbukaan pejabat publik dalam menjelaskan kebijakan, terutama yang berpotensi mengubah arah demokrasi. Dalam framing Entman, dorongan terhadap transparansi merupakan bentuk pemulihan terhadap distorsi komunikasi yang sebelumnya dikritik.

Lebih lanjut, Tempo tampak merekomendasikan bahwa lembaga legislatif dan yudikatif harus menjaga independensinya untuk mencegah keinginan sepihak dari eksekutif. Dalam berita tersebut, disebut bahwa skenario perpanjangan jabatan memerlukan dukungan legislatif dan amendemen konstitusi, yang seharusnya menjadi benteng demokrasi. Namun, narasi dalam berita menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini justru menjadi objek lobi dan manuver kekuasaan.

"Skenario itu bisa berjalan jika didukung lembaga legislatif untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945...."

(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)

Oleh karena itu, rekomendasi yang tersirat adalah perlunya penguatan checks and balances sebagai pilar utama sistem pemerintahan. Dalam kerangka Entman, penguatan institusi negara menjadi resep strategis untuk mengatasi disfungsi demokrasi yang terjadi karena ambisi personal kepala negara.

Tempo juga menampilkan Luhut Pandjaitan yang mengklaim bahwa penundaan pemilu didukung oleh big data, tetapi tidak membagikan sumber data tersebut secara terbuka. Dari sudut pandang framing, ini adalah titik kritik yang menyiratkan perlunya penguatan kontrol publik atas klaim-klaim kebijakan yang berbasis data. Artinya, salah satu bentuk rekomendasi yang disampaikan adalah pentingnya keterlibatan publik dalam mengevaluasi dasar pengambilan kebijakan, serta perlunya regulasi untuk memastikan bahwa data tidak disalahgunakan sebagai alat pembenaran politik. Tempo tidak menawarkan solusi secara eksplisit, tetapi melalui pemilihan narasi, media ini menunjukkan bahwa pemulihan demokrasi hanya bisa terjadi jika dasar kebijakan dibangun secara objektif dan dapat diverifikasi publik.

B. Rekomendasi terhadap Intervensi Politik dalam Pencalonan Keluarga

Dalam kasus intervensi Jokowi terhadap pencalonan Gibran, Bobby, dan Wahyu, Tempo tampak menyiratkan bahwa praktik tersebut dapat dicegah dengan mengembalikan proses politik kepada mekanisme demokratis yang berbasis meritokrasi, bukan nepotisme. Mengutip dari berita, narasi tentang

"...Jokowi mengundang Purnomo ke Istana. Berbincang empat mata sembari makan siang, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran berniat maju sebagai wali kota. Memberi kode agar Purnomo mundur..." **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

serta pertemuan dengan FX Rudy menunjukkan bahwa media melihat intervensi pribadi sebagai bentuk distorsi. Maka, rekomendasi yang ditawarkan adalah perlunya penyusunan aturan internal partai yang lebih tegas terhadap konflik kepentingan, termasuk larangan tidak tertulis bagi kader untuk mencalonkan kerabat dari elite kekuasaan.

Dalam teori Entman, solusi yang bersumber dari perbaikan struktur partai adalah bentuk pemulihan dari kerusakan yang telah didiagnosis.

Selain itu, dengan menyoroti keterlibatan Presiden dalam merayu Megawati untuk memberi rekomendasi kepada Gibran, Tempo menggarisbawahi pentingnya integritas elite partai dalam menjaga demokrasi internal. Solusi yang disiratkan adalah bahwa elite partai seharusnya tidak tunduk pada tekanan kekuasaan, tetapi harus menegakkan aturan organisasi secara konsisten. Dengan memperlihatkan penolakan awal Megawati sebagai contoh seperti yang dikutip dalam berita

“Kalau Jokowi ingin masa kepemimpinannya bablas, hanya ada dua syarat. "Yaitu sesuai dengan konstitusi dan ada kondisi darurat," tutur Andi menirukan Megawati.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Tempo secara tidak langsung merekomendasikan bahwa ketegasan sikap terhadap tekanan politik adalah fondasi penting bagi tegaknya demokrasi representatif. Dalam konteks ini, peran partai politik sebagai institusi perekat demokrasi harus direformasi agar tak lagi menjadi kendaraan keluarga elite.

Tempo juga memperlihatkan bagaimana intervensi pusat terhadap dinamika lokal, seperti pencarian lawan tandingan untuk Gibran, berujung pada hilangnya esensi kompetisi politik.

“Jokowi kemudian memerintahkan timnya di Jakarta mencari lawan tandingan anaknya.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Rekomendasi yang dapat ditarik adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu perlu memperketat aturan keterlibatan elite nasional dalam kontestasi lokal agar integritas pemilu di tingkat daerah tetap terjaga. Dalam perspektif Entman, ketika media menunjukkan perlunya reformasi regulasi, maka media tengah menyampaikan rekomendasi normatif sebagai upaya korektif atas kerusakan demokrasi yang telah berlangsung.

C. Rekomendasi atas Pencalonan Gibran sebagai Cawapres dan Keterlibatan Presiden

Dalam membingkai pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden, Tempo secara implisit menyarankan pentingnya pemulihan prinsip netralitas presiden dalam kontestasi politik nasional. Melalui narasi bahwa Jokowi “menjodohkan Prabowo dan Ganjar” serta kemudian mengalihkan dukungan ke Prabowo, media ini menunjukkan bahwa Presiden melampaui batas wewenangnya dalam memengaruhi dinamika koalisi. Mengutip dari berita

“Jokowi mulanya menjodohkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam logika treatment recommendation ala Entman, hal ini dapat dipahami sebagai ajakan untuk mempertegas pembatasan hukum terhadap peran kepala negara dalam urusan pencalonan. Artinya, dibutuhkan regulasi atau etika kepemimpinan yang tegas agar presiden tidak lagi terlibat langsung dalam menyusun pasangan calon terutama bila menyangkut keluarga sendiri.

Rekomendasi lain yang dapat ditarik dari framing Tempo adalah pentingnya pembenahan sistem rekrutmen politik, khususnya dalam hal syarat usia dan pengalaman calon presiden maupun wakil presiden. Tempo menyoroti bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran dipimpin oleh Anwar Usman, adik ipar Jokowi.

“Sidang MK yang kala itu dipimpin Anwar Usman-adik ipar Jokowi-memutuskan mengabulkan gugatan usia minimal.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dengan menyajikan fakta ini tanpa menyebut solusi secara eksplisit, Tempo mendorong pembaca untuk melihat bahwa pemilihan pejabat tinggi di lembaga yudikatif seharusnya bebas dari hubungan personal dengan kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah mendorong reformasi Mahkamah Konstitusi, terutama dalam hal rekrutmen hakim konstitusi agar bebas dari afiliasi politik dan nepotisme.

Tempo juga menampilkan bahwa Jokowi menunda pengumuman pencalonan Gibran demi menunggu waktu yang dianggap lebih aman dari sisi opini publik.

“...Namun, di Cina, Jokowi mengirim pesan untuk menunda pengumuman.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Tindakan ini membentuk framing bahwa Presiden menggunakan kalkulasi opini publik sebagai alat manuver politik. Rekomendasi yang dapat ditarik dari sini adalah pentingnya transparansi dalam setiap proses penentuan calon pemimpin. Dengan demikian, Tempo secara tidak langsung menyerukan perlunya keterbukaan informasi kepada publik, serta menegaskan bahwa komunikasi politik harus bersifat jujur dan tidak manipulatif. Dalam kerangka Entman, ini adalah bagian dari pemulihan praktik komunikasi demokratis yang seharusnya menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Framing juga membongkar bagaimana Gibran menjadi figur pilihan bukan karena kompetensi, tetapi karena pertimbangan strategis untuk mengamankan basis suara Jokowi. Dalam konteks ini, Tempo tampak mendorong perbaikan sistem demokrasi elektoral dengan mengutamakan kualifikasi kandidat, bukan relasi keluarga. Oleh karena itu, rekomendasi normatif yang dibentuk adalah perlunya pembatasan terhadap keterlibatan figur keluarga presiden dalam kontestasi politik saat ayahnya masih menjabat. Solusi ini penting bukan untuk membatasi hak politik, tetapi untuk menjaga etika demokrasi agar tidak dikendalikan oleh patronase kekuasaan yang mengikis kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

D. Rekomendasi atas Penggunaan Instrumen Negara untuk Kepentingan Dinasti

Tempo secara tegas menampilkan bagaimana proyek strategis nasional dan dana CSR dari BUMN diarahkan ke Solo dan Medan saat dipimpin oleh Gibran dan Bobby.

“...Tiga pejabat BUMN menuturkan, sejumlah perusahaan pelat merah dari sektor pariwisata, industri transportasi, perbankan, hingga pertambangan acap mengalirkan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan ke Medan dan Solo.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam hal ini, media tampak menyiratkan bahwa penggunaan instrumen negara untuk keuntungan keluarga merupakan pelanggaran terhadap keadilan distribusi. Oleh karena itu, rekomendasi yang muncul dari framing ini adalah perlunya pembentukan sistem pengawasan independen atas distribusi proyek dan anggaran negara. Dalam perspektif Entman, ketika media mengangkat ketimpangan sebagai masalah utama, maka solusi logis yang ditawarkan adalah penguatan kontrol publik terhadap kebijakan fiskal dan proyek pemerintah.

Tempo juga menyoroti adanya frekuensi kunjungan para menteri ke daerah-daerah tersebut, yang menghasilkan percepatan proyek. Dalam hal ini, media tampak menekankan perlunya standar nasional dalam penyusunan prioritas pembangunan, agar akses terhadap proyek negara tidak ditentukan oleh kedekatan kepala daerah dengan presiden. Dengan menampilkan narasi bahwa

"Soal komunikasi dengan BUMN, para menteri, itu urusan Mas Gibran. Kami telah berbagi tugas," ujar Teguh di Solo, Senin, 15 Juli 2024.”, **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Tempo memberi kesan bahwa jalur kekuasaan bersifat eksklusif. Rekomendasi yang muncul adalah bahwa sistem birokrasi seharusnya tidak memberikan keistimewaan berdasarkan relasi personal, melainkan berdasarkan analisis kebutuhan daerah dan prioritas nasional yang objektif.

Bersamaan dengan itu, Tempo menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam alokasi CSR. Tiga pejabat BUMN yang mengonfirmasi adanya aliran dana ke Solo dan Medan menjadi landasan bahwa regulasi mengenai distribusi CSR harus diperketat. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah agar Kementerian BUMN menetapkan batasan yang lebih ketat dan mengedepankan prinsip pemerataan dalam tanggung jawab sosial korporasi. Dalam framing Entman, media bertugas mengangkat realitas penyimpangan agar pemangku kebijakan melihat perlunya reformasi kelembagaan yang konkret dan terukur.

Yang tidak kalah penting adalah sorotan terhadap klaim prosedural yang disampaikan oleh Budi Arie Setiadi, yang menyebut bahwa semua program sudah melalui mekanisme yang benar. Tempo membandingkan klaim ini dengan fakta bahwa distribusi bantuan negara sangat terkonsentrasi pada keluarga presiden. Rekomendasi yang dapat diambil dari kontras ini adalah bahwa pemerintah perlu membuka akses informasi dan audit publik atas kebijakan bantuan sosial dan proyek strategis. Dengan memperkuat mekanisme transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah. Dalam pandangan Entman, inilah fungsi utama framing: mendorong pembentukan opini publik yang menuntut reformasi.

E. Rekomendasi atas Normalisasi Dinasti lewat Retorika dan Simbolisme

Tempo membingkai bahwa upaya Jokowi membangun persepsi publik melalui pernyataan seperti “orang tua hanya mendoakan anak” mengutip dari

“Jokowi dan Iriana pun mendukung Gibran maju sebagai calon wakil presiden meski tak pernah blakblakan menyampaikannya."Orang tua hanya mendoakan anak," tutur Jokowi, Oktober 2023.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

adalah bentuk manipulasi retorik yang menyamarkan agenda politik. Oleh karena itu, media secara tersirat mendorong praktik komunikasi politik yang jujur dan bertanggung jawab. Rekomendasi yang muncul dari framing ini adalah pentingnya penguatan etika komunikasi bagi pejabat publik, agar tidak menyampaikan pesan-pesan politik yang menyesatkan publik. Dalam konteks teori Entman, kejujuran dalam komunikasi menjadi bagian penting dari

demokrasi deliberatif, dan media bertugas mengembalikan standar moral tersebut melalui kritik terhadap retorika yang menipu.

Kritik terhadap narasi big data yang disampaikan oleh Luhut Pandjaitan juga memperkuat kebutuhan akan verifikasi publik terhadap klaim kekuasaan. Tempo menyebut bahwa data yang dijadikan dasar klaim penundaan pemilu tidak pernah dibuka ke publik, dan bahkan justru menunjukkan bahwa 30% responden menolak gagasan tersebut.

“Tim Luhut menganalisis reaksi yang muncul dari kelompok 30 persen ini bisa menyebabkan protes besar. Bahkan demonstrasi bisa mengarah pada perpecahan dan konflik sosial. Meski begitu, atas restu Istana, Luhut tetap melobi sejumlah politikus senior untuk mendukung penundaan pemilu.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Rekomendasi implisit dari framing ini adalah bahwa setiap kebijakan berbasis data harus disertai dengan prinsip open data agar masyarakat bisa menilai validitasnya secara objektif. Dalam demokrasi yang sehat, tidak boleh ada monopoli informasi yang digunakan untuk menjustifikasi tindakan politik.

Tempo juga membongkar bagaimana Presiden menunda pengumuman pencalonan Gibran saat di luar negeri untuk menghindari reaksi negatif publik.

“Presiden meminta Koalisi Indonesia Maju mengumumkan pencalonan Gibran ketika ia bersama Iriana melawat ke Cina dan Arab Saudi pada pertengahan Oktober 2023. Namun, di Cina, Jokowi mengirim pesan untuk menunda pengumuman” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi kekuasaan telah bergeser dari informatif menjadi manipulatif. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah perlunya regulasi komunikasi kepresidenan yang lebih transparan, serta etika komunikasi yang mendorong keterbukaan, bukan pengendalian waktu dan momentum demi keuntungan elektoral. Dalam framing Entman, media berperan mengembalikan fungsi komunikasi politik sebagai instrumen pertanggungjawaban, bukan sebagai alat mengendalikan persepsi publik.

F. Rekomendasi atas Penggunaan Simbol Budaya untuk Penguatan Dinasti

Tempo membongkar penggunaan Pendapa Pura Mangkunegaran untuk pernikahan Kaesang sebagai bagian dari perluasan pengaruh kekuasaan ke ranah budaya. Dalam narasi tersebut, muncul indikasi bahwa renovasi keraton berkaitan dengan kepentingan pribadi keluarga presiden, meskipun dibantah oleh pihak istana.

“Dua narasumber yang dekat dengan keluarga Jokowi, satu di antaranya keturunan Mangkunegaran, menceritakan bahwa renovasi Keraton Mangkunegaran disebutsebut bagian dari barter keluarga Jokowi.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam framing treatment recommendation, media ini tampak menyiratkan bahwa penggunaan ruang budaya yang sakral untuk kepentingan pribadi elite politik harus diatur secara ketat. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah perlunya pemisahan tegas antara ranah privat kekuasaan dan ruang budaya publik, demi menjaga otoritas moral dan simbolik institusi kebudayaan.

Tempo juga menyoroti bahwa sebelumnya tidak ada pihak non-keturunan Mangkunegaran yang pernah memakai pendapa untuk resepsi pribadi, yang menjadi indikator bahwa peristiwa ini melanggar norma budaya yang telah lama dijaga.

“belum ada pihak yang bukan keturunan Mangkunegaran menggunakan pendapa untuk pernikahan.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Dalam konteks ini, media merekomendasikan penguatan otonomi lembaga budaya agar tidak tunduk pada kekuasaan politik. Artinya, perlu ada upaya untuk memperkuat posisi lembaga adat dan pelestari budaya agar dapat menolak tekanan elite, baik secara halus maupun terang-terangan. Dalam framing Entman, ini adalah bagian dari upaya pemulihan nilai-nilai sosial yang terancam oleh kooptasi kekuasaan.

Tempo juga menyangkal klaim pemerintah bahwa “semua proyek dilakukan sesuai prosedur” dengan kenyataan bahwa proyek-proyek tersebut bertepatan dengan momentum penting dalam keluarga Presiden.

“Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengklaim semua proyek telah melalui proses yang transparan dan sesuai dengan prosedur.” **(Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga, 28/07/2024)**

Oleh karena itu, media menyarankan meskipun tidak secara eksplisit agar pemerintah membuat sistem alokasi proyek berbasis kebutuhan dan urgensi daerah, bukan berbasis kepentingan simbolik atau keluarga pejabat. Rekomendasi ini penting untuk menghindari pengaburan antara urusan negara dan urusan keluarga. Dalam logika Entman, framing problematisasi ruang simbolik yang telah dibahas dalam bab sebelumnya harus diimbangi dengan pembentukan wacana solusi yang memperkuat pemisahan kekuasaan dan otoritas sosial.

Akhirnya, dari keseluruhan narasi, Tempo mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa pencegahan terhadap dinasti politik tidak hanya dilakukan melalui reformasi hukum dan sistem politik, tetapi juga melalui rekonstruksi nilai sosial dan budaya yang menolak dominasi kekuasaan. Dalam hal ini, treatment recommendation bukan hanya soal teknis perundang-undangan, tetapi juga soal pembentukan budaya demokrasi yang sehat dan egaliter. Tempo menutup dengan memberi ruang bagi pembaca untuk menyadari bahwa kekuasaan yang berkelanjutan tanpa koreksi publik akan berujung pada konsolidasi otoritarianisme yang terselubung.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis framing terhadap pemberitaan *Tempo.co*, dapat disimpulkan bahwa media memainkan peran strategis dalam mengonstruksi isu politik dinasti sebagai persoalan publik yang memiliki implikasi serius terhadap demokrasi. Melalui pendekatan teori framing Robert N. Entman, penelitian ini menguraikan cara Tempo mendefinisikan, menjelaskan penyebab, memberikan penilaian moral, hingga menawarkan solusi atas praktik kekuasaan yang cenderung berpihak pada kepentingan keluarga Presiden. Adapun kesimpulan dari penelitian ini dijabarkan berdasarkan keempat pisau analisis framing tersebut sebagai berikut:

1. Define Problem

Tempo membingkai persoalan dinasti politik Jokowi sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip demokrasi. Masalah utama yang disorot adalah bagaimana kekuasaan politik digunakan bukan untuk kepentingan publik, melainkan untuk memperkuat posisi keluarga Presiden dalam struktur pemerintahan. Hal ini terlihat dari manuver-manuver politik yang dilakukan Jokowi untuk membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dalam kontestasi politik nasional.

2. Diagnose Causes

Penyebab utama dari persoalan ini ditelusuri kepada tindakan Presiden Jokowi yang secara aktif menggunakan pengaruh politiknya untuk menjaga kekuasaan tetap berada dalam lingkup keluarganya. Upaya tersebut didukung oleh ketergantungan terhadap instrumen-instrumen kekuasaan seperti Mahkamah Konstitusi dan partai politik. Tempo menyoroti bahwa kekuasaan eksekutif dimanfaatkan untuk mendorong keputusan politik dan hukum yang berpihak pada keluarga presiden, termasuk perubahan batas usia capres/cawapres melalui putusan MK.

3. Make Moral Judgement

Tempo memberi penilaian moral bahwa praktik ini merusak integritas demokrasi Indonesia. Pemberitaan menyiratkan bahwa tindakan Jokowi tidak hanya menurunkan standar etika dalam politik, tetapi juga mengancam masa depan demokrasi dengan membuka jalan bagi politik keluarga (nepotisme) yang menggerus meritokrasi dan kepercayaan publik. Sikap Jokowi dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak mencerminkan sikap kenegarawanan.

4. Treatment Recommendation

Sebagai solusi, Tempo mendorong perlunya pemulihan independensi institusi negara seperti Mahkamah Konstitusi, serta reformasi internal partai politik agar tidak mudah disusupi kepentingan elite politik dan keluarga pejabat. Tempo juga mengindikasikan perlunya peran publik dan media dalam mengkritisi dan mengawasi praktik-praktik politik yang menyimpang agar kualitas demokrasi tetap terjaga.

Tempo membingkai isu dinasti politik Jokowi sebagai ancaman terhadap demokrasi dengan menyoroti penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan keluarga. Masalah utama didefinisikan sebagai upaya sistematis mempertahankan kekuasaan melalui intervensi hukum dan politik. Penyebabnya ditelusuri pada lemahnya kontrol institusional dan dominasi aktor eksekutif. Secara moral, Tempo menilai praktik ini menyimpang dari etika demokrasi dan mencederai semangat kepemimpinan publik. Sebagai solusi, Tempo merekomendasikan penguatan independensi lembaga negara dan reformasi politik untuk mencegah normalisasi politik berbasis kekerabatan.

5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai praktik politik dinasti di Indonesia, khususnya dalam konteks framing media. Bagi para peneliti

berikutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dalam melibatkan media lain yang memiliki karakteristik berbeda, guna memberikan perbandingan yang lebih komprehensif terkait cara media-media di Indonesia membingkai isu politik dinasti. Selain itu, penelitian juga dapat dikembangkan dengan menganalisis respons publik terhadap pemberitaan tersebut, sehingga dapat diketahui sejauh mana framing media mampu mempengaruhi persepsi masyarakat. Bagi Tempo.co, saran yang dapat diberikan adalah agar tetap mempertahankan sikap kritis dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia, namun tetap mengedepankan prinsip keseimbangan dalam pemberitaan. Tempo diharapkan tidak hanya berfokus pada kritik, tetapi juga dapat menyajikan sudut pandang yang lebih beragam dan memberikan ruang yang proporsional bagi pihak-pihak yang dikritik untuk memberikan klarifikasi. Dengan demikian, citra Tempo sebagai media independen yang kritis akan semakin kuat, sekaligus tetap menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemberitaan yang disajikan.

REFERENSI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Bennett, W. L. (2016). *News: The politics of illusion*. University of Chicago Press.
- Druckman, J. N. (2020). Framing, opinion, and democracy. *Journal of Communication*, 70(2), 250–270.
- Entman, R. (2010). Framing media power. *Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives*, 331–355.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>
- Krippendorff, K. (2020). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications.
- McNair, B. (2020). *An Introduction to Political Communication*. Routledge.
- Rahayu, H. T., & Setiawan, B. (2024). Analisis framing Robert N. Entman pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan di media online Detikcom tahun 2022. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/lektur.v7i1.21036>
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2022). *Contemporary sociological theory and its classical roots: The basics*. Sage Publications.
- Sholihah. (2020). *Metode Penelitian: Pendekatan Studi Kepustakaan*. Nama Penerbit.
- Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo.co. *Journal of New Media and Communication*, 1(1 SE-Articles), 1–15. <https://doi.org/10.55985/jnmc.v1i1.1149>
- Strömbäck, J. (2021). *Political Communication in a New Era*. Palgrave Macmillan.
- Strömbäck, J., & Van Aelst, P. (2023). Framing politics in the media: A dynamic interplay between political actors and the media. *Political Communication Studies*, 11(1), 3–18.
- SyafaZahira, R. S., & Adilla, F. (2025). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN POLITIK DINASTI JOKOWI PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 DI MEDIA ONLINE KOMPAS. COM. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 9(1).
- Van Aelst, P., Strömbäck, J., Aalberg, T., Esser, F., de Vreese, C. H., & Van Dalen, A. (2021). *Political Communication* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Wahid, U., Maring, P., & Tony, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Fikom Budi Luhur.
- Winters, J. (2020). *Oligarchy and Democracy: Political Families and Power*. [Publisher Information].